



**SATU
KOMANDO PERTANIAN
WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN**

Andi Amran Sulaiman, dkk.

SATU
KOMANDO PERTANIAN
WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Andi Amran Sulaiman, dkk

PERTANIAN PRESS

2025

SATU KOMANDO PERTANIAN WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

© Andi Amran Sulaiman, dkk.

Penulis : Andi Amran Sulaiman | Iim Mucharam | Erwin Ismu
Wisnubroto | Iksan | Dede Wahyu

Penelaah substansi : Dr. Ir. Desrial, M.Eng., IPU, APEC | Hari Edi Soekirno, S.E.,
M.A

Editor : Eni Kustanti | Isvina Unaizahroya | Epik Finilih

Desain cover dan tata letak : Dimas Rifqi Altranu | Hidayat Raharja

Editor Pruf : Vivit Wardah Rufaidah | Slamet Sutriswanto

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul dan Penanggung Jawab : Satu komando pertanian wujudkan swasembada pangan /
Andi Amran Sulaiman, Iim Mucharam, Erwin Ismu
Wisnubroto, Muhammad Iksan, Dede Wahyu Fahmi
Muharam;
editor, Eni Kustanti, Isvina Unaizahroya, Epik Finilih

Publikasi : Bogor : Pertanian Press, 2025

Deskripsi fisik : 155 halaman; 21 cm

Identifikasi : ISBN 978-979-582-374-2
E-ISBN 978-979-582-375-9 (PDF)

Subjek : Pertanian tanaman pangan

Klasifikasi : 633.17 [23]

Perpusnas ID : <https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1239813>

Sumber gambar cover : Tabloidsinartani.com
Freepik.com

Penerbit:

Pertanian Press, Anggota Ikapi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Redaksi

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. H. Juanda No.20, Bogor 16122
Website: <https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Pertanian Press
Tersedia untuk diunduh secara gratis:
epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

PRAKATA

Sebagai pelaksana pembangunan pertanian, kami melihat secara langsung bagaimana fragmentasi kebijakan, perbedaan kewenangan, dan kelemahan koordinasi sering menjadi hambatan utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Berbagai program telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, namun dampaknya tidak selalu optimal karena setiap sektor bergerak dengan pendekatan yang berbeda. Dari pengalaman tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan satu sistem kerja yang terintegrasi dan memiliki arah yang sama dari hulu hingga hilir.

Buku *Satu Komando Pertanian Wujudkan Swasembada Pangan* ini disusun berdasarkan usaha kami untuk merumuskan pendekatan yang lebih efektif dan terukur dalam memperkuat tata kelola pangan nasional. Gagasan utama yang kami tawarkan adalah pentingnya satu komando sebagai kerangka koordinasi. Satu komando bukan sekadar instruksi, tetapi sebagai metode konsolidasi kebijakan, data, pelaksanaan program, serta pengawasan. Pendekatan ini memberikan nilai kebaruan karena menggabungkan perspektif teknis pertanian dengan analisis kelembagaan, sehingga menghasilkan model pembangunan pangan yang lebih menyeluruh.

Melalui buku ini, kami berupaya memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sistem satu komando dapat bekerja. Bagian awal buku membahas urgensi integrasi kebijakan serta alasan mengapa sektor pangan memerlukan satu garis koordinasi nasional. Bagian berikutnya menguraikan penguatan kelembagaan hulu seperti irigasi, benih, dan pupuk, yang selama ini sering terpisah pengelolaannya. Bab-

bab selanjutnya mengulas koordinasi pelaksanaan produksi di lapangan, peran penyuluh, mekanisasi, serta sinergi dengan berbagai lembaga strategis.

Selain memberikan landasan teoretis dan kebijakan, buku ini juga menyajikan praktik lapangan yang menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan dapat mempercepat peningkatan produksi dan memperbaiki efektivitas program nasional. Pengalaman bekerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, dan pemerintah daerah dalam berbagai program membuktikan bahwa integrasi kebijakan dapat menghilangkan hambatan yang sebelumnya dianggap struktural. Beberapa kebijakan yang kami terapkan di lapangan menunjukkan bahwa produksi dapat meningkat signifikan ketika semua aktor bekerja dalam satu arah instruksi.

Melalui buku ini, kami ingin memberikan landasan yang kuat bagi para pemangku kepentingan untuk memahami, mengadopsi, dan mengembangkan konsep satu komando dalam pembangunan pertanian. Pendekatan ini merupakan strategi lintas sektor yang kami yakini dapat membawa Indonesia menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kolektif mewujudkan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENTINGNYA SATU KOMANDO DI SEKTOR PANGAN	
NASIONAL	1
A. Pertanian Indonesia dan Visi Swasembada Pangan	2
B. Visi Menteri Pertanian dalam Membentuk Sistem Satu Komando	6
C. Pelaku Pembangunan Pertanian Lintas Sektor Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	8
D. Tantangan Ego Sektoral dan Fragmentasi Kelembagaan	11
E. Perlunya Sinergi Pertanian dalam Satu Komando	16
F. Penjabaran Satu Komando Pembangunan Pertanian Pangan	19
G. Dari Visi ke Implementasi Strategi Satu Komando	22
BAB 2 SATU KOMANDO KELEMBAGAAN HULU: INTEGRASI IRIGASI, BENIH, DAN PUPUK	23
A. Kelembagaan Hulu: Fondasi untuk Paradigma Ketahanan Pangan	24
B. Irigasi Sebagai Infrastruktur Hidup Pertanian	25
1. Peran Utama Irigasi Pertanian	25
2. Infrastruktur dan Teknologi Irigasi Pertanian	27
3. Transformasi Kelembagaan Hulu di Sektor Irigasi	29

C.	Benih – Menyatukan Riset, Pengembangan, Produksi, dan Distribusi.....	32
1.	Fragmentasi Kelembagaan dan Sistem Perbenihan Nasional.....	32
2.	Sistem Zonasi Benih Berbasis Agroekosistem.....	33
3.	Peran Kelembagaan Pertanian untuk Benih Nasional.....	34
D.	Pupuk – Menata Ulang Tata Kelola Subsidi dan Distribusi.....	36
1.	Tata Kelola Pupuk Subsidi di Indonesia: Kolaborasi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia	39
2.	Menuju Satu Komando Pupuk Nasional	43
E.	Program KUR sebagai Solusi Permodalan Petani	48
F.	Skema Kelembagaan Hulu yang Terintegrasi	51

BAB 3 PROGRAM SATU KOMANDO DI KELEMBAGAAN

	PRODUKSI.....	55
A.	Transformasi Peran Penyuluh Pertanian.....	56
1.	Kebutuhan Penyuluh dan Kesenjangan SDM.....	56
2.	Reposisi Status Penyuluh: dari Daerah ke Pusat.....	58
3.	Integrasi Tata Kerja dan Komando Lapangan	59
B.	Revitalisasi Pengelolaan Lahan, Irigasi, Alat Mesin Pertanian dan Hilirisasi Pertanian	60
1.	Program Cetak Lahan Sawah.....	60
2.	Optimasi Lahan Suboptimal	63
3.	Modernisasi Alat Mesin Pertanian.....	65
4.	Penguatan Pascapanen dan Hilirisasi.....	69
C.	Integrasi Program Kementerian Pertanian dan Pengawasan TNI–Polri.....	72

1.	Sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas	72
D.	Penguatan Kelembagaan Produksi ke Depan.....	79
BAB 4	PROGRAM SATU KOMANDO DI KELEMBAGAAN HILIR	81
A.	HPP dan Operasi Pasar	82
B.	BULOG: Reposisi Peran dalam Sistem Komando Pangan Nasional	87
C.	Perpadi: Penguatan Rantai Pasok dan Modernisasi Penggilingan Padi.....	91
D.	Asosiasi Komoditas: Penguatan Kelembagaan Petani dalam Tata Kelola Komoditas Pangan Pokok	95
E.	Perusahaan Ekspor-Impor Pangan Strategis Nasional	98
F.	Pelibatan Satgas Pangan Menjaga Stabilitas Harga Pangan	102
G.	Pentingnya Kelembagaan Hilir	105
BAB 5	KUNCI KESUKSESAN SATU KOMANDO.....	107
A.	Koordinasi antara Stakeholder dengan Kementerian Pertanian	108
1.	Integrasi Sistem Informasi dan Data Pertanian	108
2.	Model Kolaborasi Multi-Stakeholder	110
3.	Penguatan Kemitraan Petani – Pemerintah – Swasta	112
B.	Mengesampingkan Ego Sektoral	113
1.	Fragmentasi Kebijakan sebagai Ancaman Ketahanan Pangan	113
2.	Satu Komando sebagai Solusi Tata Kelola Integratif.....	115

3.	Studi Pembelajaran dari Intervensi TNI–Polri dalam Pengawasan Pangan	116
C.	Penentuan Skala Prioritas Demi Kepentingan Petani.....	118
1.	Prinsip Keberpihakan: Kebijakan Berbasis Kebutuhan Riil Petani.....	118
2.	<i>Prioritizing</i> untuk Daya Ungkit Produksi dan Kesejahteraan	120
3.	Inklusivitas dan Responsif terhadap Krisis	121
D.	Buah dari Satu Komando	123
	DAFTAR PUSTAKA	127
	BIOGRAFI PENULIS	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Program Swasembada Pangan dalam Satu Komando	7
Gambar 2. Pelaku Utama di Dalam Pencapaian Swasembada Pangan Nasional.	9
Gambar 3. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman	16
Gambar 4. Penerapan Irigasi Hemat Air (IPHA) sebagai bagian dari strategi nasional.	28
Gambar 5. Kementerian mengakomodasi bantuan sarana Produksi dan Mekanisasi	30
Gambar 6. Kementerian Pertanian bangun ketahanan pangan lewat benih unggul	35
Gambar 7. Aplikasi e-RDKK Kementerian Pertanian	40
Gambar 8. Aplikasi I-Pubers Kementerian Pertanian.....	41
Gambar 9. Peran Kementerian Pertanian di dalam Alokasi Pupuk Bersubsidi	44
Gambar 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk kemudahan akses pupuk subsidi petani.....	46
Gambar 11. Menteri Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman (kanan) dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kiri).....	50
Gambar 12. Tenaga penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan saat ini jumlahnya masih jauh dari kebutuhan.....	57
Gambar 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan urgensi pengalihan status penyuluh guna percepatan swasembada pangan	58

Gambar 14. Rapat koordinasi cetak lahan sawah.....	61
Gambar 15. Kementerian Pertanian meninjau proyek optimasi lahan di Kalimantan Tengah.	65
Gambar 16. Kegiatan memantau uji alat mesin pertanian untuk produksi massal	66
Gambar 17. Penandatanganan MoU antara Kementerian Pertanian dan Kamar Dagang Indonesia untuk mempercepat koordinasi program swasembada pangan berkelanjutan	71
Gambar 18. Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan TNI AD menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan memerlukan koordinasi lintas lembaga	76
Gambar 19. Surat Perintah Aster KASAD PJ Wilayah LTT	77
Gambar 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia agar Kementerian Pertanian mengawal HPP untuk menciptakan kepastian harga bagi petani	84
Gambar 21. Gambar HPP gabah dan harga beras medium nasional.....	86
Gambar 22. Grafik analisa serapan gabah oleh BULOG tahun 2024—2025.	89
Gambar 23. Rapat Kerja Nasional Perpadi tahun 2025	94
Gambar 24. Menteri Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Mabes Polri.....	105

BAB 1

PENTINGNYA SATU KOMANDO

DI SEKTOR PANGAN NASIONAL

Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari empat program utama negara, sejajar dengan ketahanan energi, hilirisasi, dan program makan bergizi untuk anak-anak. Komitmen ini tercermin dalam arah kebijakan nasional yang menekankan peningkatan produksi dalam negeri, perlindungan petani, dan pembangunan infrastruktur pendukung secara masif, mulai dari irigasi hingga alat mesin pertanian (Alsintan). Namun demikian, pencapaian target ambisius ini tidak dapat dicapai dengan pendekatan yang terfragmentasi.

Sektor pangan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Ia melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aktor non-negara yang memiliki fungsi dan mandat yang berbeda-beda. Kementerian Pertanian misalnya, berfokus pada produksi, tetapi sangat bergantung pada dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan air, Kementerian BUMN dalam stabilisasi pasokan dan harga melalui BULOG dan ID Food, serta peran TNI/Polri dalam percepatan implementasi lapangan. Ketika masing-masing instansi bergerak sendiri, sering kali terjadi tumpang tindih

kebijakan, duplikasi program, dan inefisiensi distribusi sumber daya. Di sinilah letak pentingnya “satu komando” dalam sektor pangan.

Konsep Satu Komando Pertanian Pangan Nasional hadir sebagai jawaban atas perlunya integrasi kebijakan dan pelaksanaan lintas sektor serta lintas level pemerintahan. Satu Komando Pembangunan Pertanian Pangan Nasional bukan sekadar slogan, melainkan pendekatan strategis yang menjadikan sektor pangan sebagai urusan bersama yang ditangani secara terkoordinasi dari pusat hingga desa. Melalui satu komando, setiap aktor pembangunan pangan—baik kementerian teknis, aparat keamanan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah—bekerja dalam satu garis instruksi, satu data, dan satu tujuan: mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan, tangguh terhadap krisis, dan sejahtera bagi seluruh petaninya.

A. Pertanian Indonesia dan Visi Swasembada Pangan

Pertanian adalah sektor strategis yang tidak hanya menopang kehidupan ekonomi jutaan rumah tangga di pedesaan, tetapi juga merupakan fondasi bagi ketahanan nasional. Dalam konteks global yang semakin tidak pasti—dengan krisis pangan, inflasi, dan konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok dunia—Indonesia dituntut untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan berdaulat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah merumuskan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan strategis dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah.

Sebagai arah pembangunan nasional, visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan pangan sebagai bagian

dari misi besar membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dalam dokumen kebijakan tersebut, poin kedua menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, air, dan energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendukung misi ini, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan nasional di sektor pertanian yang menekankan pada peningkatan produksi pangan pokok (beras, jagung, dan kedelai), modernisasi teknologi pertanian, optimasi lahan marginal dan lahan rawa, serta perluasan keterlibatan generasi muda dalam pertanian. Selain mengejar swasembada dalam arti kuantitatif, arah kebijakan ini juga berfokus pada keberlanjutan—baik dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan pendapatan petani, maupun stabilisasi pasokan dan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu dari empat program strategis nasional, bersama dengan makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Visi ini diterjemahkan oleh Kementerian Pertanian dalam berbagai program percepatan produksi, modernisasi lahan, dan penguatan kelembagaan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa Indonesia harus kembali ke semangat berdikari dalam urusan pangan. Langkah konkret yang diambil termasuk program Perluasan Areal Tanam (PAT), Cetak Sawah, Optimasi Lahan (Oplah), dan Pompanisasi yang ditargetkan mencakup jutaan hektare lahan di seluruh Indonesia.

Kolaborasi antarsektor menjadi pilar utama dari pendekatan baru ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pihak, seperti Kementerian PUPR untuk pengelolaan irigasi dan air baku, Kementerian

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

BUMN untuk distribusi pangan melalui BULOG dan ID Food, serta dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan tenaga mekanik pertanian di klaster pertanian modern. Contoh nyata sinergi tersebut adalah penandatanganan kesepakatan antara Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. dan Menteri Pekerjaan Umum Ir. Doddy Hanggodo, M.P.E. pada November 2024 untuk meningkatkan indeks pertanaman melalui penyediaan air irigasi yang berkelanjutan di 12 provinsi prioritas.

Selain kerja sama antarkementerian, keterlibatan lembaga negara nonteknis juga menjadi penggerak penting dalam agenda swasembada. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, misalnya, membentuk Posko P3H (Pendampingan, Pengawasan, dan Pencegahan Hukum) di Dadahup, Kapuas untuk mendukung program cetak sawah seluas 75.000 hektare yang ditargetkan menghasilkan dua juta ton beras dalam satu tahun. Langkah ini menunjukkan bahwa pendekatan satu komando tidak hanya melibatkan birokrasi teknis, tetapi juga unsur penegakan hukum demi transparansi dan efisiensi program. Hal serupa juga dilakukan oleh TNI dan Polri yang aktif mendukung Gerakan Tanam Jagung Serentak di 19 provinsi, dengan target total tanam 1,7 juta hektare.

Upaya swasembada juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan di tingkat desa. Program Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, menjadi solusi permanen untuk memangkas rantai pasok dari delapan jalur menjadi tiga: petani → koperasi → konsumen. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo dan didorong oleh Kementerian Pertanian bersama PT Pos Indonesia, bertujuan menstabilkan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani

dengan memotong peran tengkulak yang dinilai menyerap keuntungan hingga Rp313 triliun dari sembilan bahan pokok setiap tahun. Selain itu, operasi pasar pangan murah skala besar juga digelar di 4.500 titik gerai Pos Indonesia menjelang bulan Ramadan, menunjukkan komitmen negara dalam menjangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Visi swasembada pangan tidak akan tercapai tanpa inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian juga menggandeng perguruan tinggi dan alumni institusi pendidikan tinggi negeri yang tergabung dalam Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk menyumbangkan riset, teknologi alsintan, dan varietas unggul seperti padi IPB 9G yang mampu tumbuh di lahan kering. Kerja sama dengan Kemendikti Saintek juga diperkuat dalam riset budi daya, pelatihan petani, dan pengembangan klaster pertanian modern di wilayah transmigrasi seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Semua inisiatif ini membentuk ekosistem kolaboratif untuk mewujudkan swasembada bukan hanya sebagai kebijakan, melainkan sebagai gerakan nasional. Inisiatif ini tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi bagi petani muda dan pelaku usaha agribisnis masa depan. Pembangunan sektor pertanian diarahkan melalui pendekatan kolaboratif—menggabungkan riset, teknologi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan—dengan sasaran akhir mempercepat capaian swasembada secara menyeluruh.

Dalam situasi ini, koordinasi lintas sektor dan aktor bukan lagi sebatas pelengkap, melainkan kunci utama untuk menjamin keberhasilan program pangan nasional. Ketika seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu garis kebijakan dan komando—dari pusat hingga desa, dari birokrasi hingga komunitas—maka tujuan besar

swasembada pangan akan lebih mudah tercapai. Keberhasilan ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi tercapainya cita-cita jangka panjang Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

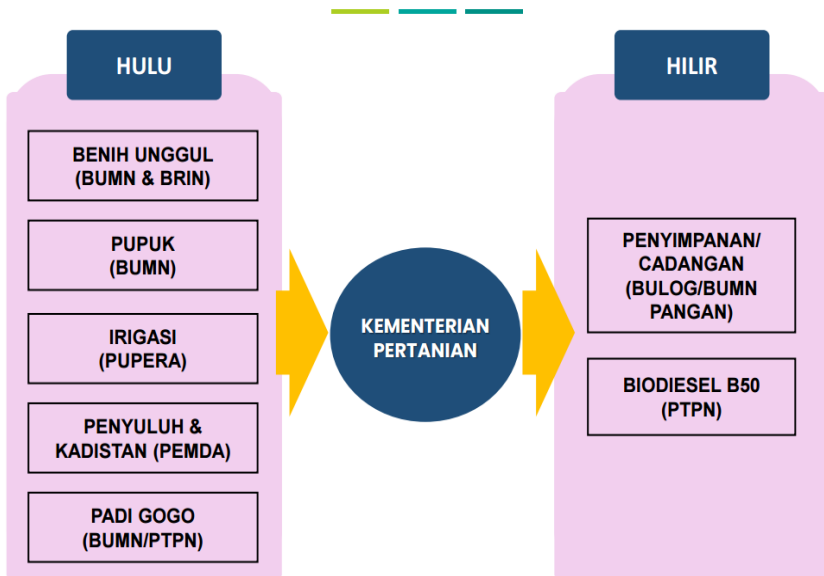
B. Visi Menteri Pertanian dalam Membentuk Sistem Satu Komando

Transformasi tata kelola sektor pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari visi strategis Kementerian Pertanian yang memandang bahwa fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi lintas kelembagaan, serta lambatnya respons terhadap dinamika pasar menjadi akar persoalan struktural. Dalam berbagai pernyataan publik dan arahan kebijakan, sering kami menggambarkan pentingnya sebuah sistem yang tidak hanya menyatukan arah, tetapi juga membentuk pola tindakan terpadu dari hulu hingga hilir. Visi tersebut bermula dari keprihatinan terhadap kondisi petani yang sering kali menjadi korban dari tumpang tindih kebijakan, ketidaksinkronan distribusi input produksi, dan ketidakpastian pasar hasil panen. Dari sinilah lahir gagasan membentuk sistem “Satu Komando Pangan” sebuah kerangka kebijakan yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data, konsolidasi peran kelembagaan, dan pengawasan berlapis di seluruh rantai nilai pertanian.

Pendekatan satu komando bukanlah sekadar retorika institusional, melainkan dijalankan melalui berbagai gebrakan nyata. Kementerian Pertanian menginisiasi *dashboard* pengendalian pangan nasional yang mengintegrasikan data produksi, distribusi, dan harga

secara *real time*. Selain itu, juga melakukan koordinasi antara jajaran eselon I untuk menyinergikan program kerja secara lintas direktorat dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis fakta lapangan. Dalam forum-forum koordinasi lintas kementerian, Kementerian Pertanian mendorong pendekatan “komando teknis” untuk meminimalkan ego sektoral dan memastikan bahwa kebijakan pupuk, benih, pembiayaan, dan logistik berjalan dalam satu garis yang konsisten. Pendekatan ini menuai dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, pelaku usaha, hingga BUMN strategis yang selama ini bergerak secara parsial dalam rantai pangan nasional (Gambar 1).

PROGRAM SWASEMBADA DALAM SATU KOMANDO



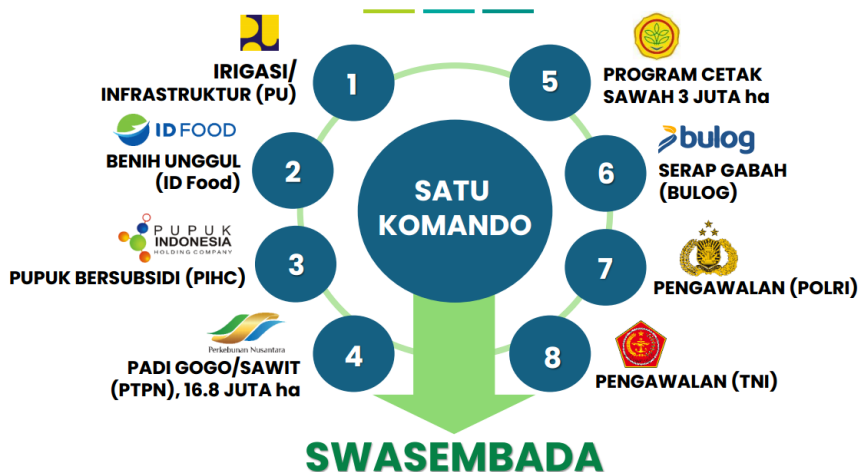
Gambar 1. Program Swasembada Pangan dalam Satu Komando
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Visi ini semakin menguat ketika Menteri Pertanian berhasil membuktikan dampaknya melalui kebijakan optimasi lahan (Oplah) yang mengintegrasikan pendampingan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, percepatan tanam, serta distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa satu komando bukanlah konsep sentralisasi otoritas, melainkan orkestrasi kepemimpinan yang memungkinkan semua aktor dalam sistem pangan nasional untuk bergerak serentak, terarah, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

C. Pelaku Pembangunan Pertanian Lintas Sektor Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia merupakan hasil kerja bersama berbagai institusi pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, serta mitra nonpemerintah. Merujuk konteks pangan nasional, pelaku pembangunan mencakup Kementerian Pertanian sebagai lembaga teknis utama, Kementerian Pekerjaan Umum untuk irigasi dan infrastruktur air, Kementerian BUMN melalui BULOG dan ID Food sebagai stabilisator harga dan distribusi, serta lembaga seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan yang kini aktif mendukung pelaksanaan lapangan dan pengawasan program (Gambar 2). Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memainkan peran krusial dalam penyediaan lahan, pelaksanaan penyuluhan, serta koordinasi kelembagaan lokal.

PELAKU UTAMA DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN



Gambar 2. Pelaku Utama di dalam Pencapaian Swasembada Pangan Nasional.
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah fragmentasi kelembagaan dan ego sektoral antar-institusi. Banyak kementerian memiliki program yang bersinggungan, namun dijalankan secara terpisah tanpa integrasi yang memadai. Contohnya dalam program cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah), Kementerian Pertanian dan Kementerian PU memiliki peran saling melengkapi, namun di lapangan sering terjadi perbedaan prioritas, jadwal, dan lokasi intervensi. Hal ini menghambat pencapaian Indeks Pertanaman (IP) yang optimal. Situasi serupa juga terjadi dalam distribusi pupuk, alsintan, dan benih yang masih mengalami tumpang tindih otoritas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ketidakterpaduan data dan kurangnya pemetaan wilayah turut memperburuk perencanaan dan evaluasi.

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

Selain itu, pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan kejelasan instruksi teknis dari pusat. Dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala dinas se-Indonesia, Menteri Pertanian menekankan pentingnya konsolidasi peran pemerintah daerah untuk mengawal produksi beras dan jagung, terutama dalam menghadapi dampak el nino dan perbaikan irigasi yang tertunda. Namun, beberapa dinas menyampaikan bahwa perbaikan saluran irigasi yang belum selesai dan bergesernya musim tanam akibat cuaca ekstrem menghambat pencapaian target produksi. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi dua arah yang lebih responsif antara pusat dan daerah.

Upaya satu komando yang telah dijalankan mulai menunjukkan arah baru dalam integrasi kelembagaan. Posko Kejaksaan di Kalimantan Tengah, misalnya, membuktikan bahwa lembaga penegak hukum dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal implementasi program swasembada pangan melalui pengawasan hukum dan penguatan akuntabilitas. Begitu pula dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program tanam jagung serentak dan pengamanan distribusi pangan. Model ini tidak hanya memperluas kapasitas eksekusi program, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif lintas sektor. Di sisi lain, Kementerian Pertanian mulai aktif membentuk kelompok kerja lintas lembaga dan membuka ruang konsultasi dengan pihak swasta, seperti KADIN dan BUMN pangan, dalam upaya mendorong hilirisasi dan distribusi yang efisien.

Di dalam membangun integrasi kelembagaan, perlu diperhatikan bahwa upaya utama tidak cukup hanya melalui pendekatan struktural. Diperlukan pula pembenahan dalam aspek

budaya birokrasi, sistem informasi bersama, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung prinsip gotong royong. Pada berbagai forum, kami mendorong penyederhanaan regulasi dan pembentukan satu sistem kerja lintas kementerian yang memudahkan pelaksanaan dan pengawasan. Konsep klaster pertanian modern yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian BUMN merupakan contoh konkret bagaimana koordinasi dapat dikembangkan berbasis wilayah dengan pembagian tugas yang jelas dan terukur.

Ke depan, penguatan tata kelola multi aktor dalam pembangunan pertanian harus diarahkan pada satu kesatuan komando berbasis data, wilayah, dan tujuan bersama. Pemerintah pusat perlu memfasilitasi harmonisasi program, memastikan peran masing-masing lembaga terintegrasi dalam kerangka *grand design* swasembada pangan, dan membangun mekanisme monitoring yang partisipatif. Pemerintah daerah sebagai pelaksana terdekat dengan petani dan masyarakat desa harus didorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, literasi digital, dan kemandirian fiskal. Dengan komitmen bersama dan desain koordinasi yang kuat, Indonesia dapat melangkah lebih cepat menuju ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

D. Tantangan Ego Sektoral dan Fragmentasi Kelembagaan

Swasembada pangan adalah cita-cita besar yang membutuhkan orkestrasi nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak program strategis di sektor pertanian yang mengalami hambatan bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Ego sektoral—yakni sikap

mempertahankan kewenangan, otoritas, dan program secara eksklusif oleh masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah—menjadi salah satu tantangan struktural paling mendasar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketika lembaga-lembaga negara tidak bersedia saling membuka, menyelaraskan data, atau berbagi sumber daya, maka program sebesar apa pun akan terfragmentasi dan kehilangan daya ungkit nasionalnya.

Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat pada penyediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian, misalnya, bertanggung jawab atas penyediaan benih unggul, pupuk, dan alsintan; sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengelola jaringan irigasi dan infrastruktur air. Dalam berbagai kasus, program tanam tidak dapat berjalan optimal karena irigasi belum tersedia, atau sebaliknya, infrastruktur telah siap tetapi belum ada pengalokasian benih dan alat tanam. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan lemahnya integrasi antarsektor yang semestinya saling mendukung. Dalam konteks kelembagaan lama, masing-masing institusi bekerja sendiri-sendiri dalam satu sistem yang tidak berada dalam satu garis komando.

Kajian akademik terbaru menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan bukan hanya persoalan birokrasi, tetapi hambatan struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maskun et al. (2022) menyebut fenomena ini sebagai *fragmented agencies*, yakni situasi ketika kementerian atau lembaga negara menjalankan agenda sektoral yang tidak selaras dengan kebijakan nasional, akibat minimnya integrasi agenda dan tumpang tindih fungsi kelembagaan. Dalam konteks kebijakan iklim dan pangan, fragmentasi

ini tercermin dalam ketidakharmonisan antara rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan. Ketiadaan garis koordinasi yang kuat menyebabkan kebijakan yang seharusnya saling memperkuat justru saling melemahkan.

Fenomena ego sektoral tidak hanya berdampak pada koordinasi kelembagaan, juga menghambat transformasi struktural yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya saing sektor pertanian nasional. Seperti dikemukakan oleh Otsuka (2021), salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah ketidaksesuaian antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan mendesak untuk memperbesar skala usaha tani guna mendorong mekanisasi dan menurunkan biaya produksi, terutama dalam sektor tanaman pangan. Namun, berbagai kebijakan sektoral seperti subsidi harga beras, fragmentasi program pupuk, serta hambatan dalam konsolidasi lahan justru mempertahankan pola usaha tani kecil yang tidak efisien dan sulit dimodernisasi. Akibatnya, pertanian padi Indonesia berada dalam lingkaran proteksionisme yang mahal dan berisiko kehilangan keunggulan komparatif.

Lebih lanjut, upaya diversifikasi ke produksi komoditas bernilai tinggi (*high-value products/HVPs*), seperti hortikultura, peternakan, dan perkebunan berkelanjutan juga tidak berkembang secara optimal karena kelembagaan pendukung yang tersekat. Otsuka menegaskan bahwa promosi HVP membutuhkan dukungan kelembagaan yang utuh, yaitu sistem penyuluhan yang kuat, penguatan agroindustri, dan fasilitasi kontrak pertanian yang inklusif. Sayangnya, lembaga-lembaga terkait seperti penelitian dan pengembangan (Litbang), penyuluhan daerah, dan sektor agroindustri seringkali bekerja secara terpisah, tanpa

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

mekanisme integrasi yang efisien. Ketika akses petani terhadap input, teknologi, dan pasar modern bergantung pada program sektoral yang saling tidak terhubung, maka produktivitas dan pendapatan petani sulit meningkat. Oleh karena itu, reformasi tata kelola dan pembentukan kerangka satu komando menjadi langkah krusial untuk mendorong transformasi pertanian yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pangan, Dalimunthe et al. (2024) menyoroti bahwa desentralisasi pemerintahan pascareformasi telah memperparah polarisasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan ketahanan pangan, khususnya di wilayah perkotaan. Konsep *institutional gridlock* menggambarkan kebuntuan koordinasi antar-institusi akibat tumpang tindih kewenangan, perbedaan orientasi politik, dan lemahnya mekanisme integrasi antar level pemerintahan. Sebagai contoh, kebijakan perlindungan petani di bawah Kementerian Pertanian kerap bertabrakan dengan kebijakan stabilisasi harga dari Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, lembaga seperti BULOG, Dinas Pangan Daerah, dan BUMD pangan seringkali bekerja dalam kerangka yang tidak tersinkronisasi. Konsekuensinya, sistem pangan nasional kehilangan kecepatan adaptif dalam merespons krisis atau kebutuhan masyarakat. Jika ego sektoral ini tidak ditangani melalui kebijakan integratif dan penguatan logika kolaboratif antarlembaga, maka upaya swasembada pangan akan terus terhambat oleh inefisiensi struktural.

Selain pada aspek teknis, ego sektoral juga muncul dalam penyaluran dan pengawasan subsidi. Program pupuk bersubsidi misalnya, dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan dikontrol oleh berbagai entitas di pusat dan daerah. Namun karena tidak

ada sistem terpadu dan satu data, distribusi pupuk kerap kali tidak merata, berlebih di satu wilayah dan kekurangan di wilayah lain. Pengawasan oleh aparat juga terhambat karena tidak adanya integrasi dalam mekanisme pelaporan dan evaluasi. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam sinkronisasi program pusat. Dalam rakor nasional bersama para Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia, beberapa kepala dinas menyampaikan bahwa program irigasi, pupuk, dan perluasan lahan dari pusat sering datang tanpa koordinasi lokal yang jelas, menyebabkan perencanaan daerah menjadi tidak efektif.

Ego sektoral juga menjadi kendala dalam mengonsolidasikan kekuatan kelembagaan di bidang hilir, terutama dalam penyerapan hasil panen dan pengendalian harga. Peran BULOG, ID Food, PT PPI, dan BUMN pangan lainnya sering berjalan tumpang tindih, sehingga penyusunan cadangan pangan nasional dan penyerapan gabah tidak berjalan maksimal. Dalam satu kesempatan, Menteri Pertanian menyoroti bahwa struktur kelembagaan pangan Indonesia sebelumnya tidak berada dalam satu komando, menyebabkan potensi keuntungan hilir hanya menghasilkan surplus Rp0,4 triliun, sementara kerugian akibat ketidakefisienan mencapai Rp139 triliun.

Dampak dari ego sektoral ini bukan hanya pada inefisiensi fiskal dan hilangnya peluang produksi, tetapi juga melemahkan kepercayaan petani terhadap negara. Ketika petani melihat bahwa program bantuan tidak datang tepat waktu, harga tidak stabil, dan tidak ada jaminan serapan panen, maka mereka cenderung bersikap pasif terhadap program pemerintah. Hal ini menyebabkan stagnasi produktivitas dan ketidakberlanjutan program swasembada. Dalam konteks ini, penyuluh

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

pertanian sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah dengan petani pun menghadapi dilema karena tidak jarang mereka sendiri kebingungan dengan arahan dari pusat dan daerah yang berbeda-beda.

Ke depan, Indonesia membutuhkan satu sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan yang menyatukan kewenangan dalam satu arsitektur kelembagaan yang lebih ramping, responsif, dan kolaboratif. Penguatan regulasi dalam bentuk Inpres atau Perpres untuk mendorong integrasi penyuluh, konvergensi data pertanian, dan harmonisasi target lintas kementerian adalah langkah yang perlu segera diwujudkan. Dengan demikian, ego sektoral dapat didekonstruksi melalui kerangka kebijakan yang mendorong kerja sama, memperkuat insentif kolektif, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral. Inilah jalan menuju swasembada pangan yang tidak hanya terukur, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

E. Perlunya Sinergi Pertanian dalam Satu Komando



Gambar 3. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Sumber: antarfoto, 2023

Pengelolaan pertanian nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menunjukkan batas-batas efektivitasnya. Ketika fungsi-fungsi seperti produksi (Kementerian Pertanian), irigasi (Kementerian PU), distribusi dan stabilisasi harga (BUMN pangan seperti BULOG dan ID Food), hingga pengawasan lapangan (TNI/Polri) berjalan sendiri-sendiri, maka kebijakan pangan mudah terjebak dalam tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. Seperti ditunjukkan dalam studi Dalimunthe et al. (2024), fenomena *institutional gridlock* menjadi nyata ketika kelembagaan tumpang tindih, orientasi sektoral tidak sinkron, dan ruang koordinasi antarpihak lemah. Tanpa satu kerangka kepemimpinan strategis, pembangunan pertanian akan terus menghadapi hambatan sistemik yang berulang.

Mentan Amran Tegaskan Hulu Hilir Pangan Harus Satu Komando

1. Mentan Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat.
2. BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker), sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.
3. Dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando. Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog.

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

Pendekatan satu komando juga memungkinkan integrasi pendekatan *policy-to-implementation* dari pusat ke daerah. Sebagai contoh, dalam pengembangan klaster pertanian modern di kawasan transmigrasi dan perbatasan, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Desa, BUMN Pangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa program bukan hanya berhenti pada perencanaan, tetapi berlanjut sampai pada penyediaan tenaga kerja terlatih, alat mesin pertanian, infrastruktur pendukung, dan serapan hasil. Otsuka (2021) menegaskan bahwa koordinasi semacam ini sangat diperlukan untuk mendorong mekanisasi, konsolidasi lahan, serta pengembangan produk bernilai tinggi (HVPs) yang selama ini terhambat oleh keterbatasan sistem pendukung terpadu. Dengan satu komando, penguatan penyuluhan, reformasi riset, dan pengembangan agroindustri dapat dijalankan dengan arah kebijakan yang konsisten.

Lebih jauh lagi, sinergi dalam satu komando menjadi sangat penting dalam konteks transformasi pertanian Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, dan kebutuhan akan efisiensi fiskal. Strategi pembangunan pangan nasional tidak lagi cukup dengan intervensi programatik jangka pendek. Strategi Pembangunan Pangan Nasional membutuhkan arsitektur kebijakan jangka panjang yang bersifat lintas sektor, lintas skala, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan pendekatan satu komando yang berbasis data bersama, sistem evaluasi terintegrasi, dan akuntabilitas lintas lembaga, maka Indonesia dapat membangun fondasi kelembagaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga tahan uji dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

F. Penjabaran Satu Komando Pembangunan Pertanian Pangan

Konsep satu komando dalam pembangunan pertanian bukan sekadar retorika koordinasi, melainkan pendekatan strategis yang mendesain ulang cara negara mengelola sistem pangan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, dari pusat ke desa. Dalam struktur ini, Kementerian Pertanian berperan sebagai komando teknis yang tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mengoordinasikan peran kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi vital. Kementerian PU, misalnya, difokuskan pada penyediaan irigasi dan air baku; Kementerian BUMN memastikan peran BULOG, ID Food, dan PT Pos Indonesia sebagai *off-taker* strategis; sementara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah menjadi penghubung antara program nasional dan partisipasi lokal melalui pengelolaan lahan dan kelompok tani. Dalam konteks ini, satu komando berarti integrasi peran dengan satu garis koordinasi kebijakan dan pelaksanaan.

Untuk menjamin keberlanjutan sistem satu komando, diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya bertumpu pada instruksi, tetapi juga pada desain kelembagaan yang adaptif dan berbasis insentif. Seperti dikemukakan oleh Otsuka (2021), perubahan sistemik membutuhkan kombinasi antara insentif fiskal, penguatan penyuluhan, dan dukungan terhadap agroindustri lokal. Hal ini bisa dimulai dengan mendesain klaster pertanian modern berbasis wilayah (*area-based model*) yang menyatukan aktor produksi, pengolahan, dan distribusi dalam satu ekosistem. Setiap klaster memiliki tim koordinasi lintas sektor, terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, koperasi, dan pelaku pasar lokal. Model seperti ini bukan

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

hanya efektif secara administratif, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif dalam mencapai target swasembada pangan.

Akhirnya, satu komando bukan hanya soal kepemimpinan teknokratis, melainkan juga tentang membangun semangat kebangsaan dalam mengelola pangan. Ketika pangan dipahami sebagai urusan strategis negara, maka keberhasilan swasembada menjadi indikator keberhasilan kolaborasi nasional. Dengan satu komando, Indonesia dapat keluar dari jebakan koordinasi sektoral yang melemahkan, dan bergerak menuju sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Jika seluruh komponen bangsa—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi—bergerak dalam satu barisan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan hanya visi, tetapi sebuah keniscayaan yang dimulai dari ladang dan sawah rakyat.

 **Box Discussion: Fragmentasi Kelembagaan vs Komando Teknis**

Kebutuhan Satu Garis Komando dalam Sektor Pangan

Masalah:

Fragmentasi kelembagaan di sektor pangan menyebabkan duplikasi program, distribusi input yang tidak sinkron, dan tumpang tindih kewenangan antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Konsekuensi Nyata:

Irigasi tersedia, tetapi benih tidak datang tepat waktu. Bantuan pupuk tiba, tetapi tidak sesuai musim tanam. Program cetak sawah tidak didukung pelatihan petani atau jaminan serapan hasil panen. Data petani dan lahan tumpang tindih antara pusat dan daerah

Solusi Komando Teknis:

Komando teknis adalah pendekatan koordinasi berbasis instruksi terpadu dan data bersama dengan Kementerian Pertanian sebagai titik simpul koordinasi nasional.

Contoh Nyata

Program Optimasi Lahan (Oplah): penyelarasan antara Babinsa, penyuluh, dan petani *Dashboard* Serapan Pangan: integrasi distribusi Bulog–TNI–Pemda Posko Kejaksaaan: pendampingan program cetak sawah.

Kesimpulan: Tanpa satu komando teknis, program pangan hanya menjadi daftar kegiatan. Melalui satu komando, seluruh ekosistem pangan bisa bergerak dalam satu arah, satu data, dan satu semangat gotong royong.

G. Dari Visi ke Implementasi Strategi Satu Komando

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan bertahap mengenai sistem Satu Komando Pangan Nasional, buku ini disusun dalam tujuh bab yang saling terhubung dan membentuk alur naratif dari visi hingga implementasi, serta dari kelembagaan hulu hingga hilir. Setiap bab dirancang untuk menjawab satu pertanyaan fundamental: bagaimana kepemimpinan, kelembagaan, dan kebijakan dapat bergerak secara serempak untuk mendukung kedaulatan pangan nasional?

Bab 2 dan Bab 3 akan menggambarkan arsitektur kelembagaan di tingkat hulu dan koordinasi lintas eselon, termasuk integrasi pelaku seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Berdikari. Sementara Bab 4 fokus pada kelembagaan hilir, menampilkan peran strategis institusi seperti PT Agrinas, Badan Karantina Indonesia, dan PT ID Food dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

Bab 5 menghadirkan studi kasus konkret yang menunjukkan dampak implementasi sistem ini di beberapa daerah, disertai data perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya pendekatan satu komando. Akhirnya, Bab 6 merangkum pembelajaran strategis, tantangan kebijakan, dan rekomendasi untuk memperkuat keberlanjutan sistem ini ke depan. Dengan susunan ini, buku ini tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi juga menjadi acuan reflektif dan proyeksi strategis untuk masa depan pembangunan pertanian Indonesia

BAB 2

SATU KOMANDO KELEMBAGAAN HULU: INTEGRASI IRIGASI, BENIH, DAN PUPUK

“Mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando. Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat Pupuk Indonesia dan di hilir ada Bulog.”



Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan hilir seperti distribusi dan stabilisasi harga, tetapi sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan di sektor hulu. Kelembagaan Hulu pertanian yang mencakup sistem irigasi, perbenihan, dan tata kelola pupuk, merupakan titik awal dari seluruh rantai produksi pangan. Sayangnya, dalam praktiknya, sektor ini masih terjebak dalam fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan yang berdampak langsung pada rendahnya efisiensi dan efektivitas kebijakan. Untuk itu, dibutuhkan kerangka kerja “satu komando” yang mampu menyatukan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program lintas sektor secara terpadu.

Bab ini akan membahas bagaimana kelembagaan hulu yang kuat dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam paradigma ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan satu komando, irigasi, benih, dan pupuk tidak lagi dipandang sebagai input yang berdiri sendiri, melainkan

sebagai sistem yang saling terhubung dan saling menentukan. Integrasi kelembagaan hulu menjadi prasyarat untuk mendorong efisiensi produksi, meningkatkan ketepatan intervensi pemerintah, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

A. Kelembagaan Hulu: Fondasi untuk Paradigma Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan nasional tidak dapat dibangun semata-mata dari hasil panen atau jumlah stok di gudang logistik. Sebaliknya, ketahanan pangan bermula dari kekuatan dan efektivitas kelembagaan di sektor hulu pertanian meliputi irigasi, perbenihan, dan pemupukan. Ketiga aspek ini bukan hanya instrumen teknis, tetapi merupakan sistem kelembagaan yang menentukan keberlangsungan produksi, efisiensi usaha tani, serta adaptabilitas terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Dalam konteks transformasi sistem pangan global, Indonesia membutuhkan kelembagaan hulu yang terintegrasi dan responsif sebagai fondasi utama untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan domestik.

Sayangnya, kelembagaan hulu di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah, tumpang tindih program, serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah menyebabkan inefisiensi distribusi input pertanian, rendahnya akses petani terhadap benih unggul dan pupuk bersubsidi, serta degradasi infrastruktur irigasi. Kebijakan seringkali bersifat sektoral dan tidak disinkronkan dalam kerangka ekosistem pangan nasional. Akibatnya, meskipun intervensi teknis terus dilakukan,

hasil yang diperoleh tidak maksimal karena hilangnya kesinambungan dari sisi kelembagaan.

Dalam paradigma satu komando pertanian pangan nasional, reformasi kelembagaan hulu menjadi titik masuk utama. Pendekatan satu komando tidak sekadar menggabungkan instansi, tetapi menyatukan tujuan, menyelaraskan sistem data, memperkuat koordinasi lintas kelembagaan, dan mendekatkan layanan kepada petani dalam satu rantai pengambilan keputusan yang utuh. Di sinilah letak urgensinya: ketika irigasi, benih, dan pupuk berada dalam satu koordinasi operasional dan sistem evaluasi bersama, maka efisiensi anggaran meningkat, kebocoran bisa dikurangi, dan efektivitas bantuan langsung ke petani bisa ditingkatkan.

Lebih jauh, satu komando kelembagaan hulu bukan hanya strategi teknokratis, tetapi juga penegasan paradigma pembangunan pangan yang berbasis keadilan akses dan keberlanjutan. Sistem kelembagaan hulu yang terintegrasi memastikan bahwa seluruh proses pertanian yang terdiri dari sumber air, kualitas input, hingga ketersediaan sarana produksi, berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan. Dalam konteks ini, satu komando kelembagaan hulu bukan sekadar alat birokrasi, tetapi fondasi kedaulatan pangan itu sendiri.

B. Irigasi Sebagai Infrastruktur Hidup Pertanian

1. Peran Utama Irigasi Pertanian

Irigasi merupakan tulang punggung kelembagaan hulu dalam sistem pertanian pangan nasional. Dalam konteks Indonesia, lebih dari 74% air tawar digunakan untuk irigasi, terutama untuk budi daya padi yang menjadi makanan pokok mayoritas penduduk (Tirtalistyani et al. 2022).

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

Namun, sejak tahun 2018, sekitar 46% infrastruktur irigasi di Indonesia mengalami kerusakan sedang hingga berat, yang berkontribusi langsung terhadap inefisiensi pengelolaan air dan menurunnya produktivitas lahan. Upaya modernisasi irigasi kini menjadi agenda prioritas nasional untuk menopang program Swasembada Pangan 2025 yang mengandalkan dukungan infrastruktur air yang andal dan berkelanjutan (Dharma et al. 2025). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menginisiasi pendekatan "satu komando" dalam pengelolaan irigasi, dengan mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lintas sektor.

Salah satu langkah konkret adalah kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program penguatan irigasi pada 2,3 juta hektare lahan. Program ini mencakup optimalisasi lahan seluas 851 ribu hektare, pencetakan sawah baru seluas 500 ribu hektare, dan normalisasi irigasi pada 1 juta hektare lahan eksisting (Majalah Hortus Archipelago, 2024). Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan TNI menunjukkan bentuk kelembagaan hulu yang kuat dan terpadu. Kegiatan ini mencakup normalisasi saluran irigasi, pembangunan bendungan seperti Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 172 menjadi 272, serta penerapan sistem irigasi hemat air berbasis teknologi (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, 2024).

Tantangan yang dihadapi untuk dapat menyediakan jaringan irigasi yang berkelanjutan sebagai penopang ketahanan pangan tidaklah

mudah. Studi oleh Tirtalistyani et al. (2022) mengungkap bahwa sebagian besar irigasi Indonesia masih menerapkan sistem genangan air permanen yang tidak hanya boros air, tetapi juga menyumbang emisi gas rumah kaca seperti metana (CH_4). Sawah tergenang secara terus-menerus menciptakan kondisi anaerob yang ideal bagi bakteri penghasil metana. Padahal, modernisasi irigasi seperti penerapan pengairan berselang (*intermittent irrigation*) terbukti dapat mengurangi emisi CH_4 hingga 50% dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Inovasi teknologi juga menjadi fokus utama.

2. Infrastruktur dan Teknologi Irigasi Pertanian

Penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) telah menunjukkan hasil positif, dengan penghematan air hingga 30% dan peningkatan produktivitas padi hingga 11 ton per hektare (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Teknologi ini mengatur siklus pengairan sawah secara berselang (*intermittent irrigation*), memungkinkan efisiensi penggunaan air dan peningkatan hasil panen. Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU berencana memperluas penerapan IPHA ke seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional (Gambar 4).



Gambar 4. Penerapan Irigasi Hemat Air (IPHA) sebagai bagian dari strategi nasional.
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2025

Selain itu, pembangunan infrastruktur baru seperti Bendungan Jlantah di Karanganyar, Jawa Tengah, juga menjadi bagian dari upaya modernisasi irigasi. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 10,97 juta m³ dan dirancang untuk mengairi 1.494 hektare lahan pertanian, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172% menjadi 272%. Proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah melalui koordinasi lintas Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyediakan infrastruktur irigasi yang mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, 2024).

3. Transformasi Kelembagaan Hulu di Sektor Irigasi

Lebih lanjut, kerangka *Collaborative Governance* dalam studi Dharma et al. (2025) di Kabupaten Garut menegaskan pentingnya peran TNI dalam memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan irigasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, tetapi juga terlibat langsung dalam penyediaan pompa air, pipa, dan sumur. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas irigasi tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kelembagaan yang kooperatif, legal, dan berkelanjutan.

Transformasi kelembagaan hulu di sektor irigasi tidak cukup hanya pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial-budaya. Banyak petani masih memiliki persepsi bahwa sawah harus selalu tergenang, karena praktik ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya agraris lokal. Oleh karena itu, edukasi dan insentif berbasis hasil (*result-based incentive schemes*) perlu dikembangkan agar petani bersedia menerapkan praktik irigasi efisien dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan kelembagaan hulu yang kokoh pada sektor irigasi harus mencakup integrasi teknologi hemat air, sinergi multi-aktor, pendekatan budaya, serta sistem insentif yang mendorong perubahan perilaku petani. Dalam kerangka “Satu Komando Pertanian Pangan Nasional”, kelembagaan irigasi menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim, degradasi lahan, dan tantangan peningkatan produksi (Gambar 5).

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan



Gambar 5. Kementerian Pertanian mengakomodasi bantuan sarana produksi dan mekanisasi

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Aspek pengelolaan irigasi yang mendukung sektor pertanian telah berjalan lama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sinergitas antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dalam hal pengelolaan air irigasi. Kini intensitas sinergitas tersebut telah berkembang sangat jauh. Misalnya, dahulu kolaborasi lebih bersifat umum dalam hal pembangunan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung produksi pertanian. Saat ini, kolaborasi tersebut lebih terstruktur dan terarah, bahkan pengelolaan irigasi bukan hanya antara Kementan dengan Kementerian PU saja, tapi juga didukung oleh TNI AD. Seluruh pihak bersinergi untuk fokus mewujudkan perintah Presiden RI, yaitu mewujudkan swasembada pangan, peningkatan luas lahan, dan

peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan irigasi secara optimal.

Kementan, Kemen PU, dan TNI AD saling bergandeng tangan untuk mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan irigasi beserta program terkait lainnya. Kementan mengambil peran dalam penyediaan sarana produksi, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta menggerakkan petani milenial/Brigade Pangan. Sementara itu, Kementerian PU berkewajiban untuk memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur, seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung, dan lainnya. Selanjutnya, TNI AD berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar swasembada pangan dapat tercapai.

Dulu/Before	Sekarang/After
Fokus: Pembangunan dan pengelolaan irigasi secara umum untuk mendukung produksi pertanian.	Fokus: Optimalisasi pemanfaatan irigasi untuk mencapai swasembada pangan, meningkatkan luas lahan sawah, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Skala: Kolaborasi lebih bersifat sektoral dan tidak terlalu intensif.	Skala: Kolaborasi lebih intensif dengan program-program yang terstruktur dan koordinasi yang lebih kuat antara Kementan dan Kemen PU.
Sasaran: Meningkatkan produksi pertanian secara keseluruhan, tanpa fokus	Sasaran: Mencapai swasembada pangan, meningkatkan luas lahan sawah melalui program cetak

khusus pada swasembada pangan atau target luas lahan tertentu.	sawah dan pembangunan irigasi baru, meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan irigasi yang lebih efektif.
--	--

C. Benih – Menyatukan Riset, Pengembangan, Produksi, dan Distribusi

1. Fragmentasi Kelembagaan dan Sistem Perbenihan Nasional

Fragmentasi kelembagaan dalam sistem perbenihan nasional menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Pascaintegrasi kegiatan riset dari Kementerian Pertanian (Balitbangtan) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), muncul ketidakjelasan koordinasi yang berdampak langsung pada produksi benih sumber, terutama benih penjenis. Situasi ini mengakibatkan terganggunya ketersediaan benih yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian target produksi benih nasional. Kerja sama antarlembaga yang telah dilakukan sejauh ini, seperti antara BRIN dengan produsen benih dan BUMN, masih bersifat parsial tanpa landasan regulasi yang jelas dan kuat sehingga belum optimal dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional (Suprehatin et al., 2025).

Dominasi aktor tertentu dalam produksi dan distribusi benih semakin memperburuk kondisi ini. Pasar benih nasional di Indonesia masih dikuasai oleh segelintir aktor besar seperti BUMN (PT Sang Hyang Seri dan Pertani) serta korporasi swasta, yang memiliki kendali signifikan atas input pertanian, termasuk benih, pupuk, dan pestisida. Dominasi ini

mengakibatkan petani kecil kesulitan mengakses benih berkualitas dengan harga terjangkau, sementara korporasi cenderung memprioritaskan profit jangka pendek. Ketimpangan ini juga mengurangi keanekaragaman benih lokal, yang semakin terdesak oleh varietas komersial yang belum tentu cocok dengan kondisi agroekologi setempat (Fauzan et al., 2024).

2. Sistem Zonasi Benih Berbasis Agroekosistem

Salah satu persoalan utama dalam sistem perbenihan nasional adalah kesenjangan antara inovasi varietas yang dikembangkan dengan penerimaannya di kalangan petani. Varietas unggul baru seperti padi Inpari yang memiliki potensi hasil tinggi dan ketahanan terhadap hama penyakit, tidak terserap secara optimal di tingkat petani. Beberapa penyebab utama antara lain kurangnya sosialisasi, ketidaktersediaan benih secara luas di lapangan, serta lamanya waktu proses sertifikasi dan distribusi benih. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dibutuhkan rata-rata 3–5 tahun dari pelepasan varietas baru hingga diadopsi secara luas oleh petani, yang menyebabkan inovasi teknologi perbenihan tidak mampu secara cepat merespons kebutuhan produktivitas pertanian.

Sistem zonasi benih berbasis agroekosistem merupakan solusi penting untuk mengatasi disparitas ketersediaan benih yang cocok dengan kondisi lokal. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa benih unggul yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi agroklimat setempat, sehingga meningkatkan tingkat adopsi oleh petani dan efisiensi produksi pertanian. Penerapan zonasi benih memerlukan integrasi data spasial dan informasi pertanian yang akurat agar pengelolaan dan distribusi benih dapat dilakukan secara tepat sasaran

dan tepat waktu. Misalnya, pengembangan varietas padi spesifik seperti Kuniong Ancak dan Sikampau Kampa di Provinsi Riau merupakan contoh sukses bagaimana pendekatan agroekosistem dapat diterapkan secara efektif (Suprehatin et al., 2025).

3. Peran Kelembagaan Pertanian untuk Benih Nasional

Peran kelembagaan petani melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam penyediaan benih semakin relevan untuk dikembangkan sebagai alternatif dalam menghadapi dominasi korporasi besar. Kelembagaan ini dapat memainkan peran strategis dalam produksi dan distribusi benih dengan memberdayakan petani sebagai pelaku utama dalam rantai nilai pertanian. Transformasi kelembagaan petani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), seperti pada Koperasi Pertanian, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat kapasitas lokal dan menjamin akses petani terhadap benih berkualitas. Melalui pendekatan ini, petani dapat mengurangi ketergantungan terhadap benih komersial dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan mereka (Sariati dan Hayanti, 2023).

Pemberdayaan kelembagaan korporasi petani serta BUMP memiliki potensi besar untuk memperkuat kapasitas produksi dan distribusi benih di tingkat lokal. Melalui penguatan kelembagaan ini, petani bisa berperan langsung dalam proses produksi dan distribusi benih unggul, serta mengurangi ketergantungan pada benih komersial yang mahal. Model kemitraan antara petani, pemerintah, dan sektor swasta dalam kelembagaan BUMP memungkinkan petani memiliki akses

lebih baik terhadap varietas unggul, mengontrol biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok benih.



Gambar 6. Kementerian Pertanian bangun ketahanan pangan lewat benih unggul

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024

Untuk mengatasi fragmentasi dan meningkatkan koordinasi dalam sistem perbenihan nasional, diusulkan konsep *Satu Komando Benih Nasional* yang mengintegrasikan Litbang, produksi, dan distribusi benih dalam satu kerangka koordinasi lintas kelembagaan yang melibatkan Kementerian Pertanian, BRIN, BUMN, swasta, serta kelompok petani. Melalui mekanisme ini, semua pihak beroperasi berdasarkan satu data, satu peta, dan satu sistem evaluasi benih nasional. Secara tata kelola, Kementerian Pertanian bertindak sebagai

pengarah kebijakan dan pengawas umum, BRIN dan lembaga Litbang lainnya berperan sebagai pengembang varietas unggul, sedangkan BUMN, swasta, dan BUMP bertugas sebagai pelaksana produksi dan distribusi benih. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi lintas sektor guna memastikan tersedianya benih unggul secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

D. Pupuk – Menata Ulang Tata Kelola Subsidi dan Distribusi

1. Peran Strategis Pupuk dalam Ketahanan Pangan

Pupuk merupakan salah satu faktor kunci dalam sistem pertanian modern yang berperan langsung terhadap peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, penggunaan pupuk tidak hanya menjadi komponen teknis, tetapi juga mencerminkan kapasitas negara dalam menjamin keberlanjutan produksi pangan domestik. Studi empiris menunjukkan bahwa kontribusi pupuk terhadap peningkatan hasil padi dapat mencapai 4% secara independen, namun efeknya akan lebih signifikan jika digabungkan dengan penggunaan benih unggul dan sistem irigasi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas hingga 75% secara keseluruhan (Suprehatin et al. 2025).

 **Box Discussion: PT Sang Hyang Seri dan PT Berdikari – Pilar Kelembagaan Hulu dalam Satu Komando**

Mengapa BUMN Ini Kunci dalam Sistem Pangan?:

PT Sang Hyang Seri (SHS): Sebagai anak usaha ID FOOD, SHS berperan strategis dalam produksi dan distribusi benih padi nasional. SHS mengelola proses produksi benih dari hulu ke hilir, termasuk seleksi induk, produksi, dan distribusi kepada penangkar mitra di Sukamandi serta mitra swasta lainnya.

PT Berdikari: Sebagai BUMN di sektor peternakan, Berdikari berperan dalam penyediaan bibit dan pakan ternak, serta pengembangan integrasi peternakan–pertanian. Berdikari juga aktif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan pangan berkualitas.

Tantangan Sebelum Satu Komando:

- Fragmentasi koordinasi antara SHS dan lembaga litbang seperti BRIN menyebabkan pasokan benih dasar terganggu.
- PT Berdikari bekerja tanpa sinergi spasial dengan program peternakan Kementan dan Dinas Peternakan daerah.
- Kelembagaan BUMN belum terhubung langsung dengan sistem satu data pertanian (e-RDKK, ID Pangan).
- Ketergantungan terhadap skema pengadaan daripada inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Peran Baru dalam Sistem Komando:

- Terhubung secara langsung dan real-time dengan kebutuhan daerah melalui platform digital nasional.
- Bekerja berbasis wilayah (*area-based approach*) dengan zonasi benih dan kluster peternakan.
- Bersinergi dengan BUMDes, BUMP, dan koperasi tani dalam distribusi produk mereka.
- Menjadi *off-taker* resmi dalam pengadaan benih dan bibit berbasis kontrak dengan petani produsen.

Dampak yang Diharapkan:

- Akselerasi produksi benih varietas unggul untuk swasembada padi dan jagung.
- Integrasi pakan–bibit–pasar dalam satu sistem peternakan nasional.
- Penguatan *public sector leadership* di tengah dominasi pasar swasta.
- Pengurangan waktu jeda dari produksi varietas hingga distribusi lapangan.

Sistem distribusi dan tata kelola pupuk di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan pada pupuk kimia, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi, serta kurangnya integrasi antara rantai distribusi dan kebutuhan aktual petani menjadi kendala utama. Distribusi pupuk bersubsidi yang tidak transparan dan tidak berbasis data spasial pertanian menyebabkan banyak petani tidak memperoleh akses yang adil. Hal ini diperburuk oleh dominasi korporasi besar dalam industri pupuk yang berkontribusi terhadap ketimpangan akses input pertanian antara petani besar dan kecil.

Lebih lanjut, peran pupuk dalam ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari urgensi transformasi menuju sistem pertanian berkelanjutan. Pupuk organik dan pendekatan agroekologi semakin penting untuk menjaga kesuburan tanah jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada input kimia yang bersifat eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong riset dan inovasi dalam produksi pupuk organik berbasis lokal, serta memberikan insentif kepada petani yang mengadopsi sistem pertanian ramah lingkungan. Ini tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga mendukung ketahanan ekosistem dan penghidupan petani kecil.

Dalam kerangka kelembagaan satu komando, integrasi tata kelola pupuk dengan sistem perbenihan dan irigasi menjadi prasyarat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kebijakan hulu pertanian. Pemerintah perlu merancang ulang sistem penyaluran pupuk berbasis data geospasial dan kebutuhan aktual lahan, sekaligus membangun kelembagaan distribusi yang lebih responsif dan terdesentralisasi. Jika tata kelola pupuk tidak ditangani secara sistemik dan adil, maka cita-cita ketahanan pangan nasional akan terus berada dalam ancaman,

terutama ketika petani kecil sebagai aktor utama produksi pangan tidak mendapat dukungan yang layak.

2. Tata Kelola Pupuk Subsidi di Indonesia: Kolaborasi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia

Tata kelola pupuk subsidi merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan produksi pertanian di tingkat petani kecil. Kementerian Pertanian memegang peran sentral sebagai perumus kebijakan alokasi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDCK yang disusun berdasarkan usulan dari kelompok tani (Gambar 7), sedangkan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya berperan sebagai pelaksana distribusi. Kolaborasi ini diperkuat oleh kehadiran PT Pupuk Indonesia Logistik dalam memastikan penyaluran pupuk berjalan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat volume, bahkan hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).



Gambar 7. Aplikasi e-RDKK Kementerian Pertanian
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Seiring dengan kompleksitas tantangan di lapangan, Kementan terus memperbarui mekanisme distribusi dengan memanfaatkan sistem digital. Salah satu inisiatif terbarunya adalah platform I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi), sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai data mulai dari identitas petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga lokasi geografis (Gambar 8). Melalui I-Pubers, petani yang sudah terdaftar di e-RDKK cukup membawa KTP untuk menebus pupuk di kios resmi, dan transaksi akan langsung terekam secara digital (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2024). Sistem ini tidak hanya mempercepat

proses, juga meningkatkan akurasi sasaran dan mencegah penyelewengan. I-Pubers juga terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi dan Inovasi (Simetris) milik PT Pupuk Indonesia untuk menjamin ketersediaan stok dan transparansi distribusi di setiap titik.



Gambar 8. Aplikasi I-Pubers Kementerian Pertanian
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Selain digitalisasi, pemerintah melalui Kementan dan Kemenko Perekonomian juga mengubah alur distribusi pupuk subsidi dari skema ‘push’ menjadi ‘pull’, di mana distribusi pupuk sekarang disesuaikan dengan permintaan riil dari kios atau distributor berdasarkan kebutuhan petani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024). Model ini meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi kemungkinan penumpukan pupuk di lokasi yang tidak membutuhkan. Perubahan ini juga memungkinkan PT Pupuk Indonesia menjalankan sistem *Least Cost Distribution* secara lebih fleksibel, sekaligus menjaga prinsip keadilan akses di seluruh wilayah Indonesia (Pupuk Indonesia Logistik, 2024).

PT Pupuk Indonesia dan PILOG menjalankan tanggung jawab distribusi melalui tiga jalur utama—*Port to Port*, *Port to Door*, dan *Door to Door*—dengan dukungan kapal curah, kapal angkut amoniak, serta kerja sama distribusi darat dengan berbagai perusahaan logistik. Dukungan sistem digital dan alur distribusi berbasis permintaan ini mempercepat pengiriman dan menurunkan risiko keterlambatan, terutama pada musim tanam. Dalam praktiknya, Kementan tetap berperan sebagai pengarah dan pengawas alokasi melalui *dashboard monitoring* dan audit distribusi pupuk secara berkala.

Namun, sejumlah tantangan masih mengemuka. Kelemahan dalam pembaruan data e-RDKK di beberapa daerah, terbatasnya kapasitas penyuluh, serta adaptasi kios terhadap sistem I-Pubers dan alur distribusi baru menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan (Setiawan et al. 2024). Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, dan

kelompok tani perlu diperkuat dengan pelatihan, pengawasan, serta regulasi insentif bagi kios-kios yang menjalankan sistem sesuai prosedur.

Ke depan, reformasi tata kelola pupuk subsidi harus diarahkan pada pendekatan yang lebih spasial, presisi, dan berorientasi keberlanjutan. Kementerian Pertanian perlu terus memimpin upaya integrasi data dan sistem digital seperti I-Pubers sebagai tulang punggung distribusi, serta mendorong partisipasi aktif seluruh aktor dalam ekosistem pupuk. PT Pupuk Indonesia, sebagai mitra strategis, perlu memperkuat kapasitas logistik dan transparansi rantai distribusi agar cita-cita efisiensi dan keadilan akses pupuk bagi petani benar-benar terwujud.

3. Menuju Satu Komando Pupuk Nasional

Sistem pupuk subsidi di Indonesia selama ini berada dalam kompleksitas koordinasi yang melibatkan berbagai aktor kelembagaan, mulai dari Kementan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, pemerintah daerah, hingga PT Pupuk Indonesia Holding beserta anak usahanya. Fragmentasi peran dan wewenang di antara lembaga-lembaga ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan keterlambatan respons terhadap dinamika lapangan. Oleh karena itu, urgensi untuk membangun tata kelola pupuk dalam kerangka "Satu Komando Pupuk Nasional" menjadi semakin nyata. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertanian harus berperan sebagai pengarah strategis dan integrator lintas institusi, dengan otoritas yang didukung oleh regulasi lintas sektor.

Koordinasi yang solid antara Kementan dan PT Pupuk Indonesia menjadi fondasi penting. PT Pupuk Indonesia, melalui entitas logistik

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

seperti PILOG, menjalankan peran vital dalam menyalurkan pupuk dari lini produksi hingga ke kios. Sementara itu, pemerintah daerah berperan sebagai penyambung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk validasi e-RDKK, pengawasan kios, dan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian (Gambar 9). Dalam model satu komando, semua elemen ini harus bekerja dalam satu sistem terpadu, dengan standar alur kerja dan indikator kinerja yang selaras.

SobaTani, Ayo Menanam!
Stok Pupuk Tahun 2025
AMAN

Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025

- Berdasarkan Kepmentan 644/2024, Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 sebesar **9,55 juta ton**.
- Adapun Provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional antara lain **Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatera Utara**.
- Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI dan Jaksas Agung untuk memastikan **distribusi pupuk subsidi transparan dan tepat sasaran**.

Per 1 Januari 2025 Pupuk Subsidi Siap Ditebus

- **Pupuk bersubsidi untuk tahun 2025** diprioritaskan untuk semua petani dengan standar utama mempunyai lahan dibawah 2 hektare.
- Pemerintah telah memangkas 145 aturan regulasi distribusi pupuk. Sehingga mulai **1 Januari petani yang sudah terdaftar dalam eRDKK dapat menebus pupuk subsidi dengan langsung datang ke kios pengecer atau melalui gapoktan dengan KTP atau kartu Tani**.
- **Penebusan pupuk subsidi** juga dapat diwakilkan kepada kelompok tani atau keluarga jika terkendala sakit atau berhalangan.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Gambar 9. Peran Kementerian Pertanian di dalam Alokasi Pupuk Bersubsidi
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Penggambaran sistem satu komando secara operasional. Pupuk Nasional diperlukan sebuah kerangka kerja (*framework*) tata kelola pupuk nasional yang menjelaskan (1) aktor utama (Kementan, PT Pupuk Indonesia, Pemda, kios, petani), (2) alur distribusi (produksi, logistik, pengawasan, penebusan), dan (3) sistem data yang terintegrasi (e-RDKK, Sistem Informasi Manajemen Pupuk, I-Pubers, ID-Pangan). Kerangka kerja ini akan memperjelas bagaimana setiap aktor menjalankan fungsi dalam satu sistem yang bersifat *real-time*, berbasis data, dan terhubung secara digital. Dalam konteks ini, sistem seperti I-Pubers dan *dashboard* pemantauan distribusi harus dijadikan tulang punggung untuk menyatukan berbagai silo data yang selama ini terpisah antarlembaga.

Pendekatan satu komando juga mensyaratkan reformasi kelembagaan di tingkat daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diberi mandat dan kapasitas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, termasuk pemberian sanksi terhadap kios yang tidak patuh atau distributor yang lalai. Selain itu, diperlukan insentif berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil memastikan ketepatan waktu dan sasaran distribusi. Dengan begitu, tata kelola tidak hanya terpusat di kementerian, tetapi juga berdaya secara horizontal dan partisipatif.

Rekomendasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung satu komando ini mencakup beberapa poin utama: pertama, harmonisasi regulasi antara Kementan, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian untuk mendukung fleksibilitas anggaran pupuk berbasis spasial dan musiman; kedua, penguatan sistem akuntabilitas digital yang dapat diaudit secara independen; dan ketiga, pembentukan sekretariat bersama lintas kementerian untuk tata kelola pupuk nasional. Kebijakan

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

juga perlu memberi ruang pada inovasi teknologi pupuk dan pelibatan sektor swasta lokal, terutama BUMS dan koperasi petani dalam skema distribusi alternatif.



Gambar 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk kemudahan akses pupuk subsidi petani.

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Dengan desain yang terstruktur, akuntabel, dan inklusif, model Satu Komando Pupuk Nasional bukan hanya solusi administratif, melainkan pendekatan strategis untuk menciptakan sistem input pertanian yang efisien, berdaya saing, dan berkeadilan. Implementasi model satu komando pupuk nasional dengan baik, model ini akan

mengakhiri problem kronis dalam sistem pupuk bersubsidi, dari keterlambatan, ketimpangan distribusi, hingga penyimpangan alokasi dan menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Sebagai penguatan terhadap arah kebijakan Satu Komando Pupuk Nasional, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi menjadi tonggak penting dalam menyederhanakan dan mengefisienkan sistem distribusi pupuk subsidi di Indonesia. Perpres ini menggantikan lebih dari 140 regulasi yang sebelumnya tumpang tindih, dan secara resmi menetapkan prinsip 7T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima) sebagai standar nasional dalam penyaluran pupuk.

Dalam skema baru ini, Kementerian Pertanian berperan sebagai komando pengarah teknis nasional, bertanggung jawab menyusun alokasi, menetapkan rencana kebutuhan berdasarkan e-RDKK, serta mengawasi ketepatan sasaran berbasis sistem iPubers. Penyaluran kini diarahkan langsung dari BUMN pupuk ke titik serah, seperti Gapoktan, koperasi, dan pengecer resmi, di bawah koordinasi sistem logistik PT Pupuk Indonesia. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas nasional dalam sistem pupuk, sejalan dengan integrasi kelembagaan berbasis data dan digitalisasi yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian.

E. Program KUR sebagai Solusi Permodalan Petani

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dasar hukum pelaksanaan KUR adalah melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Tujuan dari KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif dan layak namun belum memenuhi syarat perbankan. Pembiayaan KUR disalurkan dalam bentuk dana modal kerja dan investasi. KUR menawarkan bunga yang lebih rendah daripada pinjaman komersial. Pinjaman KUR dijamin oleh perusahaan penjaminan, sehingga mengurangi risiko bagi bank penyalur. KUR disalurkan melalui lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pinjaman KUR memiliki plafon maksimal, yaitu Rp500 juta. Target penerima manfaat KUR adalah UMKM yang

produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Jenis-jenis KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.

Saat ini KUR Himbara (Himpunan Bank Negara) mendukung swasembada pangan dengan mengalokasikan dana besar untuk KUR dan kredit usaha alsintan (KUA), yang diperuntukkan bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Ini membantu meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Kredit ini ditujukan untuk petani dan pelaku usaha pertanian dalam rangka membantu petani mendapatkan modal kerja untuk kegiatan pertanian, seperti membeli benih, pupuk, dan peralatan pertanian, serta mendukung produksi pangan.

Dukungan ini penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Melalui peningkatan produktivitas dan ketersediaan pangan dalam negeri, swasembada pangan dapat dicapai dengan cara berikut ini.

1. Penyaluran KUR dan KUA oleh Himbara akan membantu petani mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
2. Dukungan tersebut dapat meningkatkan produksi hasil panen petani dan berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan.
3. Pencapaian swasembada pangan akan membuat Indonesia lebih mandiri dalam hal pangan dan tidak lagi terlalu bergantung pada impor.

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan



Gambar 11. Menteri Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman (kanan) dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kiri)

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023

Kementan Pastikan Himbara Sediakan Rp300 triliun KUR untuk Pertanian

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian nasional. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan alokasi dana sebesar Rp300 triliun dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian.

Dana tersebut akan memberikan akses kredit bagi petani dan pengusaha, termasuk untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) serta Rice Milling Unit (RMU).

Sebanyak tiga persen dari dana KUR ini dialokasikan untuk alsintan, termasuk RMU. Bagi petani, tersedia pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan,” ujar Amran melalui keterangannya, Sabtu (4/1/2025). Salah satu fokus utama dari dana KUR ini adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses teknologi modern seperti alsintan. Teknologi ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tengah upaya mempercepat swasembada pangan.

F. Skema Kelembagaan Hulu yang Terintegrasi

Upaya membangun ketahanan pangan nasional tidak akan berhasil tanpa restrukturisasi menyeluruh terhadap kelembagaan hulu yang selama ini masih bersifat sektoral, terfragmentasi, dan tumpang tindih. Irigasi, benih, dan pupuk bukanlah komponen teknis yang dapat ditangani secara parsial, melainkan satu ekosistem input yang harus dikelola dalam satu sistem kelembagaan yang terintegrasi dan terkomando. Kementerian Pertanian sebagai *leading sector* memegang peranan penting sebagai institusi pengarah dan penghubung antaraktor pusat dan daerah, antara lembaga litbang dan distribusi, antara data spasial dan logistik pertanian.

Kelembagaan hulu saat ini menunjukkan tiga pola masalah. *Pertama*, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan anggaran (misalnya pada rehabilitasi irigasi atau pengadaan pupuk). *Kedua*, keterputusan antara inovasi dan penerapan (seperti dalam sistem benih unggul). *Ketiga*, minimnya interoperabilitas data antar sistem digital (seperti: e-RDKK, Sistem Informasi Manajemen Pupuk, dan iPubers). Dalam konteks ini, “Satu Komando” bukanlah sekadar slogan, melainkan strategi tata kelola terpadu untuk memperkuat efektivitas kebijakan hulu melalui mekanisme yang terstandardisasi, terbuka, dan adaptif.

Integrasi kelembagaan harus dirancang dalam bentuk platform kolaboratif nasional, di mana seluruh intervensi hulu dapat ditangani berdasarkan satu data dan satu peta. Kerangka kerja tata kelola dalam platform kolaboratif nasional dapat menggambarkan secara eksplisit: (1) siapa pengarah, pelaksana, dan pengawas di setiap rantai nilai; (2) bagaimana alur keputusan dan distribusi berjalan dari pusat ke desa; dan

(3) bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dapat dijalankan secara *real time* oleh Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia, BRIN, BUMN penyedia benih (ID-Food), dan pemerintah daerah. Kerangka kerja platform kolaboratif nasional dapat menciptakan kesetaraan pemahaman dan tanggung jawab bersama di seluruh jenjang birokrasi.

Selain aspek struktural, kelembagaan hulu juga perlu memperkuat basis lokal melalui pemberdayaan kelembagaan petani. Peran BUMP (Badan Usaha Milik Petani), Kelembagaan Ekonomi Petani, dan koperasi harus dimasukkan secara sistematis ke dalam skema satu komando, terutama dalam produksi dan distribusi benih serta pupuk organik. Dengan ini, kemandirian lokal didorong tanpa mengorbankan kesinambungan logistik nasional. Model ini memungkinkan penguatan ekonomi desa sekaligus dan meningkatkan kemandirian petani di dalam mendapatkan input pertanian yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian dengan aktif mendorong penguatan regulasi lintas kementerian untuk menghindari ketidaksinkronan. Salah satu bentuk peran aktif Kementan adalah harmonisasi regulasi subsidi pupuk antara Kemenkeu dan Kementan, atau integrasi antara BRIN dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dalam penyusunan varietas unggul. Diperlukan pula sistem insentif berbasis kinerja kelembagaan untuk mendorong daerah dan kelompok tani menjalankan peran aktif dalam sistem input nasional. Mengacu pada seluruh langkah di atas, skema kelembagaan hulu yang terintegrasi akan menjadi pilar utama dalam desain besar Satu Komando Pertanian Pangan Nasional. Ini bukan sekadar perubahan teknokratik, melainkan transformasi paradigma

pembangunan pertanian berbasis sistem, keadilan akses, dan efektivitas lintas sektor.

Box Discussion: Kerangka Tata Kelola Hulu Terintegrasi

Apa Itu Tata Kelola Hulu Terintegrasi?

Tata kelola hulu yang terintegrasi merupakan kerangka institusional yang mengatur koordinasi antara seluruh aktor kunci dalam penyediaan irigasi, benih, dan pupuk secara terpadu. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh input produksi pertanian tersedia tepat waktu, berbasis wilayah, dan sesuai kebutuhan petani melalui satu sistem komando. Pendekatan ini menjawab tantangan klasik berupa fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksesuaian pasokan dengan kalender tanam.

Struktur Kelembagaan dan Peran Utama

Manfaat Sistem Terintegrasi

- Meningkatkan presisi distribusi input produksi (benih, pupuk, air)
- Mencegah tumpang tindih program dan anggaran
- Mempercepat respon terhadap perubahan iklim dan ancaman krisis pangan
- Membangun sistem pertanian berbasis wilayah dan data

Prinsip Tata Kelola

- Satu Data → sistem digital komando kebutuhan hulu
- Satu Peta → spasialisasi zonasi tanam dan alokasi distribusi
- Satu Evaluasi → pemantauan berbasis dashboard dan umpan balik dari daerah

BAB 3

PROGRAM SATU KOMANDO DI KELEMBAGAAN PRODUKSI

Keberhasilan swasembada pangan nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, juga sangat ditentukan oleh efektivitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi produksi secara terkoordinasi. Selama ini, kelembagaan sektor pertanian di Indonesia masih berjalan dalam sistem yang terfragmentasi, di mana peran institusi hulu, produksi, dan hilir tidak sepenuhnya terintegrasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banyak inefisiensi, tumpang tindih kebijakan, dan lemahnya daya kendali terhadap program strategis nasional. Oleh karena itu, pembentukan sistem satu komando pada kelembagaan produksi menjadi langkah fundamental dalam membangun tata kelola yang efektif, adaptif, dan berdaya ungkit tinggi terhadap ketahanan pangan.

Bab ini akan mengulas secara sistematis bagaimana transformasi kelembagaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Kementerian Pertanian, penguatan fungsi penyuluh sebagai penggerak lini lapangan, dan dukungan dari unsur TNI-Polri sebagai pengawal program. Melalui pendekatan komando terpadu, berbagai program strategis seperti cetak sawah, optimasi lahan, modernisasi alat mesin pertanian, dan penguatan pascapanen dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, sehingga

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terhubung secara menyeluruh dari pusat hingga desa.

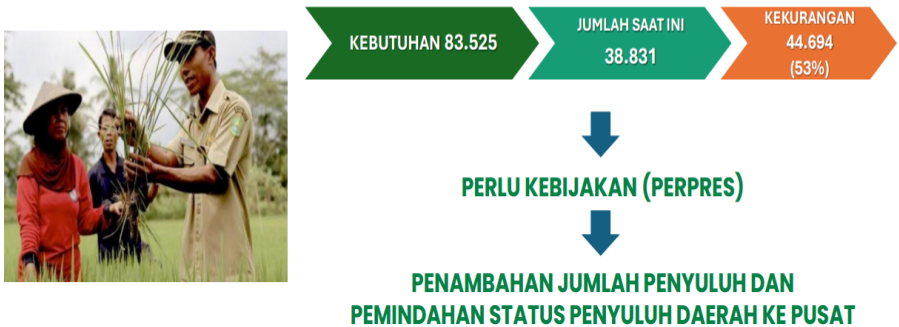
Satu komando di kelembagaan produksi bukan hanya sebuah sistem kendali, juga merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan kapasitas negara, kekuatan sosial di akar rumput, serta dukungan keamanan dan logistik secara terpadu. Di tengah tantangan krisis pangan global dan disrupsi iklim, Indonesia memerlukan kelembagaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjaga kedaulatan pangan. Bab ini menjadi ruang untuk menguraikan bagaimana struktur kelembagaan pertanian yang baru dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui integrasi yang kuat, berbasis data, dan berorientasi hasil.

A. Transformasi Peran Penyuluh Pertanian

1. Kebutuhan Penyuluh dan Kesenjangan SDM

Penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pertanian nasional dan praktik nyata di lapangan. Mereka bertugas mendampingi petani dalam proses budi daya, penggunaan teknologi, manajemen usaha tani, hingga distribusi hasil panen. Namun sayangnya, Indonesia masih mengalami defisit besar dalam jumlah penyuluh aktif. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan nasional penyuluh mencapai 83.525 orang, sementara jumlah penyuluh yang tersedia hanya sekitar 38.831 (Gambar 12). Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar 44.694 orang, atau sekitar 53% dari kebutuhan ideal. Ketimpangan ini sangat berdampak terhadap jangkauan pelayanan dan kualitas pendampingan petani, terutama di daerah terpencil dan kawasan sentra produksi baru.

PENGUATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN

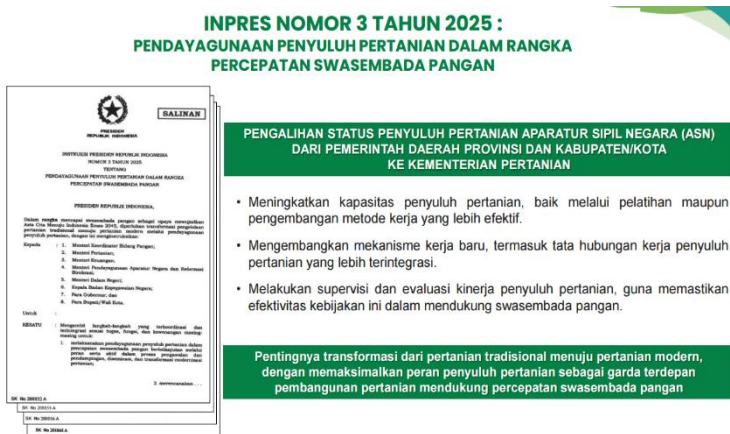


Gambar 12. Tenaga penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan saat ini jumlahnya masih jauh dari kebutuhan
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023

Kekurangan tenaga penyuluh ini menyebabkan banyak program strategis di tingkat lapangan tidak terlaksana secara optimal. Ketidakhadiran penyuluh di sejumlah desa membuat transfer teknologi menjadi lambat, pemahaman petani terhadap inovasi pertanian terbatas, dan seringkali berujung pada rendahnya produktivitas. Selain itu, penyuluh yang ada pun kerap dibebani dengan cakupan wilayah yang terlalu luas sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pembinaan secara intensif. Untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan, penyediaan dan pemerataan tenaga penyuluh menjadi prasyarat mutlak. Hal ini juga berkaitan erat dengan regenerasi SDM pertanian dan penguatan kapasitas kelembagaan petani di akar rumput.

2. Reposisi Status Penyuluh: dari Daerah ke Pusat

Salah satu hambatan utama dalam sistem penyuluhan selama ini adalah status kelembagaan penyuluh yang berada di bawah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Situasi ini menimbulkan kesenjangan dalam pembinaan karier, pelatihan, dan pengawasan kinerja karena penyuluh tidak berada dalam satu sistem komando dengan Kementerian Pertanian. Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya pendayagunaan penyuluh pertanian sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan (Gambar 13). Inpres tersebut menegaskan urgensi pengalihan status penyuluh menjadi ASN pusat di bawah koordinasi langsung Kementan. Langkah ini diambil untuk menyatukan garis koordinasi, memperkuat sistem pelatihan, dan menciptakan standar nasional dalam penyelenggaraan penyuluhan.



Gambar 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan urgensi pengalihan status penyuluh guna percepatan swasembada pangan. Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Reposisi ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan perombakan sistemik terhadap fungsi dan peran penyuluh. Dengan berada langsung di bawah pusat, penyuluh akan memperoleh akses lebih luas terhadap fasilitas peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan berbasis teknologi, sertifikasi kompetensi, dan sistem insentif berbasis kinerja. Selain itu, status pusat memungkinkan proses evaluasi kinerja menjadi lebih objektif dan berbasis data. Melalui langkah ini, diharapkan penyuluh tidak hanya menjadi penyampai informasi, juga menjadi fasilitator, pelatih, dan motivator yang mampu mengarahkan petani dalam mengelola usaha tani modern secara mandiri dan profesional.

3. Integrasi Tata Kerja dan Komando Lapangan

Dalam kerangka Satu Komando, integrasi tata kerja menjadi kunci agar seluruh elemen pembangunan pertanian berjalan serentak dan sinkron. Penyuluh pertanian yang sebelumnya bekerja dengan skema administratif daerah, kini diarahkan untuk masuk dalam sistem kendali lapangan yang lebih terpusat dan responsif. Dengan jalur koordinasi tunggal melalui Kementerian Pertanian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, distribusi informasi lebih merata, dan kontrol terhadap pelaksanaan program menjadi lebih ketat. Model ini juga mendukung sistem pelaporan berbasis teknologi yang dapat dilacak secara *real time*, menjadikan proses supervisi dan evaluasi kinerja penyuluh lebih efisien dan akuntabel.

Lebih jauh, integrasi ini menempatkan penyuluh sebagai komandan teknis di tingkat desa yang bekerja secara sinergis dengan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri). Kolaborasi ini membentuk poros penggerak utama dalam pelaksanaan program cetak sawah,

distribusi benih dan pupuk bersubsidi, serta pengendalian harga pangan. Penyuluh menjadi penghubung antara sistem produksi dan sistem pengamanan sosial, menjadikan mereka sebagai tokoh kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan peran yang semakin kompleks dan strategis, penyuluh pertanian di era *Satu Komando* dituntut untuk memiliki kompetensi multidimensi, bukan hanya di bidang teknis, tetapi juga dalam komunikasi, manajemen sosial, dan kepemimpinan lokal.

B. Revitalisasi Pengelolaan Lahan, Irigasi, Alat Mesin Pertanian dan Hilirisasi Pertanian

1. Program Cetak Lahan Sawah

Program Cetak Sawah merupakan salah satu upaya strategis yang dijalankan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan nasional (Gambar 14). Dalam visi besar ini, pencetakan sawah tidak hanya dipandang sebagai penambahan areal tanam, tetapi juga sebagai infrastruktur ketahanan pangan jangka panjang. Pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektare, yang terbagi menjadi lahan baru sekitar 500 ribu hektare, optimalisasi lahan (oplah) 851 ribu hektare, dan normalisasi lahan *existing* sekitar 1 juta hektare (Febrinastri, 2024). Target ini disusun berdasarkan pemetaan nasional yang mempertimbangkan potensi lahan rawa, lahan tidur, dan kawasan transmigrasi, serta dipadukan dengan penguatan kelembagaan desa melalui klaster pertanian modern (Yani, 2024).



Gambar 14. Rapat koordinasi cetak lahan sawah
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024

Perlu ditekankan bahwa keberhasilan cetak sawah tidak cukup hanya dengan membuka lahan baru. Ketersediaan lahan baru tersebut harus didukung dengan ketersediaan air yang stabil dan sistem irigasi yang efektif. Oleh karena itu, Kementan menjalin kerja sama erat dengan Kementerian PU dan TNI untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur irigasi yang mampu mendukung penanaman tiga kali dalam setahun. Kementerian PU berkomitmen memastikan pasokan air melalui pembangunan pintu air, sumur dangkal dan dalam, dam parit, embung, dan sistem pipanisasi (Febrinastri F., 2024; Triono S., 2024). Sementara itu, Kementan memastikan ketersediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alsintan. Kolaborasi ini dituangkan dalam

berbagai perjanjian strategis lintas kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi wilayah kerja, *refocusing* anggaran, dan pembentukan tim gabungan untuk efektivitas ketercapaian program (Kiki, 2025).

Keterlibatan TNI juga menjadi penggerak lapangan yang sangat krusial. Melalui kesepakatan dengan Kementan, TNI berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah, mulai dari pengawalan, pendampingan teknis, hingga pelibatan Babinsa sebagai penghubung antara petani dan pemerintah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, TNI bersama pemerintah daerah dan Kejaksaan membentuk posko pendampingan dan pengawasan hukum untuk memastikan proyek cetak sawah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Proyek di Dadahup, Kapuas, yang mencakup 75.000 hektare, ditargetkan bisa menghasilkan 2 juta ton gabah per tahun jika berhasil panen tiga kali (Simorangkir, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa strategi cetak sawah terintegrasi bukan hanya mungkin, tetapi juga menjanjikan kontribusi nyata terhadap produksi nasional.

Keseluruhan upaya ini menggambarkan bahwa cetak sawah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan sebuah gerakan nasional berbasis sinergi. Dengan pendekatan satu komando yang melibatkan Kementan, Kemen PU, TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Indonesia memiliki peluang besar untuk membalikkan ketergantungan pada impor dan membangun sistem pangan yang berdaulat. Kementan telah menyatakan bahwa keberhasilan cetak sawah baru sangat bergantung pada kemampuan seluruh aktor untuk bekerja pada peta yang sama, dengan satu strategi besar dan koordinasi yang terpadu dari hulu ke hilir (Kiki, 2025).

2. Optimasi Lahan Suboptimal

Program Optimasi Lahan suboptimal (Oplah) merupakan salah satu prioritas strategi Kementan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan rawa dan tadah hujan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Target utama mencakup optimalisasi lebih dari dua juta hektare lahan, masing-masing satu juta hektare lahan rawa dan satu juta hektare lahan tadah hujan, dengan tujuan meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun (Febrinastri, 2024; Yani, 2024). Optimalisasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, menurunkan ketergantungan terhadap impor, serta memperluas produksi pangan nasional terutama di daerah luar pulau Jawa.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui model kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dengan pendekatan satu komando produksi. Kementan bertanggung jawab atas penyediaan sarana produksi, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil peran dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi melalui sistem embung, pintu air, sumur dangkal dan dalam, serta pompanisasi (Prakosa, 2024; Nikson, 2024). Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung pendampingan lapangan secara aktif hingga ke tingkat tapak sebagai pelaksana percepatan dan penjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan (Prakosa, 2024; Rakhmi, 2024).

Sebagai bentuk konkret, pelaksanaan program Oplah telah dimulai di berbagai wilayah prioritas (Gambar 15). Di Kalimantan

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

Tengah, program mencakup optimalisasi lahan seluas 75.000 hektare, dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi melalui Posko Pendampingan, Pengawasan, dan Pencegahan Hukum (P3H) (Palopopos, 2025). Di Aceh, kerja sama antara Kementerian Pertanian, TNI, dan pemerintah daerah telah mengaktifkan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk budi daya padi dan jagung, serta mendistribusikan bantuan sarana produksi pertanian senilai lebih dari Rp170 miliar (Prakosa, 2024). Keterlibatan berbagai aktor ini memperkuat prinsip kolaborasi berbasis wilayah dan mempercepat pencapaian target produksi nasional.

Program optimasi lahan juga dikembangkan sebagai bentuk mitigasi terhadap krisis pangan global. Saat berkoordinasi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati bahwa pertanian dan pertahanan pangan merupakan pilar utama pertahanan nasional (Digital, 2024). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian diminta untuk mengawal implementasi Oplah di masing-masing wilayah, mempercepat perluasan tanam, serta memastikan kesiapan sarana irigasi dan distribusi input pertanian secara merata dan tepat waktu (Fuady, 2025).



Gambar 15. Kementerian Pertanian meninjau proyek optimasi lahan di Kalimantan Tengah.

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023

Melalui pendekatan kelembagaan yang terintegrasi, penguatan sinergi lintas sektor, dan pendampingan berlapis dari pusat hingga desa, program Optimalisasi Lahan Suboptimal diarahkan tidak hanya sebagai agenda teknis peningkatan produksi, juga sebagai strategi ketahanan nasional. Upaya ini menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan bentuk konkret dari kemandirian bangsa, dan pertanian menjadi fondasi utama untuk tercapainya swasembada pangan Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

3. Modernisasi Alat Mesin Pertanian

Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan komponen kunci dalam transformasi sistem pertanian tradisional menuju sistem

pertanian modern dan berdaya saing. Kementerian Pertanian menetapkan agenda ini sebagai prioritas nasional dalam mendukung percepatan swasembada pangan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, menekan kehilangan hasil (*losses*), dan mempercepat proses tanam hingga panen (Gambar 16). Sejalan dengan arah kebijakan Presiden, distribusi alsintan dilakukan secara masif untuk mendukung klaster pertanian modern di berbagai daerah. Jenis alsintan yang disiapkan, meliputi traktor roda dua dan empat, *rice transplanter*, pompa air, *dryer*, dan *combine harvester* (Timex, 2025).



Gambar 16. Menteri Pertanian memantau uji alat mesin pertanian untuk produksi massal

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024

Distribusi alsintan tidak dilakukan secara parsial, melainkan dalam bentuk paket komprehensif berdasarkan kebutuhan kawasan produksi dan karakteristik lahan. Untuk klaster pertanian modern dan kawasan transmigrasi, Kementan menyiapkan satu paket alsintan senilai rata-rata Rp3 miliar untuk setiap kelompok pengelola. Paket tersebut mencakup seluruh tahap produksi, mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen. Selain mendistribusikan alsintan, Kementan juga memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan penyediaan lahan, perumahan, dan tenaga kerja produktif dalam mendukung sistem pertanian berbasis teknologi (Timex 2025).

Kementan juga menjalin kerja sama dengan Polri dan TNI dalam pendistribusian alsintan sekaligus pengawalan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks peningkatan produksi jagung, Kementan menyalurkan *hand tractor* dan alat tanam ke daerah-daerah dengan potensi jagung nasional, serta mengintegrasikan pendampingan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa di tingkat desa (Pamungkas, 2024; Triono, 2024a). Strategi ini menjamin kehadiran negara di tingkat tapak, meminimalkan penyalahgunaan alsintan, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

Di samping distribusi, Kementerian Pertanian juga menekankan pentingnya manajemen logistik dan sistem pelatihan operator alsintan. Kementan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyiapkan 300–500 instruktur mekanik bersertifikasi untuk ditugaskan di lima provinsi prioritas, yaitu Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pelatihan ini menasar lebih dari 27.000 petani muda yang akan dibekali

keterampilan mengoperasikan dan merawat alsintan sehingga mendukung efisiensi dan kemandirian teknologi pertanian di lapangan (Timex, 2025).

Modernisasi alsintan juga terintegrasi dengan penguatan kapasitas riset dan teknologi. Dalam kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementan mendorong pengembangan inovasi alat pertanian buatan dalam negeri yang lebih efisien, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi alumni seperti Himpuni, Kementan mendorong hilirisasi riset ke dalam bentuk alsintan yang siap digunakan petani, termasuk teknologi mekanisasi panen dan tanam yang menyaingi negara-negara maju (Sihombing, 2024).

Keberhasilan program modernisasi alsintan akan memperkuat transformasi kluster pertanian tradisional menjadi modern yang berbasis teknologi, manajemen kelompok, dan daya saing pasar. Program ini juga dirancang untuk menciptakan episentrum ekonomi baru di perdesaan, di mana produktivitas tinggi dan efisiensi kerja akan menghasilkan pendapatan yang layak bagi petani. Pemerintah menargetkan agar melalui sistem ini, pendapatan petani dapat meningkat minimal Rp10 juta per bulan per kelompok aktif yang tergabung dalam Brigade Pangan atau sistem kluster lainnya (Kementerian Pertanian, 2024). Dengan model distribusi terukur, sistem pelatihan yang terstruktur, dan sinergi lintas lembaga yang solid, program modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan dan memperkuat kemandirian sistem pertanian nasional. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi dalam menciptakan generasi petani muda yang mampu

mengikuti perkembangan teknologi, kompeten secara profesional, dan siap mengelola pertanian Indonesia di era digital dan ketahanan pangan global.

4. Penguatan Pascapanen dan Hilirisasi

Penguatan pascapanen dan hilirisasi merupakan langkah strategis dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha pangan. Pemerintah menempatkan sektor ini sebagai penghubung antara peningkatan produksi di hulu dengan stabilisasi pasokan dan harga di hilir. Untuk itu, pembangunan dan penguatan infrastruktur pascapanen seperti *Rice Milling Unit* (RMU), silo, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengering (*dryer*) menjadi penting untuk dapat diwujudkan di daerah. Selain itu, pemanfaatan platform *e-commerce* dan digitalisasi rantai pasok turut diperluas untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi distribusi pangan nasional (Yani, 2024; Redaksi, 2025).

Dalam memperkuat tata kelola hilir, pemerintah mendorong keterlibatan aktif BUMN pangan seperti Perum BULOG, ID Food, PTPN, PT RNI, PT Berdikari, dan PT PPI. Peran mereka tidak hanya sebagai penyerap hasil panen petani, tetapi juga sebagai stabilisator harga dan pelaksana logistik pangan nasional. BULOG, misalnya, secara khusus diberi mandat untuk menyerap gabah dan jagung petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) agar semangat produksi tidak terganggu oleh ketidakpastian pasar (Radarsuara, 2025). Selain itu, ID Food dan BUMN pangan lainnya turut menjadi motor penggerak distribusi pangan melalui operasi pasar dan kanal daring yang terintegrasi (Palopopos, 2025a).

Sebagai solusi jangka panjang untuk stabilisasi harga dan efisiensi rantai distribusi, pemerintah meluncurkan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih. Gagasan ini bertujuan memangkas rantai pasok dari delapan mata rantai menjadi hanya tiga, yaitu petani, koperasi, dan konsumen. Melalui pendekatan ini, harga pangan di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau, sementara pendapatan petani tetap terjaga. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki satu koperasi, yang juga akan difungsikan sebagai lembaga pengelola stok dan distribusi pascapanen (Ramadani, 2025; Harianto, 2025).

Upaya hilirisasi juga ditopang oleh kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri. Penandatanganan MoU antara Kementerian Pertanian dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam integrasi hulu-hilir (Gambar 17). Kolaborasi ini mencakup pengembangan komoditas ekspor, pendampingan investasi hilirisasi, serta transformasi digital pertanian. Kementan juga memfasilitasi kerja sama dengan KADIN untuk mempercepat koordinasi program swasembada pangan berkelanjutan (Redaksi, 2025).



Gambar 17. Penandatanganan MoU antara Kementerian Pertanian dan Kamar Dagang Indonesia untuk mempercepat koordinasi program swasembada pangan berkelanjutan

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

Dalam dimensi sosial dan kewilayahan, penguatan hilirisasi juga berperan dalam menciptakan kluster ekonomi baru di desa, terutama pada kawasan transmigrasi dan sentra produksi. Dengan adanya fasilitas pascapanen dan integrasi kelembagaan koperasi desa, desa-desa kini tidak hanya menjadi pusat produksi primer, juga bagian dari sistem logistik dan perdagangan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Sadli, 2025; Ramadani, 2025).

Melalui strategi penguatan pascapanen dan hilirisasi yang melibatkan pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat desa, pemerintah menargetkan terciptanya sistem

pangan nasional yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, juga menciptakan nilai tambah yang adil bagi seluruh pelaku dalam ekosistem pangan Indonesia.

C. Integrasi Program Kementerian Pertanian dan Pengawasan TNI–Polri

1. Sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas

Sinergi antara Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi salah satu pilar kunci dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan berbasis desa. Dalam sistem satu komando pertanian nasional, kedua aktor keamanan ini tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai mitra kerja langsung penyuluh pertanian dan petani. Mereka terlibat aktif dalam menyosialisasikan kebijakan, menjamin ketertiban distribusi sarana produksi, serta mengawal pelaksanaan teknis program pertanian dari hulu ke hilir (Triono, 2024a; Dimas, 2025).

Dalam fungsinya, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terintegrasi dalam sistem pengawalan distribusi bantuan pemerintah, seperti benih, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Kolaborasi ini mengisi celah pengawasan yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan di tingkat desa, khususnya dalam konteks penyaluran logistik dan bantuan pertanian. Mereka juga memberikan pendampingan kepada kelompok tani dalam memahami prosedur penerimaan bantuan dan mekanisme pelaporan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan (Pamungkas, 2024; Dimas, 2025).

 **Box Discussion: Cetak Sawah, Optimasi Lahan, dan Hilirisasi Produksi – Menyusun Rantai Nilai Produksi Pangan Nasional**

 **Latar Belakang**

Dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian telah mengarahkan strategi produksi melalui tiga pilar utama:


- Cetak Sawah Baru: pembukaan lahan produktif baru di wilayah strategis.
- Optimasi Lahan Eksisting: intensifikasi lahan suboptimal (rawa, tadah hujan) agar mampu ditanami lebih dari sekali.
- Modernisasi Produksi melalui Alsintan & Hilirisasi: penyediaan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi, serta penguatan pascapanen dan koneksi ke pasar.

Pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh kelembagaan lintas sektor, peran TNI di lapangan, dan pendampingan teknis melalui penyuluh.

 **Peran Kelembagaan dalam Produksi Berbasis Komando**

 **Studi Praktik Baik**

- Di Barito Kuala (Kalsel) dan Pulang Pisau (Kalteng), program optimasi lahan rawa meningkatkan indeks penanaman dari IP1 ke IP2 dan IP3.
- Di Kalimantan Utara, cetak sawah terintegrasi dengan penggilingan mini dan program pengadaan beras oleh BUMDes.
- Di Sragen dan Lamongan, penggunaan traktor roda dua dan combine harvester menurunkan biaya panen hingga 30%.

 **Katalis Hilirisasi: Alsintan dan Pengolahan Pascapanen**

- Bantuan Alsintan (pra dan pascapanen) mempersingkat waktu kerja dan mengurangi kehilangan hasil panen (*losses*).
- Unit pengolahan hasil (UPH), penggilingan modern, dan rumah kemasan diintegrasikan dengan koperasi dan BUMP.
- Digitalisasi dalam manajemen logistik hasil panen mendorong efisiensi dan transparansi rantai distribusi.

 **Tantangan Strategis**

- Keberlanjutan lahan cetak tanpa kelembagaan lokal sering menurun produktivitasnya.
- Distribusi alsintan kadang tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan spesifik wilayah.
- Hilirisasi tanpa pasar berisiko overproduksi atau stagnasi gudang.

 **Catatan Penutup**

Keberhasilan cetak sawah dan optimasi lahan harus dibaca sebagai bagian dari sistem produksi pangan yang utuh, dari hulu ke hilir. Kementerian Pertanian menjalankan peran penting sebagai pengarah strategis dan penyedia infrastruktur produksi, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada sinergi antara penyuluh, pelaku ekonomi lokal, dan tata kelola berbasis wilayah.

Monitoring terhadap penyaluran sarana produksi dilakukan secara langsung melalui pendekatan lapangan, termasuk inspeksi mendadak terhadap kios pupuk dan pengawasan alsintan yang dipinjamkan kepada kelompok tani. Mekanisme ini diperkuat oleh pelibatan lintas sektor yang mencakup dinas pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian lapangan, dan Satgas Pangan di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, peran aktif aparat keamanan telah berhasil menekan potensi konflik lokal dan mempercepat proses distribusi di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau (Koranbanjar, 2023; Harianto, 2025).

Efektivitas sinergi ini juga diperkuat oleh kedekatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan struktur sosial desa. Sebagai figur yang dipercaya masyarakat, mereka mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Dukungan moral dan logistik yang mereka berikan menciptakan rasa aman dan kepastian bagi petani dalam mengakses bantuan pemerintah. Hal ini memperkuat semangat gotong royong dalam pelaksanaan swasembada pangan sebagai agenda bersama antara negara dan rakyat.

2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Wilayah

Implementasi program swasembada pangan nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi lintas lembaga dan wilayah. Dalam sistem satu komando yang dibangun oleh Kementerian Pertanian, TNI dan Polri diinstruksikan untuk terlibat aktif sebagai pengawal sekaligus akselerator pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional (Gambar 18). Keterlibatan mereka mencakup wilayah komando teritorial dan struktur kepolisian dari pusat hingga tingkat

desa, yang memungkinkan pengendalian lapangan lebih efektif dan konsisten (Koranbanjar, 2023).

TNI dan Polri, sebagai aktor negara yang memiliki struktur vertikal dan kemampuan logistik yang kuat dapat memainkan peran penting dalam menjamin kesinambungan antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah. Dalam skema ini, distribusi sarana produksi, pelaksanaan cetak sawah, program optimasi lahan, serta kegiatan tanam serentak dikoordinasikan melalui forum lintas instansi yang melibatkan Kementan, pemda, dan satuan komando wilayah. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen untuk menghindari ego sektoral dalam pelaksanaan program strategis nasional (Dimas, 2025; Rakhmi, 2024).

Studi kasus pelaksanaan program cetak sawah di Kalimantan Tengah menjadi bukti nyata efektivitas koordinasi lintas lembaga. Di sana, pengawasan dilakukan secara terintegrasi antara Kementan, TNI AD, Kejaksaan Tinggi, dan pemerintah daerah. Program cetak sawah seluas 75.000 hektare dijalankan dengan sistem pengawasan berlapis dan sistem pelaporan terstruktur. Dalam program tersebut, TNI membantu pengelolaan lapangan, sedangkan Kejaksaan memberikan pendampingan hukum dan akuntabilitas anggaran menjadikan kawasan tersebut sebagai contoh eksekusi program satu komando yang kredibel dan berhasil (Koranbanjar, 2023; Dimas, 2025).

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan



Gambar 18. Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan TNI AD menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan memerlukan koordinasi lintas lembaga


Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024

Koordinasi ini juga mencakup pelatihan bersama, pemetaan risiko, dan sinkronisasi agenda tahunan antarinstansi. Pemerintah telah menginisiasi penguatan sinergi melalui rakor nasional, nota kesepahaman (MoU), dan pengintegrasian sistem informasi. Berdasarkan pada pola ini, kebijakan pangan nasional tidak lagi bersifat sektoral, melainkan dijalankan dalam satu ekosistem yang terhubung mulai dari pengambilan keputusan hingga operasional teknis di lapangan.

Program Satu Komando di Kelembagaan Produksi

2

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 040 / III / 2025

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Pengawasan Pegawai Kegiatan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat serta Satgas Luas Tambah Tanam (LTT) Swasembada Pangan Kementerian Pertanian RI, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Nota Kesepakatan Kementerian Pertanian dan TNI Nomor 04/MoLHK.230M/12/2023 Nomor NK/300/2023/TNI tanggal 4 Desember 2023 tentang Dukungan pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/793/01/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Angkatan Darat;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/01/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Angkatan Darat;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI dengan TNI AD Nomor Kema/1111/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Dukungan pelaksanaan Program Tanaman Pangan;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian RI dengan TNI AD Nomor Kema/1010/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI dengan TNI AD Nomor Kema/1210/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI.

8. Surat Perintah Kasad Nomor Spriv/4665/01/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pegawai Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui Optimasi Lahan Rawan Kementerian Pertanian RI TA 2024 di 12 Provinsi dan 85 Kabupaten/Kota;

9. Surat Perintah Kasad Nomor Spriv/5436/01/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Pengawasan Pegawai Kegiatan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI;

10. Nota Dinas Aspers Kasad Nomor BND-225/01/2025/Spesad tanggal 7 Maret 2025 tentang Saran dan Tanggapan Rencana Pengawasan sebagai Pemirsa Pegawai Kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat Kementan RI; dan

11. Perimbangan Staf Umum Angkatan Darat.


DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan seperti tercantum dalam Surat Perintah ini.

Untuk : 1. Seterusnya Surat Perintah ini di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, diberhentikan dari dan tugas tanggung jawab jabatan pengawasan lama seperti tercantum pada kolom 7 dan ditempatkan dalam jabatan pengawasan baru seperti tercantum pada kolom 8, sebagai Pegawai Kegiatan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat serta Satgas Luas Tambah Tanam (LTT) Swasembada Pangan Kementerian Pertanian RI.
2. Melaporkan kepada Kasad u.p. Aster atas pelaksanaan Perintah ini.
3. Melaksanakan Perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025



Kepala Staf Angkatan Darat
Korps Teritorial,
Maj. Gen. (P) [Nama]

Tembusan:

1. Marbut RI
2. Kasad
3. Wikasad
4. Irganad
5. Korpsahli Kasad
6. Asrena, Asintel, Asops, Aslat, Aspers, Aslog, dan Aster Kasad
7. Pangdam IBB, IISWJ, VIMW, XII/Tr, XII/Han, XII/Reg, dan IM
8. Dandennabesad

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Lampiran Surat Perintah Kasad
Nomor Sprin / 040 / III / 2025
Tanggal 13 Maret 2025

**DAFTAR PERSONEL PENGAWAS KEGIATAN OPTIMASI LAHAN (OPLAH) DAN CETAK SAWAH RAKYAT (CSR)
SERTA SATGAS LUAS TAMBAH TANAM (LTT) SWASEMBADA PANGAN KEMENTERAN RI**

NO	URT	BAG	NAMA	PKT, KORPS	NRP	JABATAN			KETERANGAN
						ORGANIK	PENUGASAN		
							LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PAWAS OPLAH DAN CSR						
1	1		Maulana Ridwan, S.H., M.H.	Brigjen TNI	-	Staf Khusus Kasad	Koordinator Pawas Oplah dan CSR Seluruh wilayah Sumatera	-	Pindah Satuan
2	2		Arif Hendro Djatmiko Hadi Soewignyo, S.H., S.M.	Brigjen TNI	-	Staf Khusus Kasad	-	Koordinator Pawas Oplah dan CSR Seluruh wilayah Sumatera	
3	3		Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M.	Kolonel Inf	11960048300175	Pamen Denmabesad	Pawas Oplah dan CSR Prov. Sumatera Selatan	-	Pindah Satuan
4	4		Slamet Riadi, S.I.P.	Kolonel Inf	11960039640274	Pamen Denmabesad	-	Pawas Oplah dan CSR Prov. Sumatera Selatan	

Gambar 19. Surat Perintah Aster KASAD PJ Wilayah LTT
Sumber: Tentara Nasional Indonesia, 2025

3. Peningkatan Keamanan Ketahanan Pangan

Dalam konteks keamanan pangan nasional, peran TNI dan Polri semakin vital, terutama dalam menjaga stabilitas sosial yang kerap terganggu oleh distribusi pupuk yang tidak merata atau harga pangan yang fluktuatif. Konflik horizontal yang muncul akibat ketimpangan distribusi atau penyalahgunaan alokasi pupuk subsidi sering kali dapat dicegah dengan keterlibatan aparat keamanan. Pengawasan intensif terhadap distribusi pupuk yang dilakukan secara terbuka bersama Satgas Pangan, berhasil menekan praktik penyimpangan oleh distributor dan pengecer di sejumlah daerah (Harianto, 2025).

Peran Polri, melalui Bhabinkamtibmas dan satuan reserse ekonomi diperkuat oleh sistem pelaporan masyarakat yang terhubung langsung ke Satgas Pangan. Bersama TNI dan penyuluh pertanian, mereka membentuk sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan pelacakan distribusi benih, pupuk, dan alsintan secara *real time*. Sistem ini juga digunakan untuk mendeteksi potensi permainan harga dan penguasaan stok oleh pihak tertentu. Selain itu, pelibatan Pemda sebagai pengelola data kebutuhan wilayah menambah akurasi dalam penentuan alokasi bantuan (Dimas, 2025; Palopopos, 2025).

Kasus-kasus kelangkaan pupuk di masa lalu menjadi pembelajaran penting bahwa ketahanan pangan tidak hanya memerlukan produksi tinggi, juga sistem pengamanan distribusi yang andal. Dalam beberapa operasi pasar dan inspeksi mendadak, keterlibatan TNI dan Polri terbukti mampu menindak tegas pihak yang melakukan kecurangan takaran, penimbunan, hingga manipulasi harga komoditas pangan, seperti minyak goreng dan beras (Zeri, 2025; Akhmad, 2025). Pendekatan ini

menciptakan efek jera sekaligus membangun kesadaran pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga ekosistem pangan.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan responsif, penguatan keamanan ketahanan pangan menjadi bagian integral dari strategi swasembada nasional. Aparat keamanan bukan hanya pelindung, juga mitra aktif dalam edukasi petani, penegakan hukum di sektor pangan, dan penjaga keadilan distribusi. Sistem satu komando yang dikawal oleh TNI dan Polri mencerminkan hadirnya negara secara penuh dan dalam sektor pangan, tidak sekadar memproduksi, juga melindungi setiap proses dan pelakunya.

D. Penguatan Kelembagaan Produksi ke Depan

Program Satu Komando di kelembagaan produksi bukan sekadar konsolidasi administratif, juga upaya membangun tata kelola pertanian nasional yang berorientasi pada ketepatan, kecepatan, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, setiap komponen dalam sistem produksi, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun kelembagaan diperkuat dalam satu jalur komando yang terhubung dari pusat hingga ke tingkat desa. Langkah ini menjadi fondasi baru dalam mentransformasi sistem pertanian nasional menjadi lebih responsif terhadap dinamika lapangan, tantangan iklim, serta kebutuhan petani dan konsumen secara langsung.

Transformasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan negara secara utuh di sektor pangan. Kementerian Pertanian tidak lagi bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan TNI, Polri, kementerian/lembaga lain, BUMN pangan, hingga pemerintah desa dan organisasi masyarakat. Model kolaborasi ini mempertegas arah baru

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

pembangunan pertanian yang lebih adaptif dan inklusif, serta memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Sinergi ini menjadi modal sosial dan kelembagaan yang tak ternilai dalam membangun sistem pertanian yang tangguh dan berdaulat.

Lebih dari itu, penguatan kelembagaan produksi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen atau menstabilkan harga, juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi desa, pengurangan ketimpangan, dan regenerasi petani. Intervensi berbasis wilayah seperti klaster, koperasi, dan transmigrasi modern menjadi instrumen untuk memperluas dampak ekonomi dari sektor pertanian ke seluruh penjuru negeri. Setiap langkah dan kebijakan dirancang untuk memungkinkan petani sebagai pelaku utama dalam ekosistem pangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Kementan menegaskan bahwa sistem pertanian modern berbasis Satu Komando adalah solusi konkret terhadap tantangan pangan saat ini dan masa depan. Langkah ini merupakan wujud nyata dari visi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan membangun tata kelola kelembagaan yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Indonesia tidak hanya akan berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan, tetapi juga akan mencapai keberlanjutan pertanian untuk masa depan Indonesia.

BAB 4

PROGRAM SATU KOMANDO DI KELEMBAGAAN HILIR

Kelembagaan hilir memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh hasil kerja keras di sektor produksi dapat benar-benar sampai ke tangan konsumen secara adil, merata, dan tepat waktu. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh sejauh mana sistem distribusi, tata niaga, dan stabilisasi harga mampu menjaga keberlanjutan usaha tani dan daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah, penguatan koordinasi kelembagaan hilir menjadi elemen kunci menuju kedaulatan pangan nasional.

Program Satu Komando menjadi kerangka penting untuk menyatukan peran berbagai aktor di hilir, seperti Bapanas dalam pengaturan harga dan operasi pasar, BULOG dalam pengelolaan cadangan dan distribusi, Perpadi dalam modernisasi penggilingan, hingga asosiasi komoditas dan pelaku ekspor-impor dalam perdagangan pangan strategis. Namun demikian, keterpaduan ini tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan kesinambungan dengan sektor produksi agar intervensi di hilir benar-benar selaras dengan kondisi dan dinamika lapangan.

Di sinilah pentingnya kehadiran Kementan sebagai mitra strategis dalam ekosistem kelembagaan hilir. Penyediaan data produksi, analisis proyeksi panen, dan kajian ongkos usaha tani menjadi sangat krusial bagi pengambilan keputusan oleh lembaga hilir. Tanpa informasi yang akurat dari hulu, kebijakan seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau penugasan impor berisiko kehilangan presisi dan

responsivitas. Oleh karena itu, pendekatan Satu Komando di hilir seyogianya didukung pula oleh mekanisme pertukaran data dan perencanaan bersama antarkementerian dan lembaga.

Melalui dorongan tata kelola hilir yang terkoordinasi, berbasis data produksi, dan mengedepankan kepentingan petani serta konsumen, kita dapat memperkuat fondasi menuju sistem pangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan tangguh menghadapi krisis.

A. HPP dan Operasi Pasar

Stabilisasi harga pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dalam sistem pangan nasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi langkah strategis negara untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak, sekaligus menjaga agar harga pangan tidak melampaui daya beli masyarakat. Bapanas saat ini menjadi lembaga utama yang diberi mandat untuk menetapkan HPP dan mengoordinasikan kebijakan intervensi harga, termasuk melalui operasi pasar. Dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani pada masa panen raya (Badan Pangan Nasional, 2025).

Perlu menjadi catatan bahwa efektivitas HPP sangat bergantung pada keakuratan data dan relevansi kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Di sinilah peran Kementan menjadi sangat krusial. Melalui jaringan penyuluh, dinas pertanian, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian menyuplai data struktur biaya

usaha tani, proyeksi panen, dan tren input produksi. Data ini menjadi fondasi dalam penyusunan harga dasar yang wajar dan adaptif. Tanpa keterlibatan aktif Kementerian Pertanian, penetapan HPP berisiko tidak mencerminkan realitas yang dihadapi petani dan berpotensi menimbulkan disinsentif terhadap kegiatan produksi (Badan Pangan Nasional, 2024).

Kementan juga terlibat dalam implementasi dan pengawasan pelaksanaan HPP di lapangan. Berdasarkan instruksi Presiden, harga gabah tidak boleh dibeli di bawah HPP selama panen raya berlangsung (Gambar 20). Kementerian Pertanian melalui unit teknis di daerah bertugas memastikan agar pelaku pasar, seperti tengkulak, pedagang perantara, hingga mitra BULOG mematuhi ketentuan harga tersebut. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan kepastian harga bagi petani serta mencegah distorsi pasar akibat praktik pembelian di bawah HPP (Cakti, 2024).

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan



Gambar 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia agar Kementerian Pertanian mengawal HPP untuk menciptakan kepastian harga bagi petani
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

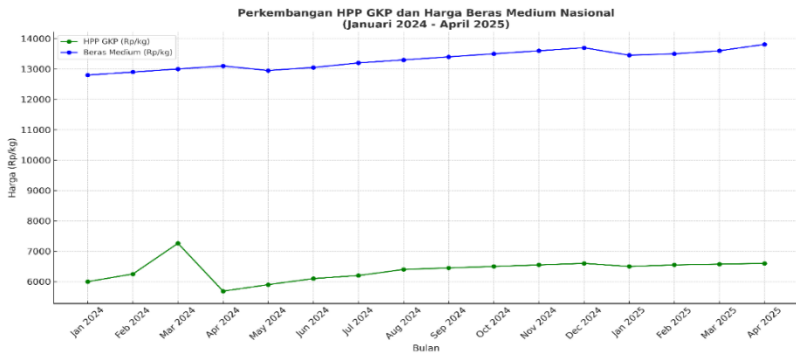
Di sisi lain, intervensi pasar melalui operasi pasar menjadi mekanisme untuk menstabilkan harga pangan di tingkat konsumen. Operasi pasar yang dilaksanakan oleh Bapanas melalui penugasan kepada BULOG ditujukan untuk meredam lonjakan harga pada momen-momen strategis, seperti menjelang hari raya atau saat pasokan terganggu. Namun, efektivitas operasi pasar sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan, volume yang dilepas, serta cakupan distribusi. Dalam praktiknya, keterlambatan BULOG dalam menyerap gabah dari petani atau distribusi yang tidak merata masih menjadi kendala serius yang perlu segera ditangani (Fahmid et al. 2025).

Kementan berperan sebagai penghubung antara pelaksana operasi pasar dan pelaku produksi di lapangan. Melalui koordinasi

dengan kelompok tani, koperasi petani, dan pemerintah daerah, Kementan dapat membantu memastikan distribusi tepat sasaran serta mendukung transparansi pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dimanfaatkan sebagai simpul distribusi informasi dan pengawasan harga di tingkat kecamatan. Sinergi kelembagaan ini penting agar HPP tidak hanya menjadi kebijakan makro, juga hadir dan dirasakan manfaatnya oleh petani di desa-desa.

Perkembangan HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan harga beras medium nasional sepanjang Januari 2024 hingga April 2025 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan intervensi kelembagaan hilir yang semakin terintegrasi. Grafik pada Gambar 21 memperlihatkan bahwa penetapan ulang HPP GKP sebesar Rp6.500/kg yang diberlakukan mulai Januari 2025 merupakan respons strategis pemerintah untuk menjaga keberlanjutan insentif produksi di tingkat petani. Kenaikan HPP ini diikuti oleh tren stabilisasi harga beras medium di pasar yang meskipun mengalami fluktuasi musiman, tetap terjaga dalam rentang yang relatif terkendali (Rp13.453/kg—Rp13.811/kg) hingga April 2025.

Satu Komando Wujudkan Swasembada Pangan



Gambar 21. Gambar HPP gabah dan harga beras medium nasional
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Pola stabilisasi ini tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran kelembagaan hilir dalam sistem Satu Komando Nasional. Melalui koordinasi antara Kementan, Bapanas, PT ID Food, dan Perum BULOG, intervensi pasar seperti operasi serap gabah, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta distribusi berbasis *dashboard* harga dan stok berjalan secara lebih terukur dan terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan hilir dan respons harga di pasar menunjukkan bahwa pendekatan Satu Komando berhasil menjaga stabilitas harga pangan pokok bagi konsumen dan menjamin kesejahteraan petani Indonesia.

Agar semua instrumen dapat berjalan secara terintegrasi, diperlukan platform koordinasi lintas sektor yang fungsional dan responsif. Satu Komando bukan hanya slogan, melainkan struktur koordinasi yang menyatukan perencanaan, eksekusi, dan pengawasan kebijakan harga dalam satu sistem yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Bapanas, Kementan, BULOG, Kemendag, dan pemerintah

daerah harus berkolaborasi secara *real time* dengan berbasis pada data yang sama. Dengan demikian, HPP dan operasi pasar tidak hanya menjadi instrumen pengendalian harga, juga fondasi bagi sistem pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.

B. BULOG: Reposisi peran dalam Sistem Komando Pangan Nasional

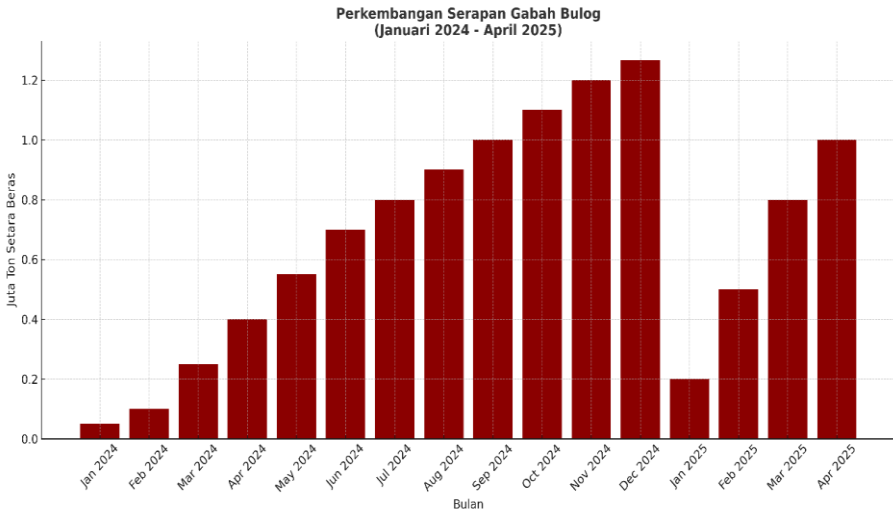
Perum BULOG memainkan peran strategis dalam sistem ketahanan pangan Indonesia, khususnya melalui fungsi pengelolaan CBP, stabilisasi harga, serta pelaksanaan distribusi pangan publik. Dalam kerangka koordinasi kelembagaan hilir, BULOG menjadi operator teknis yang menjalankan mandat negara untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok, terutama beras. Fungsi ini terintegrasi dalam kebijakan intervensi pasar yang dikoordinasikan oleh Bapanas, dengan dukungan data dan pengawasan dari Kementan (Badan Pangan Nasional, 2024).

Penetapan HPP merupakan prasyarat bagi BULOG dalam menjalankan penyerapan gabah petani. BULOG bertugas menyerap gabah pada harga tersebut sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap pendapatan petani selama panen raya. Penerapan kebijakan ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur mencatatkan serapan lebih dari 425.000 ton beras hingga Mei 2025, atau sekitar 73% dari target nasional (Setiawan, 2025). Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi kelembagaan antara BULOG, Dinas Pertanian, TNI (Babinsa), serta kelompok tani dalam mekanisme penyerapan gabah berbasis kemitraan lokal. Secara nasional, BULOG menyerap sekitar 2 juta ton beras

sepanjang kuartal pertama 2025 dengan kontribusi besar dari provinsi sebagai produsen utama. Fakta ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional.

Dalam konteks distribusi, BULOG menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menasar pasar tradisional dan ritel modern. Pada tahun 2024, distribusi SPHP menjangkau 366 pasar tradisional dan 272 jaringan ritel dengan total volume mencapai lebih dari 51 juta kilogram beras (BULOG, 2025). Strategi diversifikasi saluran distribusi ini membuka peluang efisiensi dalam logistik pangan, meskipun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru berupa ketimpangan akses antara wilayah urban dan rural. Oleh karena itu, diperlukan peta distribusi intervensi yang lebih adil dengan penekanan pada pasar lokal dan komunitas yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Grafik serapan gabah oleh BULOG disajikan pada Gambar 22. Perlu ditegaskan bahwa grafik tersebut merepresentasikan pola serapan gabah BULOG secara akumulatif berdasarkan data resmi total tahunan dan hingga April 2025 dikombinasikan dengan proyeksi musiman. Grafik perkembangan serapan gabah oleh BULOG periode Januari 2024 hingga April 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awal tahun 2025, sejalan dengan penyesuaian kebijakan HPP dan penguatan koordinasi kelembagaan hilir. Peningkatan volume serapan yang lebih cepat pada kuartal pertama 2025 mencerminkan peran strategis BULOG dalam mendukung stabilitas harga di tingkat petani serta ketersediaan CBP. Implementasi sistem Satu Komando Nasional memungkinkan intervensi pasar yang lebih responsif dan terkoordinasi. Serapan gabah menjadi instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan antara produksi domestik dan kebutuhan konsumsi nasional.



Gambar 22. Grafik analisa serapan gabah oleh BULOG tahun 2024—2025.
Sumber: Dianalisis oleh penulis dari BULOG (2025)

Implikasi kebijakan dari peran BULOG dalam sistem satu komando hilir mencakup perlunya penguatan tata kelola intervensi pangan yang terstandarisasi lintas lembaga. BULOG perlu menyiapkan desain kebijakan yang kolaboratif agar dapat mencapai sistem pangan yang resilien. Desain kolaboratif tersebut meliputi koordinasi dengan Bapanas dalam penetapan volume dan waktu intervensi, serta dengan Kementan dalam pengawasan dan dukungan petani. Di samping peran BULOG, PT ID Food juga memainkan fungsi strategis dalam penguatan kelembagaan hilir, terutama dalam pengelolaan distribusi pangan komersial. Dengan demikian, transparansi distribusi melalui platform digital dan pelibatan pemerintah daerah dapat mempercepat reformasi logistik pangan nasional yang lebih inklusif dan adil.

 **Box Discussion: PT ID Food – Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Integrasi BUMN Hilir**


PT ID Food (Indonesia Food Holding) merupakan perusahaan BUMN yang dibentuk untuk memperkuat kelembagaan hilir pangan nasional melalui integrasi berbagai entitas logistik, distribusi, dan pemasaran pangan strategis. Sebagai bagian dari sistem satu komando pangan nasional, PT ID Food memainkan peran vital dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat.

 **Peran Strategis PT ID Food**

- Mengagregasi dan mendistribusikan komoditas pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging.
- Mengelola logistik pangan termasuk *cold chain*, manajemen gudang, dan transportasi antar wilayah.
- Bersinergi dengan BULOG, BUMD, koperasi, dan mitra swasta dalam stabilisasi harga dan pasokan.
- Mendukung program cadangan pangan pemerintah (CBP) melalui penyediaan dan distribusi pangan pokok.

 **Contoh Praktik: Operasi Pasar dan Stabilitas Harga**

Dalam menghadapi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), PT ID Food melakukan operasi pasar di lebih dari 30 kota di Indonesia. Distribusi beras medium, minyak goreng kemasan rakyat, dan daging beku dilakukan langsung ke konsumen melalui kerja sama dengan retail modern, koperasi, dan warung tradisional.

 **Tantangan dan Peluang**

- Skema integrasi logistik antar wilayah yang belum merata.
- Kebutuhan digitalisasi *end-to-end traceability* produk pangan.
- Peluang memperkuat kemitraan dengan pelaku UMKM pangan untuk memperluas jangkauan distribusi.

 **Catatan Penutup**

Sebagai pilar kelembagaan hilir dalam sistem pangan nasional, PT ID Food tidak hanya menjadi pelaksana distribusi, tetapi juga instrumen strategis negara dalam menjaga stabilitas pangan. Peran ini semakin penting dalam kerangka satu komando, di mana setiap intervensi distribusi pangan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

C. Perpadi: Penguatan rantai pasok dan modernisasi penggilingan padi

Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) merupakan asosiasi utama yang mengoordinasikan pelaku usaha penggilingan padi di seluruh Indonesia. Dalam konteks rantai nilai komoditas beras, Perpadi memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlanjutan distribusi dari gabah hasil panen petani menuju konsumen akhir. Perpadi bukan hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi antarpengusaha penggilingan, juga sebagai institusi penyeimbang dalam ekosistem agribisnis pangan nasional yang sangat bergantung pada kestabilan pasokan dan mutu beras (Fitriani et al., 2021).

Perpadi turut memainkan peran sentral dalam menjaga kualitas hasil panen dan mendorong transformasi pascapanen yang lebih efisien. Penggilingan padi anggota Perpadi banyak yang berada dalam posisi strategis di wilayah sentra produksi dan memiliki akses terhadap teknologi sederhana maupun modern. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap permodalan dan keterbatasan penguasaan pasar, terutama bagi penggilingan kecil yang saat ini mendominasi sekitar 92% struktur industri penggilingan nasional (Fitriani et al., 2021). Penguatan sistem informasi harga, keterhubungan antara produsen dan pasar, serta kepastian kemitraan menjadi elemen penting yang didorong Perpadi.

Kemitraan yang dibangun oleh Perpadi dengan berbagai pihak, termasuk Perum BULOG, BUMDes, dan koperasi petani menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem distribusi beras yang inklusif. Dalam beberapa inisiatif kebijakan nasional, Perpadi dilibatkan dalam

penyerapan gabah petani untuk mendukung CBP. Studi kasus pada PP Djaso Bhakti menunjukkan bahwa keaktifan pengusaha dalam komunitas Perpadi memungkinkan akses terhadap kebijakan dan kolaborasi pengadaan gabah yang kompetitif (Pratama et al., 2019).

Perpadi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok beras dengan memperkuat posisi *intermediary suppliers* sebagai penghubung antara petani dan penggilingan. Penelitian Fitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa keberadaan pedagang pengumpul sebagai mitra tetap dari pabrik penggilingan menjadi kunci utama keberlangsungan suplai gabah. Penggilingan padi secara aktif melakukan pembelian cadangan gabah dengan pola musiman, menunjukkan adanya praktik manajemen rantai pasok berbasis komunitas yang dapat dijadikan model untuk replikasi nasional.

Dalam mendukung keberlanjutan sektor, Perpadi mendorong anggotanya untuk melakukan modernisasi penggilingan padi. Studi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) pada UD Sumber Rejeki Barokah menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi dan permodalan menjadi hambatan utama, tetapi juga membuka peluang strategi intensif seperti penetrasi pasar dan pengembangan produk berbasis variasi kemasan (Wicaksono, 2022). Program insentif pemerintah dalam bentuk KUR, hibah alat pascapanen, serta pendampingan teknis harus lebih proaktif difasilitasi melalui jaringan Perpadi di daerah.

Strategi kemitraan Perpadi dengan BULOG, BUMDes, dan koperasi petani menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara aktor hilir dan pelaku usaha lokal. Pada beberapa kesepakatan nasional, seperti penyerapan gabah petani yang difasilitasi oleh Kementan,

Perpadi aktif menjalin kesepahaman dengan BULOG untuk memastikan penggilingan anggotanya dapat berperan sebagai pemasok utama gabah ke CBP (Pilar Pertanian, 2025). Di tingkat lokal, kerja sama dengan BUMDes dan koperasi membuka peluang distribusi beras ke pasar desa dan daerah terpencil sehingga memperluas jangkauan distribusi beras dan memperkuat ketahanan pangan desa berbasis komunitas.

Salah satu agenda penting yang terus dikembangkan oleh Perpadi adalah modernisasi sistem penggilingan. Banyak unit penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan peralatan konvensional yang tidak efisien dan menghasilkan rendemen beras yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, Perpadi mendorong anggotanya untuk mengakses skema pembiayaan dan insentif modernisasi dari pemerintah, termasuk KUR pertanian dan hibah alat pascapanen. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mutu beras yang dihasilkan, juga memperkuat daya saing produk lokal terhadap beras impor (Vinta, 2025). Modernisasi penggilingan juga berkontribusi langsung terhadap pengurangan susut hasil dan peningkatan nilai tambah di sisi hilir.

Dalam konteks kelembagaan, Perpadi perlu diperkuat posisinya sebagai mitra tetap dalam forum koordinasi lintas lembaga di sektor pangan. Saat ini, posisi Perpadi masih sering bersifat konsultatif atau pelengkap dalam forum formal kebijakan, padahal perannya sangat krusial dalam menjaga kesinambungan rantai pasok beras nasional. Perpadi memainkan peran penting sebagai simpul distribusi antara petani dan pasar. Kontribusinya terlihat dalam fungsinya sebagai penjaga kelancaran rantai pasok gabah dan beras, di mana anggotanya terlibat langsung dalam proses pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Keberadaan asosiasi ini sangat relevan untuk mengisi ruang

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

koordinasi antara sektor produksi dengan sektor distribusi pangan nasional (Badan Pangan Nasional, 2025a). Diperlukan penguatan peran Perpadi dalam struktur koordinasi kelembagaan hilir yang dikoordinasikan oleh Bapanas, bersama BULOG, Kementan, dan Kementerian Perdagangan (Gambar 23). Dengan dukungan regulasi yang memberikan ruang partisipasi formal, Perpadi dapat menjadi aktor utama dalam advokasi kebutuhan pelaku penggilingan padi, sekaligus pengawas mutu dan stabilitas pasokan di hilir (Badan Pangan Nasional, 2025a).



Gambar 23. Rapat Kerja Nasional Perpadi tahun 2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025a

Implikasi kebijakan dari peran Perpadi antara lain mencakup: (1) penyediaan akses terhadap sistem pembiayaan modernisasi dan digitalisasi, (2) penguatan posisi dalam kelembagaan pangan nasional

melalui regulasi formal, dan (3) pembangunan *data base* nasional penggilingan padi terintegrasi untuk memetakan kapasitas dan kesiapan dalam intervensi pasar dan penyerapan gabah. Dengan demikian, Perpadu dapat menjalankan peran strategisnya secara maksimal dalam ekosistem pangan nasional.

D. Asosiasi Komoditas: Penguatan kelembagaan petani dalam tata kelola komoditas pangan pokok

Asosiasi komoditas pangan pokok, seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia (API), Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), dan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) memiliki peran sentral dalam membangun tata kelola komoditas yang lebih inklusif dan efisien. Dalam kerangka sistem pangan nasional, asosiasi tersebut tidak hanya berperan sebagai wadah aspirasi petani, tetapi juga sebagai institusi mediasi antara produsen, pelaku industri pengolahan, dan pasar (Heryadi et al., 2022; Puspita et al., 2023). Fungsi kelembagaan ini menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan dinamika lapangan, serta memperkuat posisi tawar petani terhadap pasar domestik maupun ekspor.

Penetapan HPP menjadi instrumen kebijakan penting dalam melindungi pendapatan petani, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi kendala ketimpangan informasi dan posisi tawar yang rendah. Dalam konteks ini, asosiasi berperan sebagai mediator antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan rekomendasi harga berdasarkan biaya produksi dan margin wajar (Badan Pangan Nasional, 2025b). Selain itu, asosiasi berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan pelaksanaan HPP dan memfasilitasi komunikasi dua arah antara petani dan instansi teknis.

Model kelembagaan korporasi petani seperti yang diterapkan di Kabupaten Bandung membuktikan efektivitas pendekatan pentahelix dalam memperkuat daya saing petani jagung melalui korporasi berbasis koperasi. Koperasi Produsen Sinar Jagung Priangan, sebagai model, memperlihatkan bagaimana asosiasi petani dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang mampu mengakses permodalan, menjalin kontrak dengan *offtaker* industri, serta memperoleh dukungan teknologi dan pendampingan akademik (Puspita et al., 2023). Sinergi antarpilar pentahelix (pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media) menjadi fondasi dalam keberhasilan model ini.

Asosiasi juga berperan dalam fasilitasi akses terhadap sertifikasi dan standardisasi mutu. Sebagai contoh, dalam sistem pertanian organik padi yang diinisiasi oleh Appoli (Aliansi Petani Padi Organik Boyolali), peran asosiasi dalam memberikan pelatihan, pengawasan, dan advokasi terhadap pelaksanaan sistem pertanian sesuai SNI 6729 sangat menentukan keberhasilan program (Maharani et al., 2024). Ketersediaan sarana, dukungan kelompok tani, serta penguatan kapasitas internal menjadi determinan utama penerapan praktik pertanian berkelanjutan di tingkat tapak.

Peran Akindo sebagai asosiasi komoditas kedelai juga semakin signifikan dalam merespons tantangan strategis ketersediaan dan ketergantungan impor. Menjelang bulan Ramadan 2025, Akindo menjamin bahwa stok kedelai nasional dalam posisi aman dan siap mendukung permintaan yang meningkat dari industri tahu-tempe (Puspa, 2025). Namun demikian, BULOG mendorong Akindo untuk tidak hanya bergantung pada stok impor, tetapi memperkuat kapasitas produksi kedelai lokal melalui kemitraan dengan petani dan lembaga

riset pertanian (Puspa, 2024). Langkah ini menjadi penting dalam memperkuat ketahanan komoditas pangan nasional dari sisi hulu.

Kepengurusan baru Akindo yang dilantik pada akhir 2024 menyatakan fokus utama pada pengurangan ketergantungan impor melalui penguatan produksi dalam negeri, konsolidasi lahan, serta perluasan jejaring petani kedelai (Kontan.co.id, 2024). Upaya ini juga sejalan dengan mandat Kementan dalam mendorong revitalisasi lahan kering untuk budi daya kedelai dan peningkatan dukungan pascapanen, seperti mesin sortir, pengering, dan gudang penyimpanan. Akindo diharapkan menjadi motor penggerak integrasi hulu hilir dalam rantai pasok kedelai nasional.

Pembentukan platform koordinasi nasional lintas komoditas menjadi kebutuhan struktural. Platform ini dapat mengintegrasikan data produksi, distribusi, dan rantai pasok berbagai komoditas utama serta menjadi ruang kolaboratif untuk menyusun strategi pengendalian harga, distribusi logistik, dan kebijakan ekspor terpadu. Dalam konteks ini, Kementan diharapkan dapat mengambil peran sebagai orkestrator kelembagaan pangan yang mampu menghubungkan asosiasi, BUMN pangan, dan pelaku usaha skala kecil dalam satu kesatuan sistem produksi dan distribusi nasional (Heryadi et al., 2022). Kementan bersama mitra pembangunan, memprioritaskan program revitalisasi kelompok tani menjadi koperasi produsen, pembentukan pusat logistik desa, dan digitalisasi rantai pasok. Dengan pendekatan ini, asosiasi akan bertransformasi menjadi aktor utama dalam sistem pangan nasional yang berdaya saing dan tangguh terhadap dinamika pasar global. Selain penguatan asosiasi petani, kehadiran PT Agrinas menawarkan model

kelembagaan baru yang mengintegrasikan produksi dan distribusi secara berbasis petani.

E. Perusahaan Ekspor-Impor Pangan Strategis Nasional

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan ekspor dan impor pangan strategis memainkan peran vital dalam menjamin stabilitas pasokan nasional dan menjaga ketahanan pangan. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, dan kedelai masih memerlukan impor untuk menutup kesenjangan antara produksi domestik dan konsumsi nasional. Hal ini mengindikasikan pentingnya manajemen perdagangan lintas negara yang terstruktur dan terintegrasi melalui pendekatan *multistakeholder* dan lintas kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Kemenko Perekonomian).

Prosedur perizinan impor dan ekspor saat ini masih dinilai kompleks dan menyulitkan pelaku usaha, khususnya di sektor pangan. Sistem perizinan nonotomatis seperti Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan setelah rekomendasi dari Kementan menjadi sumber inefisiensi dan potensi kelangkaan di pasar. Proses koordinasi antarkementerian yang lambat dan data neraca pangan yang sering kali tidak sinkron menjadi tantangan utama.

Box Discussion: PT Agrinas – Pintu Masuk Transformasi Kelembagaan Hilir Berbasis Petani

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pangan nasional, PT Agro Industri Nasional (PT Agrinas) hadir untuk menjembatani kesenjangan antara petani, *off-taker*, dan pasar. Agrinas didirikan dengan misi utama membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tidak hanya berperan sebagai perusahaan distribusi, Agrinas berusaha mengembangkan model kemitraan produksi yang mengintegrasikan petani sebagai bagian dari rantai pasok berkelanjutan.

Peran Strategis PT Agrinas

- Menyusun kemitraan petani–*off-taker* berbasis kontrak dan input teknologi.
- Mengembangkan agregasi komoditas pangan strategis seperti jagung, kedelai, dan hortikultura.
- Menyediakan layanan logistik dan manajemen stok sebagai cadangan distribusi nasional.
- Berkolaborasi dengan Pemda, Kementerian Pertanian, dan pelaku usaha lokal untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Contoh Praktik: Kemitraan Jagung di NTB

Salah satu model keberhasilan PT Agrinas tercermin pada program kemitraan budi daya jagung di Nusa Tenggara Barat. Petani tidak hanya mendapatkan akses benih dan pupuk melalui pola pembiayaan mikro, tetapi juga jaminan pembelian hasil panen dengan harga acuan. Agrinas bertindak sebagai agregator sekaligus distributor ke industri pakan dan pasar ritel.

Tantangan dan Peluang

- Skala operasi yang masih terbatas di beberapa provinsi.
- Ketergantungan pada pendanaan proyek dan belum optimalnya adopsi digital.
- Potensi besar dalam memperluas peran di sektor pangan lokal bila didukung kelembagaan daerah dan ekosistem logistik nasional.

Catatan Penutup

PT Agrinas adalah contoh kelembagaan hilir modern yang tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga membangun fondasi produksi berbasis petani. Melalui pendekatan satu komando yang terkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan BUMN pangan lainnya, Agrinas menjadi salah satu pilar penting dalam mentransformasikan sistem pangan nasional yang inklusif dan tangguh.

Di sisi lain, transformasi digital melalui sistem logistik dan transparansi data *real time* menjadi tuntutan dalam meningkatkan efisiensi arus barang dan mencegah praktik monopoli atau spekulasi harga. Penerapan platform terintegrasi yang menghubungkan pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung logistik seperti Pelindo dan Bea Cukai dapat mendukung pengawasan dan prediksi kebutuhan pangan nasional secara lebih akurat (Putri et al., 2024). Keterlibatan sektor swasta dalam sistem ekspor-impor strategis memerlukan transparansi data dan integrasi logistik berbasis digital. Digitalisasi sistem informasi logistik pangan nasional menjadi krusial untuk memantau pergerakan barang, menentukan titik rawan kelangkaan, dan merespons gejolak pasar secara *real time* (Sintiya, 2023). Pemodelan dinamis berbasis skenario juga dibutuhkan untuk memproyeksikan kebutuhan dan pasokan pangan seperti beras dan jagung guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun demikian, kebijakan *post-border* yang diberlakukan sejak 2020 justru membuka celah kecurangan impor, seperti manipulasi *Harmonized System* (HS) dan lolosnya barang dari pemeriksaan ketat di kawasan pabean. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan serta pembaruan regulasi yang menyeimbangkan kebutuhan pasar dan perlindungan terhadap produsen lokal (Fauzin, 2021).

Sistem perizinan ekspor-impor yang berbasis pada Surat Persetujuan Impor (SPI) dan rekomendasi teknis dari Kementan menunjukkan adanya kompleksitas dalam tata kelola lintas lembaga. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengeluaran izin dan menghambat arus distribusi yang berdampak pada fluktuasi harga di tingkat konsumen (Fauzin, 2021; Syachbudy, 2023). Proses yang lambat ini

kerap menimbulkan kelangkaan komoditas penting dan membuka celah kecurangan seperti manipulasi kode HS dan penyelundupan barang pada skema *post-border*. Oleh karena itu, langkah mitigatif, seperti pembentukan cadangan pangan nasional yang kuat, insentif bagi produksi dalam negeri, dan penguatan kapasitas logistik menjadi krusial (Putri et al., 2024).

Koordinasi antarkementerian, terutama antara Kementerian Perdagangan, Kementan, Bapanas, dan Kemenko Perekonomian menjadi landasan penting dalam merancang dan merevisi kuota ekspor-impor. Ketiadaan platform integratif lintas sektor dapat menyebabkan ketidakseimbangan distribusi dan konflik kepentingan antarlembaga (Syachbudy, 2023). Dalam konteks global, pemerintah juga harus menyesuaikan diri terhadap dinamika geopolitik dan perdagangan bebas yang menekan negara berkembang, seperti Indonesia (Fauzin, 2021). Meskipun liberalisasi perdagangan menjanjikan efisiensi, tanpa kesiapan logistik dan proteksi terhadap petani lokal, kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan dan menurunkan daya saing produk pangan nasional.

Kementan juga memiliki peran sentral dalam menyusun rekomendasi teknis terhadap pengajuan impor yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, reformasi pada sistem rekomendasi ini perlu dilakukan agar lebih responsif, transparan, dan berbasis sistem elektronik terintegrasi, sehingga tidak menjadi *bottleneck* dalam pengambilan keputusan lintas kementerian (Syachbudy, 2023). Di samping itu, Kementan perlu memperkuat posisi sebagai pengarah strategi substitusi impor melalui peningkatan produksi domestik dan program diversifikasi pangan lokal.

Artinya, setiap kebijakan impor harus disandingkan dengan peta jalan (*roadmap*) penguatan produksi dalam negeri, termasuk alokasi anggaran, dukungan benih dan sarana produksi, serta pelibatan pelaku usaha dalam kontrak produksi jangka menengah (Fauzin, 2021).

Akhirnya, dalam struktur Satu Komando pangan, Kementan dapat berfungsi sebagai simpul teknis dan koordinatif yang menjembatani strategi produksi di hulu dengan kebijakan perdagangan di hilir. Peran ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan ekspor-impor tetap berada dalam kerangka besar ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta tidak kontraproduktif dengan petani domestik.

F. Pelibatan Satgas Pangan Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Dasar pembentukan Satgas Pangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ancaman terhadap stabilitas harga pangan, potensi penimbunan atau penyalahgunaan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan.

Box Discussion: Ketahanan Pangan Nasional dan Dampaknya pada Perdagangan Beras Regional

Pencapaian Cadangan Beras Nasional

Pada Mei 2025, Indonesia mencatatkan capaian historis dengan cadangan beras pemerintah menembus 4 juta ton, tertinggi sejak era modernisasi Bulog. Dari volume tersebut, sekitar 2,4 juta ton berasal dari serapan gabah petani domestik, didukung oleh kebijakan HPP baru (Rp6.500/kg) dan penguatan kelembagaan produksi serta distribusi nasional.

Dampak terhadap Perdagangan Regional

- Keberhasilan ini mendorong perubahan signifikan pada dinamika perdagangan beras di Asia Tenggara.
- Sejak awal 2025, impor beras Indonesia dihentikan — setelah pada 2024 Indonesia masih mengimpor 4,52 juta ton, mayoritas dari Thailand. Keputusan ini menurunkan harga beras dunia dari USD 700 menjadi USD 400 per ton.
- Negara-negara pengeksport utama (Thailand, Vietnam, Myanmar) terdampak dan mulai mengalihkan pasar ke Timur Tengah dan Afrika.

Arah Baru: Potensi Ekspor Beras Indonesia

- Dengan surplus produksi dan cadangan yang memadai, Indonesia kini bersiap sebagai calon pengeksport beras.
- Pemerintah telah mengumumkan kesiapan ekspor 2.000 ton per bulan ke Malaysia sebagai uji pasar regional.

Refleksi dalam Kerangka Satu Komando

Pencapaian ketahanan beras nasional ini tidak terlepas dari penguatan kelembagaan hilir di bawah koordinasi Satu Komando, yang memastikan:

- Integrasi serapan domestik → pengelolaan cadangan → distribusi → pengendalian harga → kesiapan ekspor.
- Peran strategis Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan PT ID Food dalam membangun rantai nilai beras nasional yang adaptif terhadap dinamika pasar global.

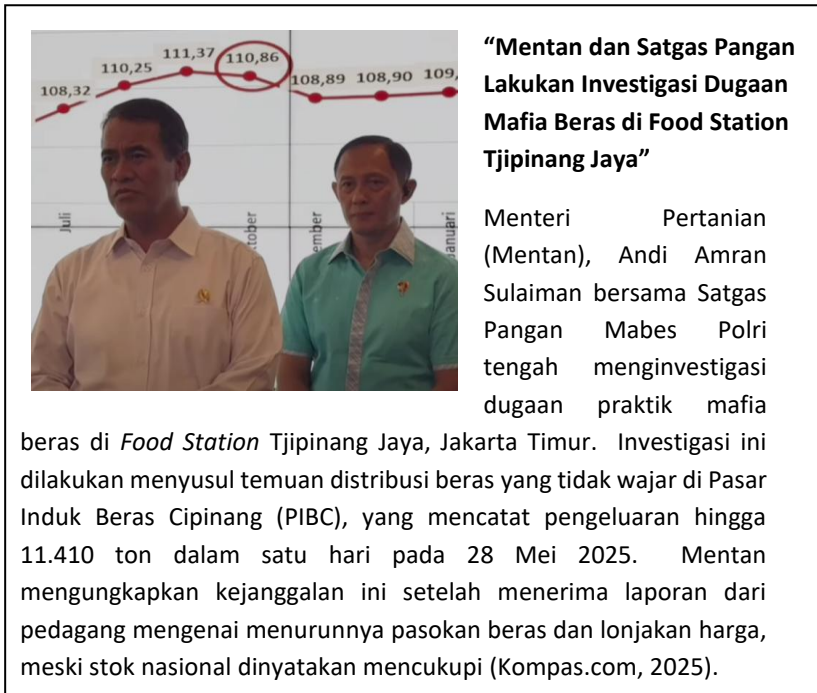
Sumber:

Indonesia.go.id. (2025)

Kompas.id. (2025, May 13). *Stok beras RI melimpah, sejumlah negara pengeksport beras gerah*. Retrieved from <https://www.kompas.id>

Tugas Satgas Pangan antara lain:

1. **Stabilitas Harga Pangan**
Satgas Pangan seringkali dibentuk untuk mengatasi fluktuasi harga pangan, terutama menjelang peristiwa besar seperti Lebaran atau menjelang musim panen.
2. **Penimbunan dan Penyalahgunaan**
Satgas Pangan berperan dalam memantau dan menindak pihak-pihak yang melakukan penimbunan bahan pangan, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.
3. **Kualitas dan Keamanan Pangan**
Satgas Pangan juga berperan dalam memastikan kualitas dan keamanan produk pangan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan yang beredar di pasaran.
4. **Ketersediaan Pangan**
Satgas Pangan dapat berperan dalam memastikan ketersediaan bahan pangan, terutama saat terjadi bencana alam atau gangguan distribusi.
5. **Ketahanan Pangan**
Satgas Pangan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik melalui peningkatan produksi, peningkatan akses, maupun peningkatan pemanfaatan pangan.



Gambar 24. Menteri Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Mabas Polri
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025

G. Pentingnya Kelembagaan Hilir

Kelembagaan hilir dalam sistem pangan nasional tidak dapat dibiarkan berjalan secara sektoral dan terfragmentasi. Tanpa koordinasi terpadu, intervensi kebijakan di hilir, baik terkait harga, distribusi, maupun ekspor-impor pangan berisiko menjadi tidak konsisten, tumpang tindih, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, gagasan Satu Komando bukan sekadar agenda birokratis, melainkan kebutuhan strategis untuk mengintegrasikan seluruh rantai kebijakan dari hulu hingga hilir.

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

Transformasi kelembagaan di hilir ke arah yang lebih adaptif, digital, dan responsif terhadap dinamika pasar menjadi prioritas yang mendesak. Modernisasi sistem penggilingan, digitalisasi distribusi, serta keterbukaan data dalam perdagangan ekspor-impor menjadi bagian tak terpisahkan dari pembaruan ini. Institusi seperti BULOG, Perpadi, asosiasi komoditas, serta pelaku usaha ekspor-impor harus diberdayakan secara sistemik dengan mekanisme kebijakan dan dukungan kelembagaan yang progresif.

Sebaik apapun rancangan sistem, tanpa kepercayaan dan akuntabilitas, tata kelola pangan hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas. Oleh karena itu, pembangunan sistem distribusi dan perdagangan pangan nasional harus berbasis pada komitmen terhadap kepentingan petani dan konsumen. Kepercayaan dibangun melalui transparansi data, partisipasi pemangku kepentingan, serta keberanian pemerintah untuk menegakkan regulasi dan menjamin keadilan distribusi.

Melalui penguatan sistem kelembagaan hilir yang terkoordinasi, berbasis data produksi dan konsumsi, serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas publik, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, juga adil secara sosial dan tangguh terhadap krisis global. Satu Komando di hilir adalah fondasi menuju kedaulatan pangan yang utuh.

BAB 5

KUNCI KESUKSESAN SATU KOMANDO

Transformasi besar dalam sistem ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang ideal, tetapi terutama pada keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks Satu Komando Pertanian Pangan Nasional, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh tiga kunci utama, yaitu koordinasi lintas aktor, keberanian mengesampingkan ego sektoral, dan penetapan skala prioritas yang berpihak pada petani.

Kementan, sebagai aktor utama dalam urusan pangan, telah menginisiasi model koordinasi terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI–Polri, hingga organisasi petani. Bukti konkret dari pendekatan ini dapat dilihat dari kesuksesan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih transparan, pengendalian harga beras saat krisis, serta reformasi kelembagaan di hilir yang mengedepankan tata kelola berbasis akuntabilitas dan data. Keberhasilan tersebut bukanlah hasil kerja satu institusi semata, melainkan buah dari orkestrasi lintas sektor yang solid.

Keberhasilan satu komando tidak mungkin tercapai jika ego sektoral tetap dominan. Pendekatan komando terpadu mengharuskan semua institusi yang terlibat untuk menyelaraskan tujuan, saling berbagi data dan kewenangan, serta membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang kolektif dan responsif. Berdasarkan pengalaman Kementan, penguatan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas, reformasi pengawasan distribusi pangan, dan penyesuaian regulasi teknis di

berbagai level menjadi contoh nyata keberhasilan menurunkan sekat-sekat sektoral demi efisiensi dan keberpihakan.

Pada akhirnya, yang menjadi penentu utama adalah keberanian untuk menetapkan skala prioritas kebijakan yang benar-benar berpihak pada petani. Kebijakan penghapusan rafaksi dan deregulasi derajat sosoh dalam penyerapan gabah hanyalah salah satu simbol keberpihakan tersebut. Dengan menjadikan petani sebagai subjek utama dan bukan sekadar objek program, Satu Komando membuktikan dirinya bukan sekadar slogan kebijakan, juga fondasi baru tata kelola pertanian nasional yang lebih adaptif, terintegrasi, dan menjawab kebutuhan zaman.

A. Koordinasi antara Stakeholder dengan Kementerian Pertanian

1. Integrasi Sistem Informasi dan Data Pertanian

Salah satu fondasi utama keberhasilan Satu Komando adalah terciptanya integrasi sistem informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan responsif. Dalam sistem lama, fragmentasi data menjadi hambatan serius data luas tanam, distribusi pupuk, dan produksi pangan tersebar di berbagai lembaga tanpa sistem kendali bersama. Melalui pendekatan komando terpadu, Kementerian Pertanian membangun platform *Agriculture War Room* (AWR), e-RDKK, dan *dashboard* pemantauan berbasis *real time* yang menyatukan seluruh sumber data pertanian dalam satu sistem informasi nasional.

Penerapan sistem digital terbukti mampu meningkatkan akurasi alokasi bantuan pupuk bersubsidi dan mengurangi penyimpanan.

Kementan menggunakan data berbasis NIK dan lokasi spasial untuk memvalidasi penerima pupuk, sehingga subsidi tepat sasaran. Dengan sistem ini, ketimpangan alokasi yang selama bertahun-tahun terjadi dapat ditekan secara drastis. Digitalisasi berbasis satu data telah mempercepat penyaluran input hingga 20% lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Lebih dari sekadar alat pemantauan, integrasi sistem ini juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi antar-*stakeholder*. Pemerintah daerah, TNI–Polri, penyuluh, dan distributor dapat mengakses informasi yang sama, menghilangkan bias data yang kerap menjadi akar konflik di lapangan. Di Kalimantan Tengah, sistem ini digunakan dalam program cetak sawah untuk memetakan lahan rawa yang potensial, mengoordinasikan pembangunan irigasi oleh Kemen PU, dan mendistribusikan input oleh Kementan (Simorangkir, 2025).

Kementan juga menegaskan bahwa sistem pelaporan digital dari penyuluh lapangan yang kini berada di bawah kendali pusat membuat evaluasi program lebih transparan dan berbasis kinerja. Tidak hanya memantau progres tanam, juga digunakan untuk mendeteksi kegagalan distribusi, hambatan geografis, hingga kebutuhan pelatihan petani. Hal ini menciptakan tata kelola lapangan yang lebih adaptif dan presisi.

Keberhasilan ini diperkuat oleh reposisi kelembagaan penyuluh menjadi ASN pusat sebagaimana ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2025. Dengan status tersebut, jalur koordinasi menjadi tunggal dan proses pengambilan keputusan berjalan langsung antara Kementan dan lapangan tanpa terhambat birokrasi daerah. Ini merupakan pencapaian historis dalam sistem penyuluhan Indonesia dan menjadi pilar penting keberhasilan Satu Komando.

Secara keseluruhan, keberhasilan integrasi sistem informasi ini bukan hanya memperbaiki efisiensi distribusi tetapi juga membentuk ekosistem data bersama yang memungkinkan setiap aktor bergerak secara terkoordinasi, berdasarkan kenyataan lapangan, dan bukan asumsi. Inilah pilar digital yang menopang keberhasilan koordinasi antarstakeholder dengan Kementerian Pertanian.

2. Model Kolaborasi Multi-Stakeholder

Keberhasilan Satu Komando juga terwujud secara nyata melalui model kolaborasi lintas lembaga yang sebelumnya sulit dicapai karena ego sektoral. Kementerian Pertanian mengambil peran sentral sebagai *leading sector* dalam kebijakan pangan nasional, tetapi pada saat yang sama membangun pola komunikasi yang setara dan inklusif dengan Kementerian PU, BUMN pangan, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Model ini membuktikan bahwa kelembagaan sektor publik Indonesia mampu bertransformasi ke arah tata kelola kolaboratif dengan struktur komando tunggal.

Dalam program cetak sawah seluas tiga juta hektare yang dicanangkan sejak 2024, kerja sama terbangun secara konkret. Kementan menyuplai benih dan alsintan, Kementerian PU memperkuat sistem irigasi, dan TNI menjadi penggerak lapangan yang membantu logistik dan pengamanan. Di Kalimantan Tengah, 75.000 hektare sawah berhasil dipersiapkan dengan model koordinasi lintas lembaga. Bahkan, Kejaksaan dilibatkan melalui posko hukum (P3H) untuk memastikan akuntabilitas anggaran dan pencegahan penyimpangan (Simorangkir, 2025).

Kolaborasi serupa juga terlihat dalam program optimasi lahan suboptimal (oplah) di Aceh dan Sulawesi Selatan. Di Aceh, sinergi antara Kementan, TNI, dan Pemda mengaktifkan lahan tidur menjadi lahan produktif seluas lebih dari 20.000 hektare, juga dukungan anggaran sarana produksi senilai Rp170 miliar (Prakosa, 2024). Keberhasilan ini dicapai karena koordinasi lintas sektor diarahkan dengan komando terpadu, bukan melalui pendekatan sektoral yang terpisah.

Selain dalam aspek produksi, kolaborasi multi-*stakeholder* juga terjadi dalam stabilisasi harga pangan. Operasi pasar besar-besaran yang dilakukan Kementan dengan melibatkan 4.500 gerai PT Pos Indonesia dan BULOG menjadi bukti kuat efektivitas koordinasi nasional dalam menjaga daya beli masyarakat (Zeri, 2025). Ketika situasi harga pangan global melonjak, kolaborasi ini berhasil menjaga harga eceran tetap di bawah HET.

Hal penting yang tidak bisa dilewatkan, kolaborasi ini bukan hanya dalam perjanjian formal, tetapi dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat. Misalnya, dalam kampung hortikultura, sinergi antara koperasi petani, Pemda, dan penyuluh menghasilkan pertumbuhan produksi dan nilai jual yang lebih tinggi. Pola ini menjadi model nasional untuk pembangunan pertanian berbasis kolaborasi lokal.

Melalui jalur koordinasi tunggal, kejelasan peran, dan basis data yang sama, kolaborasi antar-*stakeholder* kini bukan lagi jargon, tetapi realitas yang mengubah wajah pembangunan pertanian nasional. Satu Komando membuktikan bahwa dengan arah yang jelas dan komando yang solid, kebijakan lintas lembaga dapat dijalankan secara terkoordinasi dan berdampak nyata.

3. Penguatan Kemitraan Antara Petani, Pemerintah, dan Swasta

Dimensi paling nyata dari keberhasilan Satu Komando adalah lahirnya kemitraan yang setara antara petani, pemerintah, dan sektor swasta. Pola kemitraan ini menempatkan petani tidak lagi sebagai objek bantuan, tetapi sebagai pelaku ekonomi yang aktif dalam rantai nilai pertanian. Kementan memfasilitasi terbentuknya model kontrak *farming* dan korporatisasi petani berbasis koperasi atau BUMDes yang disertai jaminan *off-take* dan distribusi input produksi.

Melalui pendekatan ini, petani memperoleh kepastian pasar, akses teknologi, dan dukungan pendanaan. Di banyak daerah, Kementan menyalurkan bantuan alsintan dalam bentuk paket senilai Rp3 miliar per klaster pertanian, lengkap dengan pelatihan operator dan pemeliharaan (Timex, 2025). Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan alat, tetapi juga menciptakan ekosistem kelembagaan dan keahlian yang berkelanjutan.

Kemitraan ini juga tercermin dalam distribusi pangan pascapanen. Kementan bersama BULOG dan ID Food memperkuat sistem pengering, silo, dan RMU di daerah, kemudian menyalurkan hasil panen ke pasar melalui koperasi desa. Model Koperasi Desa Merah Putih misalnya, memungkinkan distribusi pangan dari petani ke konsumen tanpa harus melalui delapan mata rantai distribusi, cukup tiga, petani, koperasi, dan konsumen (Ramadani, 2025). Hasilnya adalah peningkatan pendapatan petani dan penurunan harga di tingkat konsumen.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi swasta melalui MoU dengan Kadin yang mencakup investasi hilirisasi dan pembinaan ekspor komoditas strategis. Kolaborasi ini memperluas akses pasar bagi petani ke sektor industri dan ekspor, serta memperkuat daya saing produk

pertanian nasional di pasar global (Redaksi, 2025). Kemitraan seperti ini menciptakan pertanian yang bukan hanya produktif, juga kompetitif.

Penting untuk dicatat, keberhasilan model kemitraan ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari desain kelembagaan yang disusun dalam kerangka Satu Komando. Dengan garis koordinasi yang jelas dan peran penyuluh, Babinsa, dan koperasi sebagai penghubung lapangan, setiap mata rantai produksi hingga distribusi terkoneksi secara sistemik. Negara hadir dalam seluruh proses untuk tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan kemitraan petani, pemerintah, dan swasta menjadi bukti kuat bahwa Satu Komando bukan hanya kebijakan administratif, melainkan strategi nyata untuk membangun ekosistem pertanian nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Mengesampingkan Ego Sektoral

1. Fragmentasi Kebijakan sebagai Ancaman Ketahanan Pangan

Selama puluhan tahun, salah satu hambatan utama dalam pencapaian swasembada pangan di Indonesia adalah fragmentasi kebijakan yang mengakar dalam pola kerja sektoral masing-masing kementerian dan lembaga. Setiap institusi berjalan dengan prioritas dan indikator keberhasilan sendiri tanpa kesamaan tujuan atau koordinasi yang kuat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan dalam distribusi sumber daya. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya sistem komando terpadu yang mampu menyatukan langkah antarsektor dalam satu kerangka pembangunan pertanian nasional.

Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir, program bantuan pertanian dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian BUMN sering kali masuk ke desa yang sama tanpa koordinasi yang memadai. Petani menerima benih dari satu kementerian, alsintan dari kementerian lain, sementara dinas pertanian setempat tidak dilibatkan dalam perencanaan teknis. Hasilnya, banyak program berakhir tidak efektif karena tidak didukung oleh pendampingan teknis yang memadai dan tidak berkelanjutan.

Ego sektoral juga tercermin dalam penentuan kebijakan harga pangan. Ketika Kementan berupaya menjaga semangat produksi melalui insentif harga bagi petani, sering kali berbenturan dengan kepentingan stabilisasi harga konsumen yang menjadi domain Kementerian Perdagangan atau BUMN pangan. Akibatnya, muncul kebijakan yang kontraproduktif di lapangan, seperti anjloknya harga saat panen raya karena keterlambatan penyerapan atau konflik antara petani dan *off taker* pemerintah.

Ketiadaan sistem kendali bersama menyebabkan institusi-institusi tersebut gagal melihat posisi strategis satu sama lain. Kementerian yang mengurus air tidak berkoordinasi dengan yang mengatur benih, begitu juga yang mengelola distribusi pangan tidak terhubung dengan pihak yang memproduksinya. Di lapangan, ini menciptakan ruang abu-abu yang membuka celah penyimpangan dan merusak kepercayaan petani terhadap negara.

Dalam konteks inilah, lahirnya pendekatan Satu Komando yang menjadi tonggak penting untuk keluar dari jebakan ego sektoral. Pendekatan ini bukan hanya menyatukan koordinasi administratif, tetapi menyusun kembali struktur kelembagaan pembangunan

pertanian berdasarkan kesatuan visi, yaitu mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, efisien, dan inklusif. Melalui komando tunggal di bawah Kementan, fungsi-fungsi produksi, distribusi, pengamanan, dan pengawasan dapat dikonsolidasikan dalam satu sistem operasional yang sinergis.

2. Satu Komando sebagai Solusi Tata Kelola Integratif

Komando terpadu yang diinisiasi Kementan terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan lintas sektor dan mengurangi ego kelembagaan yang selama ini menghambat efektivitas kebijakan. Salah satu bentuk konkret dari keberhasilan ini adalah pelaksanaan program cetak sawah yang tidak lagi berjalan sektoral, melainkan integratif. Dalam program ini, peran Kementan, Kementerian PU, TNI, Kejaksaan, dan Pemda dirumuskan secara rinci dan saling melengkapi berdasarkan satu rencana induk nasional.

Di dalam struktur satu komando, Kementan menjadi pusat pengambilan keputusan dan pengatur strategi teknis, sementara kementerian/lembaga lain menjalankan peran sesuai kapasitasnya namun dalam garis besar tujuan yang sama. Kementerian PU membangun infrastruktur air sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan melalui pemetaan AWR oleh Kementan. TNI memastikan distribusi input dan kelancaran implementasi di lapangan, sedangkan Kejaksaan hadir untuk menjamin tata kelola berjalan dengan prinsip *good governance* dan bebas penyimpangan (Simorangkir, 2025).

Koordinasi yang sebelumnya bersifat administratif kini bergeser menjadi koordinasi operasional dan taktis. Semua pihak berbicara dalam kerangka kerja yang sama, berbasis data lapangan dan target hasil yang

terukur. Dalam konteks ini, ego sektoral tidak lagi memiliki tempat karena peran tiap aktor sudah diformulasikan dalam satu sistem kerja yang saling terkait. Kejelasan peran inilah yang membuat pelaksanaan program berjalan lebih cepat, efisien, dan berdaya ungkit tinggi.

Kesuksesan serupa juga terjadi dalam program optimasi lahan dan distribusi alsintan. Dahulu, distribusi alat mesin pertanian kerap menjadi ajang rebutan pengaruh antarlembaga. Namun dalam sistem Satu Komando, distribusi dilakukan berbasis paket dan klaster wilayah dengan kontrol logistik yang dikawal bersama oleh penyuluh, Babinsa, dan Dinas Pertanian. Ini membuktikan bahwa dengan kendali tunggal, alokasi sumber daya menjadi lebih adil dan terarah.

Dalam perspektif kebijakan publik, Satu Komando telah mentransformasi pendekatan sektoral menjadi pendekatan sistemik. Tidak hanya mengatasi koordinasi yang lemah, tetapi juga membangun kebiasaan baru di birokrasi: bekerja lintas institusi dengan orientasi hasil. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa keberanian untuk mendobrak ego sektoral dan menjadikan kolaborasi sebagai norma baru dalam tata kelola pembangunan pertanian.

3. Studi Pembelajaran dari Intervensi TNI–Polri dalam Pengawasan Pangan

Keberhasilan Satu Komando juga ditunjukkan melalui peran aktif TNI dan Polri dalam mendampingi, mengawal, dan mempercepat pelaksanaan program strategis pertanian. Pada masa sebelumnya, pelaksanaan program pertanian di tingkat desa kerap menghadapi tantangan berupa penyimpangan distribusi, konflik horizontal, atau lemahnya pengawasan teknis. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas

di bawah sistem satu komando menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan pengamanan sosial yang melekat pada pelaksanaan program.

Dalam banyak kesempatan, sinergi antara penyuluh pertanian dan aparat keamanan menciptakan kepastian dan ketertiban di tingkat tapak. Babinsa mengawal distribusi pupuk dan alsintan, sementara Bhabinkamtibmas membantu memastikan prosedur pelaporan dan penerimaan bantuan berjalan transparan. Di banyak desa, aparat keamanan menjadi figur penghubung antara negara dan petani, menjembatani kebijakan dengan kebutuhan lapangan secara langsung (Pamungkas, 2024; Dimas, 2025).

Kementan juga mencatat bahwa kehadiran aparat dalam pengawasan logistik dan pelaksanaan tanam serentak berkontribusi besar dalam menekan potensi kegagalan program. Misalnya, dalam distribusi pupuk bersubsidi, aparat keamanan dilibatkan dalam inspeksi mendadak dan pelaporan bersama Satgas Pangan untuk mencegah penimbunan dan penyimpangan (Harianto, 2025). Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas program dan membangun kepercayaan publik terhadap intervensi negara.

Tidak hanya sebagai pengawal logistik, TNI dan Polri juga dilibatkan dalam pelatihan teknis, pengumpulan data, dan pendampingan kelompok tani. Di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, TNI aktif membantu pemetaan lahan dan fasilitasi penanaman jagung dalam skema percepatan tanam nasional (Triono, 2024a). Ini menunjukkan bahwa Satu Komando telah memperluas definisi keamanan nasional dari sekadar pengamanan wilayah menjadi penjaga ketahanan pangan negara.

Hal yang paling signifikan, intervensi aparat keamanan dalam Satu Komando berjalan dalam koridor sipil dan kolaboratif, bukan represif. Mereka bertindak sebagai mitra kerja pembangunan, bukan pengawas dari luar sistem. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara pengawalan dan pemberdayaan, antara disiplin dan kepercayaan. Koordinasi dan satu visi di dalam pengawalan serta pemberdayaan sumber daya manusia pertanian Indonesia akan mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian pangan Nasional.

C. Penentuan Skala Prioritas Demi Kepentingan Petani

1. Prinsip Keberpihakan: Kebijakan berbasis kebutuhan riil petani

Keberhasilan pendekatan Satu Komando dalam sektor pertanian tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari keberanian pemerintah untuk menyusun skala prioritas yang benar-benar berpihak pada petani. Dalam kerangka ini, Kementan telah melakukan langkah besar dengan menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan sektoral berbasis birokrasi ke arah pendekatan kebutuhan riil petani. Langkah ini ditandai dengan kebijakan penghapusan rafaksi dan revisi derajat sosoh dalam penyerapan gabah dan beras oleh BULOG, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketimpangan dan ketidakadilan bagi petani kecil.

Kebijakan penghapusan rafaksi ini merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap petani produsen, terutama di tengah situasi ketika harga gabah seringkali jatuh pada masa panen raya. Rafaksi, yang selama ini dijadikan alasan untuk menurunkan harga pembelian pemerintah, telah menyebabkan petani tidak mendapatkan nilai ekonomi yang pantas dari hasil produksinya. Melalui pendekatan

komando terpadu, Kementan bersama Bapanas dan BULOG menyepakati bahwa rafaksi tidak lagi relevan dalam konteks keberpihakan dan bahwa kualitas gabah petani harus dihargai secara layak sesuai kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain dalam aspek harga, keberpihakan juga tercermin dalam penataan ulang skema bantuan pertanian. Alih-alih mengejar pemerataan administratif, Kementan menerapkan skema prioritas berdasarkan klaster produksi, potensi kawasan, dan kapasitas kelembagaan petani. Sebagai contoh, bantuan alsintan dan benih tidak lagi disebar merata, tetapi dikonsentrasikan pada wilayah dengan kapasitas tanam tinggi dan ketersediaan tenaga kerja produktif, seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan (Timex, 2025). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi program, tetapi juga mempercepat dampak ekonomi bagi petani lokal.

Pendekatan prioritas ini juga berlaku dalam penyaluran subsidi pupuk. Mengacu pada data e-RDKK berbasis NIK dan spasial, Kementan berhasil memetakan petani aktif yang benar-benar membutuhkan subsidi. Hasilnya, distribusi pupuk menjadi lebih adil dan akuntabel, serta mengurangi ketergantungan petani terhadap praktik rente oleh distributor. Pendekatan ini menandai pergeseran dari politik anggaran ke arah keadilan distribusi berbasis data.

Penyusunan prioritas dalam kerangka Satu Komando tidak dilakukan sepihak dari atas, tetapi melibatkan konsultasi dan dialog dengan kelompok tani, penyuluh, pemerintah daerah, dan akademisi. Melalui forum koordinasi nasional dan rapat kerja lintas sektor, aspirasi petani menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan. Inilah bentuk keberpihakan sejati—ketika petani tidak hanya menjadi

penerima, tetapi juga mitra dalam perumusan arah pembangunan pertanian nasional.

2. *Prioritizing* untuk Daya Ungkit Produksi dan Kesejahteraan

Pendekatan prioritas yang diambil dalam Satu Komando bukan hanya berangkat dari keadilan sosial, tetapi juga dari pertimbangan strategis terhadap daya ungkit ekonomi nasional. Kementan secara eksplisit memilih intervensi yang memiliki *multiplier effect* tinggi bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, alih-alih menyebar program ke seluruh wilayah secara merata tapi dangkal. Salah satu contohnya adalah program klaster pertanian modern, yang difokuskan pada daerah transmigrasi dan kawasan pangan strategis dengan dukungan infrastruktur lengkap.

Dalam pendekatan ini, Kementan menyalurkan bantuan bukan sekadar sebagai rutinitas, tetapi sebagai investasi strategis. Bantuan alsintan, benih unggul, dan pupuk didistribusikan dalam paket terpadu kepada kelompok tani yang telah dibina secara kelembagaan dan memiliki kapasitas usaha tani yang terukur. Pendekatan ini berhasil meningkatkan efisiensi produksi hingga 30% di beberapa daerah percontohan, sekaligus menurunkan biaya produksi petani secara signifikan (Triono, 2024).

Skema ini juga diikuti oleh program regenerasi petani dan pelatihan mekanik alsintan. Kementan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan instruktur alsintan bersertifikasi untuk mendampingi petani muda di lima provinsi prioritas. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing

petani muda dalam menghadapi tantangan pertanian modern (Timex, 2025).

Penetapan skala prioritas juga terlihat dalam pelaksanaan program optimasi lahan. Di wilayah yang memiliki potensi tanam dua hingga tiga kali setahun, Kementan menempatkan intervensi secara berlapis: mulai dari pembangunan irigasi oleh Kemen PU, distribusi benih unggul dan pompanisasi oleh Kementan, hingga pengawasan lapangan oleh Babinsa. Di Aceh dan Kalimantan, model ini mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam waktu kurang dari dua musim tanam (Prakosa, 2024; Rakhmi, 2024).

Keberanian dalam menentukan prioritas juga berarti berani untuk menghentikan program yang tidak berdampak. Kementan secara tegas melakukan realokasi anggaran dari program-program simbolik menuju program yang berbasis hasil dan berdampak langsung ke petani. Ini termasuk penyesuaian program bantuan sosial yang sebelumnya tidak terukur dampaknya, menjadi program berbasis produktivitas dan efisiensi.

Berdasarkan pendekatan prioritas yang terarah dan berbasis analisis daya ungkit, Satu Komando berhasil mengarahkan sumber daya negara ke titik-titik strategis yang mampu menggerakkan sektor pertanian secara signifikan. Ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap petani tidak cukup dengan niat baik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, fokus, dan berdampak.

3. Inklusivitas dan Responsif terhadap Krisis

Keberhasilan Satu Komando dalam menetapkan skala prioritas juga tercermin dari kemampuannya untuk responsif terhadap krisis dan

inklusif terhadap kelompok-kelompok rentan dalam sistem pertanian. Ketika el nino melanda Indonesia pada 2023–2024, Kementan dengan cepat menyusun ulang skema tanam nasional, mendistribusikan varietas benih tahan kekeringan, dan memperluas area pompanisasi sebagai langkah mitigasi. Pendekatan responsif ini hanya dapat dilakukan karena adanya sistem komando terpadu yang memungkinkan pergeseran prioritas secara cepat dan terkoordinasi.

Di saat yang sama, program jaring pengaman sosial diperluas untuk menjangkau petani kecil dan buruh tani di wilayah terdampak. Distribusi cadangan pangan pemerintah dilakukan melalui operasi pasar yang dikendalikan oleh Kementan dan BULOG, serta diawasi oleh Satgas Pangan dan aparat keamanan. Langkah ini menjaga kestabilan harga pangan di konsumen sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani, dua hal yang seringkali sulit dicapai secara bersamaan tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat (Zeri, 2025; Harianto, 2025).

Inklusivitas juga diwujudkan melalui pemberdayaan koperasi desa sebagai simpul distribusi dan kelembagaan ekonomi lokal. Dalam kerangka koperasi Merah Putih, Kementan memberi ruang bagi desa-desa di daerah tertinggal dan luar Jawa untuk menjadi bagian dari sistem distribusi pangan nasional. Ini menandai perubahan paradigma bahwa pusat pertumbuhan pertanian tidak harus selalu di wilayah sentra produksi lama, tetapi dapat diperluas ke wilayah pinggiran dengan dukungan kelembagaan yang kuat (Ramadani, 2025).

Responsif juga berarti terbuka terhadap inovasi dan masukan. Kementan membuka kanal pelaporan langsung dari petani melalui platform digital, dan menindaklanjuti aspirasi yang masuk dalam perumusan prioritas kebijakan. Dalam forum koordinasi nasional,

masuk dari petani perempuan, petani muda, dan kelompok adat juga dipertimbangkan sebagai bagian dari desain program (Redaksi, 2025).

Merujuk pada strategi yang inklusif dan adaptif terhadap krisis, pendekatan Satu Komando menegaskan bahwa skala prioritas bukan sekadar alat alokasi anggaran, tetapi sebuah cermin dari nilai dasar pembangunan: keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas. Petani tidak hanya dilindungi, tetapi juga diperkuat sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional di tengah guncangan global.

D. Buah dari Satu Komando

Keberhasilan Satu Komando dalam menyatukan berbagai elemen pembangunan pertanian bukanlah hasil dari kebijakan yang kaku dan seragam, melainkan buah dari proses koordinasi yang lentur namun tegas, dialogis namun terarah. Ketika sistem pertanian nasional dihadapkan pada tantangan multidimensi—krisis iklim, fluktuasi harga global, tekanan impor, dan ketimpangan kelembagaan—maka satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah menyatukan visi dan arah kerja seluruh pemangku kepentingan. Bab ini telah menunjukkan bahwa Satu Komando bukan sekadar slogan administratif, melainkan kerangka tata kelola yang mampu menjawab kebutuhan zaman secara nyata.

Koordinasi antara stakeholder dengan Kementerian Pertanian telah melampaui batas-batas kelembagaan yang selama ini menjadi sekat produktivitas. Integrasi sistem informasi, peneguhan komando teknis di lapangan, serta pelibatan aktif TNI–Polri dan BUMN pangan menunjukkan bahwa transformasi sistemik memang mungkin terjadi jika ada kemauan politik dan kejelasan arah strategis. Apa yang dahulu terpisah dan saling menunggu, kini bergerak dalam irama kebijakan yang

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

seirama, dengan Kementan sebagai nakhoda dalam arsitektur ketahanan pangan nasional.

Namun, keberhasilan koordinasi tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan keberanian untuk mengesampingkan ego sektoral. Tantangan utama dalam sistem birokrasi kita bukan pada kurangnya program, tetapi pada lemahnya komitmen untuk bekerja bersama. Satu Komando telah membuktikan bahwa ketika institusi-institusi negara bersedia melepaskan ego masing-masing dan bekerja pada kerangka bersama, maka efisiensi dan dampak kebijakan dapat ditingkatkan secara eksponensial. Ini adalah pelajaran penting bagi reformasi tata kelola lintas sektor, tidak hanya dalam pertanian, tetapi juga di sektor-sektor strategis lainnya.

Pada akhirnya, inti dari semua keberhasilan ini bermuara pada keberpihakan. Menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan bukan sekadar wacana politik, tetapi prinsip kerja yang diwujudkan dalam penetapan skala prioritas, desain intervensi, dan arah kebijakan. Ketika rafaksi dihapus, bantuan difokuskan pada klaster potensial, dan koperasi desa diperkuat sebagai simpul logistik, maka negara sesungguhnya sedang menanamkan keadilan struktural dalam sistem pangan. Inilah wajah kebijakan yang tidak hanya bekerja secara teknokratis, tetapi juga berpihak secara etis dan strategis.

Dengan demikian, Satu Komando telah menghadirkan satu pelajaran penting: bahwa kekuatan sistem pertanian nasional tidak terletak pada banyaknya regulasi atau besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan menyatukan visi, memperkuat kepercayaan antarlembaga, dan menjadikan petani sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Inilah fondasi yang harus dijaga dan diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan, adil dalam distribusi, dan tangguh menghadapi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Rujukan

- Akhmad R. (2025). Sidak pasar 3 menteri di surabaya, kembali bongkar kecurangan takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan. *PublikasiSatu*. <https://www.publikisatu.co/nasional/1525765348/sidak-pasar-3-menteri-di-surabaya-kembali-bongkar-kecurangan-takaran-minyakita-oleh-7-perusahaan?page=2>.
- Badan Pangan Nasional. (2024). Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, beras, dan jagung disesuaikan untuk mendukung swasembada pangan. *Badan Pangan Nasional*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/harga-pembelian-pemerintah-hpp-gabah-beras-dan-jagung-disesuaikan-untuk-mendukung-swasembada-pangan>.
- Badan Pangan Nasional. (2025). Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah. *BSIP Kementerian Pertanian*. <https://serealia.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/download/regulasi/keputusan-bpn-no-2-tahun-2025-tentang-hpp-dan-rafaksi-harga-gabah>.
- Badan Pangan Nasional. (2025a). Kepala NFA jelaskan peran strategis cadangan beras pemerintah dalam Rakernas PERPADI 2025. *Badan Pangan Nasional*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/kepala-nfa-jelaskan-peran-strategis-cadangan-beras-pemerintah-dalam-rakernas-perpadi-2025>.
- Badan Pangan Nasional. (2025b). Langkah lindungi petani Indonesia, penerapan kebijakan harga pembelian pemerintah gabah terus digencarkan. *Badan Pangan Nasional*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/langkah-lindungi-petani-indonesia-penerapan-kebijakan-harga-pembelian-pemerintah-gabah-terus-digencarkan>.

- Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. (2024). Menjadi sumber suplesi jaringan irigasi, Bendungan Jlantah tingkatkan IP 172% menjadi 272%. *Balai Wilayah Sungai Bali-Penida*. <https://sda.pu.go.id/balai/bwsbali/penida/berita/berita-sda/510-menjadi-sumber-suplesi-jaringan-irigasi-bendungan-jlantah-tingkatkan-ip-172-menjadi-272->.
- BULOG. (2025). Penyaluran SPHP menjangkau 366 pasar dan 272 ritel modern selama tahun 2024. *Badan Urusan Logistik* <https://www.BULOG.co.id/2025/01/15/BULOG-sebut-jangkau-366-pasar-dan-272-ritel-dalam-penyaluran-sphp-2024>.
- Cakti, A. (2024). Menteri Pertanian: Harga gabah pada masa panen tidak boleh turun dari HPP Rp6.500. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4637053/mentan-harga-gabah-pada-masa-panen-tidak-boleh-turun-dari-hpp-rp6500>.
- Dalimunthe, A., Susilo, Y., & Haryati, S. (2024). Desentralisasi fiskal dan ketahanan pangan perkotaan: Studi komparatif di Jakarta dan Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara: Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 25(2).
- Dharma, F., Simangunsong, F., & Rusfiana, Y. (2025). Collaborative governance of the food security program in Garut Regency, West Java Province. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(3), 01--21.
- Digital P. (2024). Mendagri dan Mentan sepakat jaga pertanian. *Tempo*. <https://www.tempo.co/info-tempo/mendagri-dan-mentan-sepakat-jaga-pertanian-51380>.
- Dimas A. (2025). Mentan Amran ajak kapolda, Kapolres dan kapolsek percepat swasembada dengan gerakan tanam jagung serentak. *Sulapa.Com*. <https://sulapa.com/2025/01/13/mentan-amran-ajak-kapolda-kapolres-dan-kapolsek-percepat-swasembada-dengan-gerakan-tanam-jagung-serentak/>.

- Fahmid, I. M., Fahmid, M. M., & Badrani, A. G. (2025). Dampak kebijakan beras Indonesia: Produksi, harga, import dan kesejahteraan petani periode (2004–2024). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 21(3), 65–87. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep/article/view/48040>.
- Fauzan, M. R., Cahyani, A. D., & Malik, A. (2024). Ekonomi politik ketahanan pangan: Konflik kepentingan antara korporasi dan petani lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 175-188. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.101>.
- Fauzin. (2021). Pengaturan impor pangan negara Indonesia berbasis pada kedaulatan pangan. *Jurnal Pamator*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.10497>.
- Febrinastri F. (2024). Akselerasi swasembada pangan, Kementan kolaborasi dengan Kemen PU dan TNI untuk penguatan irigasi. *Suara.com*. <https://www.suara.com/bisnis/2024/12/05/135052/akselerasi-swasembada-pangan-kementan-kolaborasi-dengan-kemen-pu-dan-tni-untuk-penguatan-irigasi>.
- Fitriani, F., Fatih, C., Tarni, S., & Prasmatiwi, F. E. (2021). Keberlanjutan rantai nilai komoditas beras. *Agrimor*, 6(1), 27–33. <https://doi.org/10.32938/ag.v6i1.1240>.
- Fuady A. (2025). Mentan ajak kepala daerah wujudkan swasembada pangan di *retreat* Magelang. *Kabarika.id*. <https://kabarika.id/berita/2025/02/25/mentan-ajak-kepala-daerah-wujudkan-swasembada-pangan-di-retreat-magelang/>.
- Hariato M. (2025). Mentan: Operasi pasar stabilkan harga pangan pokok selama Ramadhan. *Antara*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4701445/mentan-operasi-pasar-stabilkan-harga-pangan-pokok-selama-ramadhan>.
- Heryadi, D. Y., Noor, T. I., Deliana, Y., & Hamdani, J. S. (2022). Model implementatif agribisnis padi organik berkelanjutan melalui

pendekatan *Pentahelix*. *Jurnal Agribest*, 6(1), 1–10.
<https://doi.org/10.32528/agribest.v6i1.7525>.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. (2024). Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian <https://itjen.pertanian.go.id/berita/kementan-dorong-kios-pengecer-permudah-penyaluran-pupuk-subsidi-ke-petani>.

Isma. (2025). Cadangan beras melebihi 3,7 juta ton, Indonesia menuju kemandirian pangan. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/9356/cadangan-beras-melebihi-3-7-juta-ton-indonesia-menuju-kemandirian-pangan?lang=1>.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2025). Terbukti sukses, Menteri PU akan instruksikan seluruh balai terapkan teknologi IPHA. *Kementerian Pekerjaan Umum*. <https://pu.go.id/berita/terbukti-sukses-menteri-pu-akan-instruksikan-seluruh-balai-terapkan-teknologi-iph>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Pemerintah ubah alur distribusi pupuk subsidi untuk tingkatkan efisiensi penyaluran. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-ubah-alur-distribusi-pupuk-subsidi-untuk-tingkatkan-efisiensi-penyaluran>.

Kementerian Pertanian. (2024). Pendapatan Petani Milenial Bisa 10 Juta Lebih Lewat Brigade Pangan, Begini Hitung-hitungannya. *Kementerian Pertanian*. https://www.pertanian.go.id/ap_p?show=news&act=view&id=6442

Kiki. (2025). Mentan Amran dan Gubernur Maluku Utara bahas optimalisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan. *Tribun News*. <https://makassar.tribunnews.com/2025/03/04/mentan-amran-dan-gubernur-maluku-utara-bahas-optimalisasi-sektor-pertanian-dan-ketahanan-pangan>.

- Kontan.co.id. (2024). Kepengurusan baru Akindo fokus kurangi ketergantungan impor kedelai. *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/kepengurusan-baru-akindo-fokus-kurangi-ketergantungan-impor-kedelai>.
- Koranbanjar. (2023). Kementan dan TNI perkuat sinergi, Mentan: ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. *Beritasatu*. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/44744/kementan-dan-tni-perkuat-sinergi-mentan-ketahanan-pangan-identik-dengan-ketahanan-negara>.
- Maharani, E. Z., Nurlaela, S., & Puspitojati, E. (2024). Determinan faktor dalam penerapan sistem pertanian organik pada petani anggota APPOLI. *Jurnal Penyuluhan*, 20(2), 313–322. <https://doi.org/10.25015/20202449335>.
- Majalah Hortus Archipelago. (2024). Kementan, Kemen PU, dan TNI normalisasi irigasi 2,3 juta hektare. *Majalah Hortus Archipelago*. <https://news.majalahhortus.com/kementan-kemen-pu-dan-tni-normalisasi-irigasi-23-juta-hektare/>.
- Maskun, Al Mukarramah, A. H., Bachril, S. N., & Assidiq H. (2022). Fragmented agencies in public sector: An obstruction to indonesia's climate policy implementation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1105 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012015>.
- Nikson. (2024). Pastikan ketersediaan air, Mentan Amran kolaborasi program swasembada pangan bersama Kemen PU. *BisnisJakarta.id*. <https://bisnisjakarta.id/nasional/pastikan-ketersediaan-air-mentan-amran-kolaborasi-program-swasembada-pangan-bersama-kemenpu/>.
- Otsuka, K. (2021). Strategy for transforming Indonesian agriculture. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 321–341. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2002387>.

- Palopopos (2025). Mentan Amran: Posko kejaksanaan dorong swasembada pangan lebih cepat. *Palopopos.co.id*. <https://palopopos.fajar.co.id/2025/03/19/mentan-amran-posko-kejaksanaan-dorong-swasembada-pangan-lebih-cepat/>.
- Palopopos (2025a). Pemerintah gandeng Pos Indonesia untuk pelaksanaan operasi pasar. *Palopopos.co.id*. <https://palopopos.fajar.co.id/2025/02/19/pemerintah-gandeng-pos-indonesia-untuk-pelaksanaan-operasi-pasar/>.
- Pamungkas RA. (2024). Dukung Kementan, Polri siapkan *pilot project* peningkatan produksi jagung nasional. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/727359/dukung-kementan-polri-siapkan-pilot-project-peningkatan-produksi-jagung-nasional>.
- Pilar Pertanian. (2025). Mentan Amran fasilitasi kesepakatan BULOG dan PERPADU, serap gabah petani setara 2,1 juta ton beras. *Pilar Pertanian*. <https://pilarpertanian.com/mentan-amran-fasilitasi-kesepakatan-BULOG-dan-perpadi-serap-gabah-petani-setara-21-juta-ton-beras>.
- Prakosa G. (2024). Mentan Amran Sulaiman dan Menteri PU Doddy Hanggodo tandatangani kesepakatan krusial untuk percepatan swasembada pangan. *Harianmassa.id*. <https://www.harianmassa.id/ekbis/2713906335/mentan-amran-sulaiman-dan-menteri-pu-doddy-hanggodo-tandatangani-kesepakatan-krusial-untuk-percepatan-swasembada-pangan?page=2>.
- Pratama, F. C., Salim, U., & Indrawati, N. K. (2019). Creating competitive advantage in management strategies for rice mills. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(2), 295–302. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.02.12>.
- Pupuk Indonesia Logistik. (2024). Tentang pemasaran. *Pupuk Indonesia Logistik*. <https://www.pi-logistik.com/page/index/tentang>

- Redaksi. (2025). Teken MoU, Mentan Amran siap libatkan Kadin untuk kejar swasembada pangan. *OridekNews*. <https://orideknews.com/2025/03/10/teken-mou-mentan-amran-siap-libatkan-kadin-untuk-kejar-swasembada-pangan/>.
- Sadli N. (2025). *Kick Off* Hari Desa, Mentan Amran ajak kades seluruh Indonesia untuk jaga ketahanan pangan. *Lambusi.com*. <https://www.lambusi.com/news/114882959/kick-off-hari-desa-mentan-amran-ajak-kades-seluruh-indonesia-untuk-jaga-ketahanan-pangan?page=2>.
- Sariati, I., & Hayanti, D. (2023). Transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani sebagai model akselerasi pengembangan agribisnis. *Suluh Tani*, 1(2), 28-34.
- Setiawan, M. G., Suryani, S. O., Suhada, H. R., Wibowo, S., & Hartono, A. (2024). Optimalisasi subsidi pupuk untuk mendukung ketahanan pangan Nasional. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 6(4), 1077-1083.
- Setiawan, I. (2025). BULOG Jatim serap 425 ribu ton beras, rekor tertinggi sejak awal tahun. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4832905/BULOG-jatim-serap-425-ribu-ton-beras>.
- Sihombing R.C. (2024). Kementan gandeng himpuni wujudkan swasembada Pangan. *Sokoguru*. <https://sokoguru.id/humaniora/kementan-gandeng-himpuni-wujudkan-swasembada-pangan>.
- Sintiya, E. S. (2023). Analisis ketersediaan beras menggunakan sistem dinamik sebagai pendukung kebijakan ketahanan pangan. *Tecnoscienza*, 7(2), 269–282. <https://doi.org/10.51158/tecnoscienza.v7i2.852>.
- Simorangkir S. (2025). Mentan amran apresiasi posko kejaksanaan dorong swasembada pangan lebih cepat. *Wahananews.co*.

<https://wahananews.co/ekuin/mentan-amran-apresiasi-posko-kejaksanaan-dorong-swasembada-pangan-lebih-cepat-5A3n8Y0d9m/2>.

- Suprehatin, Ulpah, A., Setiawan, C., Putri, T. A., Hakim, R. I., & Rangganis, S. A. (2025). Revitalisasi kelembagaan menuju transformasi sistem perbenihan padi yang berkelanjutan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(1), 1133-1140.
- Syachbudy, Q. Q. (2023). Efektivitas Program Pajale pada komoditas jagung di Indonesia. *Paradigma Agribisnis*, 5(2), 129-137. <https://doi.org/10.33603/jpa.v5i2.7322>.
- Timex, R. (2025). Teken MoU, Mentan Amran dan Menaker Yassierli siapkan SDM handal untuk klaster pertanian modern. *Timexkupang.com*. <https://timexkupang.fajar.co.id/2025/03/04/teken-mou-mentan-amran-dan-menaker-yassierli-siapkan-sdm-handal-untuk-klaster-pertanian-modern/>.
- Tirtalistyani, R., Murtiningrum, M., & Kanwar, R. S. (2022). Indonesia rice irrigation system: Time for innovation. *Sustainability*, 14(19), 12477.
- Triono S. (2024). Pastikan ketersediaan air, Mentan Amran kolaborasi program swasembada pangan bersama Kemen PU. *Jateng Viva*. <https://jateng.viva.co.id/bisnis/2162-pastikan-ketersediaan-air-mentan-amran-kolaborasi-program-swasembada-pangan-bersama-kemenu>.
- Triono S. (2024a). Kementerian Pertanian perkuat sinergi dengan TNI AD wujudkan swasembada pangan. *Jateng Viva*. <https://jateng.viva.co.id/nasional/2430-kementerian-pertanian-perkuat-sinergi-dengan-tni-ad-wujudkan-swasembada-pangan>.
- Yani, T. K. (2024). Mentan Amran ajak kepala desa seluruh Indonesia berkolaborasi wujudkan swasembada pangan. *Media Indonesia*. Diakses 3 April 2025 dari <https://mediaindonesia.com/>

nusantara/716045/mentan-amran-ajak-kepala-desa-seluruh-indonesia-berkolaborasi-wujudkan-swasembada-pangan.

Vinta. (2025). PERPADI Banyumas tingkatkan peran penggilingan padi jaga ketahanan pangan. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/1345070/perpadi-banyumas-tingkatkan-peran-penggilingan-padi-jaga-ketahanan-pangan>.

Wicaksono, D. W. (2022). Strategi pengembangan usaha penggilingan padi di UD Sumber Rejeki Barokah. *Jurnal Javanica*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.57203/javanica.v1i2.2022.30-44>.

Zeri. (2025). Mentan pimpin operasi pasar pangan murah besar-besaran, libatkan 4.500 gerai Kantor Pos di Seluruh Indonesia. *Okinews.com*. <https://okinews.disway.id/read/14583/mentan-pimpin-operasi-pasar-pangan-murah-besar-besaran-libatkan-4500-gerai-kantor-pos-di-seluruh-indonesia>.

B. Sumber Bacaan

BBPP Ketindan. (2024). BULOG tidak turun langsung ke lapangan, hpp masih rendah di Klungkung. *BBPP Ketindan*. <https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/blog/post/BULOG-tidak-turun-langsung-ke-lapangan-hpp-masih-rendah-di-klungkung>

BULOG. (2023). Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2023. *BULOG*. <https://www.BULOG.co.id/wp-content/uploads/2025/01/26.-Laporan-TJSL-2023.pdf>.

CNBC Indonesia. (2024). Pak Prabowo mau RI swasembada jagung, ini saran petani. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241023152948-4-582423/pak-prabowo-mau-ri-swasembada-jagung-ini-saran-petani>.

- DPR RI. (2024). Pemerintah diminta pastikan beras BULOG terdistribusi merata Guna Menekan kenaikan harga. DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/03/pemerintah-diminta-pastikan-beras-BULOG-terdistribusi-merata-guna-menekan-kenaikan-harga>.
- Pilar Pertanian. (2025). Kolaborasi Kementan dan Kemdiktisaintek wujudkan swasembada pangan nasional berkelanjutan. *Pilar pertanian*. <https://pilarpertanian.com/kolaborasi-kementan-dan-kemdiktisaintek-wujudkan-swasembada-pangan-nasional-berkelanjutan>.
- Pilar Pertanian. (2025). Mentan-Mentrans teken kesepakatan bersama pengembangan kawasan transmigrasi untuk swasembada pangan. *Pilar pertanian*. Diakses 16 April 2025 dari <https://pilarpertanian.com/mentan-mentrans-teken-kesepakatan-bersama-pengembangan-kawasan-transmigrasi-untuk-swasembada-pangan>.
- Tempo. (2025). Alasan BULOG tak maksimal menyerap gabah petani menurut Peneliti CORE. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-BULOG-tak-maksimal-menyerap-gabah-petani-menurut-peneliti-core-1207614>.
- Widi, H. (2025). Stok beras RI melimpah, Sejumlah negara pengeksport beras "gerah". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/stok-beras-ri-melimpah-sejumlah-negara-pengeksport-beras-gerah>.

BIOGRAFI PENULIS

Andi Amran Sulaiman adalah sosok yang dikenal luas sebagai figur inspiratif dalam dunia pertanian Indonesia. Amran lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ayahnya, Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan, sementara ibunya, Andi Nurhadi Petta Bau merupakan sosok ibu tangguh yang membesarkan dua belas anak. Kecintaan Amran pada dunia pertanian membawanya menempuh studi lebih lanjut hingga akhirnya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Amran belajar ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau memperoleh gelar sarjana pada 1993, magister pada 2003, dan doktor pada 2012. Amran lulus dengan IPK maksimal dan mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Saat ini ia memegang 5 hak paten dan tercatat sebagai dosen di universitas almahmatnya. Ia menerima penghargaan sipil Satyalancana Pembangunan dari Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Perjalanan hidup Amran mencerminkan kerja keras dan komitmen pada kemajuan bangsa. Selain sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Keahliannya di bidang pertanian dan kepeduliannya terhadap nasib petani Indonesia menjadikannya sosok yang layak dipercaya untuk memimpin Kementerian Pertanian. Amran pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertanian pada tahun

2014 dan menjabat hingga 2019. Pada 25 Oktober 2023, Amran kembali dipercaya untuk mengemban tugas yang sama. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Amran kembali masuk dalam Kabinet Merah Putih, menjadikan dirinya sebagai salah satu menteri pertanian yang menjabat selama tiga periode.

lim Mucharam saat ini menjadi pejabat fungsional Perencana Ahli Madya di Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian dengan tugas utama di bidang pengembangan kawasan pertanian. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Sekretaris Staf Khusus Menteri Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian (2006-2009), staf Bagian Pemantauan dan Evaluasi (2011-2014), Kepala Sub Bagian Pelaporan Kementerian Pertanian (2014-2015) dan Kepala Sub Bagian Bahan Koordinasi (2015-2016).

lim Menempuh pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Jakarta (1999-2004), Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Brawijaya Malang (2009-2011), dan Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (2016-2022). Riwayat pendidikannya menunjukkan konsistensi lim di bidang pertanian dan lingkungan. Disertasinya yang berjudul *“Pengembangan Indikator dan Strategi Pembangunan Pertanian Padi Berkelanjutan di Indonesia”* menjadi bukti kontribusinya terhadap penguatan konsep pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dr. lim Mucharam, S.P., M.P.

Selain aktif di birokrasi, lim juga produktif dalam bidang akademik dan penulisan. Ia telah mempublikasikan karya ilmiah di berbagai jurnal internasional, antara lain *International Journal of*

Sustainable Development and Planning (2020) dan *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* (2022). Beberapa bukunya, antara lain *Sinergi Menata Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19* (2021), *Pertanian Tangguh Indonesia Tumbuh* (2021), dan *Pedoman Teknis Pemanfaatan CSR untuk Pengembangan Korporasi Petani Hijau* (2024), yang menggambarkan komitmennya dalam memperkuat kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Erwin Ismu Wisnubroto merupakan dosen dan peneliti, sekaligus Wakil Rektor II di Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI), Malang. Kepakaran yang dimilikinya di bidang perencanaan lanskap pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan wilayah berkelanjutan. Ia dikenal aktif dalam riset-riset yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam tata ruang pertanian, khususnya di kawasan periurban.

Erwin menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Brawijaya (2008), kemudian melanjutkan studi Magister Filsafat di bidang Ilmu Tanah pada Massey University, New Zealand (2011–2014). Gelar Doktor (Ph.D.) diraihinya dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) (2016–2022) dalam bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan penelitian yang mengembangkan model strategis pembangunan pertanian periurban di Kota Batu melalui pendekatan spasial dan analisis prospektif. Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dr. Erwin Ismu Wisnubroto.

Sejak tahun 2008, Erwin berkarier sebagai dosen dan peneliti di UNITRI Malang, di mana ia mengajar mata kuliah terkait perencanaan

Satu Komando
Wujudkan Swasembada Pangan

lanskap, pertanian berkelanjutan, dan analisis geospasial. Erwin juga terlibat aktif di dalam penelitian dan pengembangan *value chain* pertanian ubikayu di Indonesia (2016-2021) bersama ACIAR dan CIAT-Alliance Bioversity Internasional.

Erwin aktif menulis di berbagai jurnal internasional, termasuk *Natural Hazards* (2025), *E3S Web of Conferences* (2023), dan *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2021). Selain itu, ia menjadi pembicara kunci di berbagai forum internasional seperti *Asian Cultural Landscape Association Symposium* (2025) dan beberapa kegiatan Kementerian Pertanian. Fokus risetnya saat ini meliputi pertanian periurban, ketahanan lanskap budaya, dan integrasi kebijakan tata guna lahan berkelanjutan.

Muhammad Ikhsan adalah seorang fungsional Perencana Ahli Muda di Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian. Ikhsan menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung (1995-2000), serta Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor (2002-2004). Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Muhammad Ikhsan, S.E., M.M.

Sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 Ikhsan berkecimpung di bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian. Pada 2018-2021 sebelumnya penulis pernah berkecimpung di Bidang Penyusunan Program Pembangunan Pertanian, pada 2009-2018 penulis berkecimpung di Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

Dede Wahyu Fahmi M. adalah seorang pejabat fungsional Perencana Ahli Pertama di Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian. Ia memiliki pengetahuan dan latar belakang yang kuat dalam sistem dan manajemen pertanian di Indonesia. Menempuh pendidikan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor (2000-2006), dan Master of Agriculture di Kyungpook National University, South of Korea (2019-2020), judul tesis yang sekaligus menjadi jurnal internasional adalah *Factors Influencing the Success of Farmers Community Group for Rural Agricultural Development in Bali Province, Indonesia*.

Dede juga memiliki pengalaman mengikuti berbagai program strategis di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu tim pada Program Upaya Khusus (UPSUS) Provinsi Bali, tim pada Program Upaya Khusus (UPSUS) Provinsi Sulawesi Tengah, sekertaris pada Tim Riset Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi Teknologi Pertanian, sekertaris pada Tim Riset Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, tim pada Dewan Energi Nasional; sekertaris pada Tim Riset Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian; tim pada Program Food Estate; dan tim pada Program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dede Wahyu Fahmi M, S.P., M.Agr.

SATU KOMANDO PERTANIAN WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari empat program utama negara, sejajar dengan ketahanan energi, hilirisasi, dan program makan bergizi untuk anak-anak. Namun, sektor pangan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Ia melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aktor non-negara yang memiliki fungsi dan mandat yang berbeda-beda. Misalnya Kementerian Pertanian berfokus pada produksi pangan, tetapi sangat bergantung pada dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan air, Kementerian BUMN melalui BULOG dan ID Food dalam stabilisasi pasokan dan harga, serta TNI/Polri dalam percepatan implementasi lapangan.

Konsep Satu Komando Pertanian Pangan Nasional hadir sebagai jawaban atas perlunya integrasi kebijakan dan pelaksanaan lintas sektor serta lintas level pemerintahan. Satu Komando Pembangunan Pertanian Pangan Nasional bukan sekadar slogan, melainkan pendekatan strategis yang menjadikan sektor pangan sebagai urusan bersama yang ditangani secara terkoordinasi dari pusat hingga desa. Buku ini adalah dokumentasi penting atas semangat gotong royong lintas sektor dalam mencapai cita-cita besar bangsa: swasembada pangan. Di dalamnya termuat langkah-langkah konkret yang telah dan akan ditempuh, mulai dari tata kelola kelembagaan hulu, transformasi penyuluhan dan mekanisasi produksi, hingga penguatan sistem distribusi dan stabilisasi harga di tingkat hilir.



Redaksi Pertanian Press

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. Ir. H. Juanda No.20, Bogor 16122

<https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>

